



**PERILAKU POLITIK WAKIL PRESIDEN MOHAMMAD HATTA
TAHUN 1945-1956**

SKRIPSI

Oleh
Mohammad Dhofir
NIM.130210302054

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PERILAKU POLITIK WAKIL PRESIDEN MOHAMMAD HATTA
TAHUN 1945-1956**

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

**Mohammad Dhofir
NIM.130210302054**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ibu Siti Murahma dan Ayah Abdul Latif yang sangat saya cintai dan sayangi yang telah memberikan dorongan spiritual dan moril kepada penulis selama ini;
2. Bapak/Ibu Guru SDN Tamanan III, SMPN 1 Tamanan , SMAN Tamanan, serta Dosen Prodi. Pend. Sejarah Jurusan P. IPS FKIP Universitas Jember yang telah tulus membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
3. Alm. H Fadli yang gemar menceritakan peristiwa sejarah dan nilai-nilai heroik (jangan melupakan sejarah) kepada penulis;
4. Almaterku, Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang saya banggakan.

MOTO

Hanya satu tanah yang disebut tanah airku
Ia berkembang dengan amal, dan amal itu ialah amalku
(Mohamad Hatta)*



*) Noer, D. 1990. *Mohammad Hatta Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES, Hal 104.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Dhofir

Nim : 130210302054

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Perilaku Politik Wakil Presiden Mohamad Hatta Tahun 1945-1956” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Juni 2017

Yang menyatakan,

Mohammad Dhofir

NIM 130210302054

SKRIPSI

**PERILAKU POLITIK WAKIL PRESIDEN MOHAMMAD HATTA
TAHUN 1945 - 1956**

Oleh
Mohammad Dhofir
NIM 130210302054

Pembimbing

Dosen Pembimbing 1 : Drs. Sumarjono, M.Si

Dosen Pembimbing 2 : Drs. Kayan Swastika, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Perilaku Politik Wakil Presiden Mohamad Hatta Tahun 1945 - 1956” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada:

Hari, tanggal :

Tempat :

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Sumarjono, M.Si
NIP. 19580823 198702 1 001

Drs. Kayan Swastika, M.Si
NIP. 19600518 198902 1 001

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Sugiyanto, M.Hum
NIP. 19570220 198503 1 003

Dr. Nurul Umamah, M.Pd
NIP 19690204 199303 2 008

Mengesahkan
Dekan,

Prof. Drs. Dafik, M.Sc, Ph.D.
NIP. 19680802 199303 1 004

RINGKASAN

Perilaku Politik Wakil Presiden Mohammad Hatta Tahun 1945-1956; Mohammad Dhofir, 130210302054; 2017; **xxi+133** halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Latar belakang pemilihan masalah ini adalah penulis melihat sosok wakil Presiden Mohammad Hatta selama menjabat sebagai wakil Presiden dari tahun 1945 hingga ia mengundurkan diri di tahun 1956 mempunyai perilaku politik yang berani dan bahkan dinilai agak kontroversial sebagai wakil Presiden. Salah satu contoh perilaku politik Mohammad Hatta yang dinilai berani sehingga mengundang terjadinya silang pendapat mengenai perilaku politik Mohammad Hatta yakni ketika mengeluarkan beberapa maklumat di awal-awal kemerdekaan yang berimplikasi kepada transformasi sistem pemerintahan Presidensial menjadi sistem pemerintahan Parlementer. Transformasi sistem pemerintahan ini dinilai oleh sebagian kalangan sebagai langkah yang inskonstitusional karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana latar belakang kondisi lingkungan sosial, budaya, pendidikan dan politik Mohammad Hatta? (2) Bagaimana wujud perilaku politik Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden Republik Indonesia?. Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah: (1) Memahami latar belakang kondisi lingkungan sosial, budaya, pendidikan dan politik Mohammad Hatta; (2) Memahami wujud perilaku politik Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Sejarah dengan langkah-langkah: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yaitu Pendekatan Politik dengan teori Aksi Talcot Parson.

Hasil penelitian ini adalah wujud-wujud dari perilaku politik wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai manifestasi dari faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Perilaku politik wakil Presiden Mohammad Hatta diwujudkan di antaranya dalam proses

transformasi sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer di awal-awal kemerdekaan khususnya 14 Nopember 1945. Pemberian surat wasiat politik atau testamen politik kepada Tan Malaka 1 Oktober 1945, ratifikasi perjanjian Linggajati pada 25 Maret 1947, kebijakan rasionalisasi militer tahun 1948 dan mundurnya Mohamamd Hatta sebagai wakil Presiden pada 1 Desember 1956.

Simpulan dari penelitian ini adalah secara faktor internal kondisi latar belakang keadaan sosial budaya, politik dan pendidikan mempengaruhi perilaku politik Mohammad Hatta. Mohamamd Hatta yang merupakan orang Minangkabau, faktor kondisi sosial budaya Minang sekaligus pendidikannya yang ia tempuh di Eropa adalah sebagai faktor internal terbentuknya perilaku politik Mohamamad Hatta sebagai seorang yang beraliran sosialis demokrat.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku politik Mohamamd Hatta adalah situasi sistem politik, ekonomi, budaya Indonesia pada saat itu yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan-keputusan politik Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden. Berdasarkan penelitian ini, maka saran yang hendak penulis kemukakan yaitu kepada para pemuda calon generasi penerus bangsa, kita harus bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan serta dapat menerapkan nilai-nilai luhur yang pernah diperjuangkan oleh para *The Founding Fathers* seperti halnya Mohamamd Hatta yang berjuang untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang sebenarnya.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Perilaku Politik Wakil Presiden Mohamad Hatta Tahun 1945-1956. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Proses penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini tidak lepas dari bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc, Ph.D., Selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Drs. Dafik, M.Sc, Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
3. Drs. Sumarjono, M.Si, Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, serta pengarahan yang sangat berguna hingga terselesainya skripsi ini;
4. Drs. Kayan Swastika, M.Si, Selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran hingga terselesainya skripsi ini;
5. Dr. Nurul Umamah, M.Pd, Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah dan Penguji 2 yang telah memberikan masukan yang berguna bagi penyempurnaan skripsi ini;
6. Dr. Sumardi, M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Drs. Sugiyanto, M.Hum selaku Penguji 1 yang telah memberikan masukan yang berguna bagi penyempurnaan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat berharga selama menyelesaikan studi di FKIP Pendidikan Sejarah Universitas Jember;
9. Kedua orang tuaku Ayah Abdul Latif dan Ibu Siti Murahma yang tiada kenal lelah dalam memberi kasih sayang, mendidik, memberikan doa, dan memberikan motivasi selama ini;

10. Sahabat-sahabatku Bang Rauf, Andi, Subhan, Agung, Hanif, Jamal, Faed, Imam Benjo, Alfian Tabla, Lek Miski, Dol (Ghemmek) dan kawan-kawan yang lain.
11. Kawan-kawan GMNI Komisariat FKIP, Mas Doni, Mas Sanda (Bagong), Mas Hasan, Mas Dayat, Mas Rauf, Mas Ali Baba, Almarhum Mas Tri, Wildan, Ridho, Aries, Robit, Samid, Novita Ayu, Nandra, Ferman, Diva, Rofi, Diana, Budi, Tio, Agustin, Enggar, Fauzan, Gio, dan kawan-kawan komisariat yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013, Acis, Dita, Linda, Sulay Bob Jeddut, Yazid, Lutfi dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu beserta kakak-kakak angkatan 2010, 2011, 2012, terutama Mas Alfandaru yang telah berbaik hati meminjamkan referensinya dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini;
13. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Setiap karya yang dihasilkan manusia pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, maka dari itu penulis menerima dengan tangan terbuka segala bentuk kritik yang membangun demi lebih sempurnanya skripsi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, 24 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Pemilihan Masalah	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul.....	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
BAB 3. METODE PENELITIAN	22
BAB 4. LATAR BELAKANG KEHIDUPAN POLITIK	
MOHAMMAD HATTA	25
4.1 Latar Belakang Kondisi Lingkungan Sosial.....	25
4.2 Latar Belakang Lingkungan Budaya.....	27
4.3 Latar Belakang Lingkungan Pendidikan dan Politik.....	35
4.4 Gagasan-Gagasan Politik Mohamad Hatta.....	41
BAB 5. WUJUD PERILAKU POLITIK WAKIL PRESIDEN	
MOHAMMAD HATTA	48
5.1 Masa Revolusi Kemerdekaan Tahun 1945-1949.....	49

5.1.1 Transformator Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Dari Sistem Presidensial Menjadi Sistem Parlementer.....	50
5.1.2 Testamen Kita (Testamen Politik Kepada Tan Malaka).....	71
5.1.3 Persetujuan Perjanjian Linggajati.....	81
5.1.4 Rasionalisasi Militer.....	87
5.2 Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1956.....	92
5.2.1 Mengundurkan diri Sebagai Wakil Presiden.....	88
5.2.1.1 Mohammad Hatta Sebagai Wakil Presiden 1950-1956.....	97
5.2.1.2 Mohammad Hatta Mundur Sebagai Wakil Presiden.....	104
BAB 6. PENUTUP.....	111
6.1 Simpulan.....	111
6.2 Saran-saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	121

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. MATRIKS PENELITIAN.....	121
B. MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN NO. X.....	122
C. AMANAT KAMI.....	123
D. KE ARAH INDONESIA MERDEKA.....	124
E. FOTO-FOTO MOHAMMAD HATTA.....	145
G.1: Mohammad Hatta ketika berumur 8 tahun.....	145
G.2: Mohammad Hatta menjadi pengurus Perhimpunan Indonesia di Belanda tahun 1925.....	145
G.3: Mohammad Hatta menjadi pengurus eksekutif dari organisasi liga menentang imperialisme	146
G.4: Mohamad Hatta ketika berpidato pada sidang KNIP di Malang pada 25 Februari 1947.....	146

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Masalah

Mohammad Hatta adalah sosok penting yang mempunyai jasa besar dalam membawa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan kolonialisme imperialisme dan menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Peran dan pemikiran Mohammad Hatta merupakan salah satu yang paling menonjol dari tokoh-tokoh bangsa lainnya di segala bidang baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Mohammad Hatta sebagai salah satu bapak pendiri bangsa dan seorang proklamator, hampir seluruh perhatian hidupnya dicurahkan dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Perjuangan untuk terlepas dari penjajahan kolonialisme dan imperialisme mencapai puncaknya saat diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dan setelah menjadi negara merdeka, Mohammad Hatta terpilih secara aklamasi dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945 menjadi wakil Presiden mendampingi Soekarno sebagai Presiden Indonesia.

Sebagai negara yang baru merdeka, hal yang fundamental selanjutnya untuk dilaksanakan adalah bagaimana mengisi kemerdekaan tersebut, sebab memproklamasikan kemerdekaan lebih mudah daripada untuk mempertahankannya. Apalagi untuk pemerintah dan rakyat Indonesia yang menyatakan kemerdekaannya dalam pada bulan Agustus 1945, merupakan lebih banyak berdasarkan kepada semangat dan kemauan untuk merdeka. Deliar Noer (1990:260) mengatakan Negara Indonesia yang begitu luas wilayahnya masih belum mempunyai pemerintah yang satupadu, dan oleh sebab itu ketika berbagai lembaga kementerian dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945, jangkauan daerahnya dalam kenyataannya lebih tergantung pada perkembangan selanjutnya. Juga kedudukan Presiden beserta wakil Presiden masih harus mengalami ujian khususnya dari pihak kolonial Belanda yang ingin berkuasa lagi di Indonesia. Sebab itu, berbagai usaha dilakukan oleh para pemimpin pemerintahan negara dalam rangka untuk mempertahankan revolusi kemerdekaan.

Pada 18 Agustus 1945, Mohammad Hatta dan Soekarno dalam kedudukannya sebagai wakil presiden dan presiden Indonesia mengeluarkan suatu maklumat kepada rakyat Indonesia untuk menghimbau “rakyat dari segala lapisan agar tetap tenang, siap sedia dan memegang teguh disiplin” (Hatta, 2011:108). Kemudian dalam rangka pembuatan keputusan politik pada perkembangan selanjutnya, banyak sekali keputusan-keputusan politik yang dikeluarkan oleh Mohammad Hatta sebagai manifestasi dari perilaku politiknya. Hal yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini adalah perilaku politik Mohammad Hatta yang dapat dikatakan, dalam konteks pembuatan keputusan politik, perilaku politik Mohammad Hatta menurut perspektif penulis adalah sosok demokratis yang berani sehingga mengundang adanya silang pendapat mengenai perilaku politik tersebut.

Silang pendapat disini dimaksudkan karena meskipun secara konstitusi Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden, namun seringkali dalam konteks pengambilan keputusan politik acapkali bertentangan dengan Presiden Soekarno dan juga faktanya keputusan-keputusan politik yang diambil oleh Mohammad Hatta yang terjadi khususnya di awal kemerdekaan juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Hal ini bisa dilihat pada masa-masa Indonesia baru merdeka yang mengalami suatu fenomena perubahan sistem politik pemerintahan. Preferensi sistem pemerintahan dan bentuk negara RI dengan disahkannya UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara RI, secara eksplisit menganut bentuk negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan Presidensial (Bab III pasal 4 Ayat 1). Preferensi sistem pemerintahan Presidensial sebagai bentuk sistem pemerintahan negara RI itu sendiri bukanlah sebuah pilihan tanpa dasar, melainkan sebuah pilihan yang penuh perhitungan, khususnya perhitungan strategis-politis dalam konteks revolusi kemerdekaan.

Penerapan sistem Presidensial yang termaktub dalam UUD 1945, bukanlah suatu sistem pemerintahan yang terjadi begitu saja. Akan tetapi, jika di tarik sejarah terbentuknya, sistem pemerintahan presidensial tersebut tidak jauh pada kenyataannya adalah suatu konsep negara yang di gagas oleh Soekarno.

Sistem pemerintahan presidensial tersebut adalah perwujudan, atau setidaknya pengaruh, dari gagasan “sosio-demokrasi” Soekarno, khususnya ide Soekarno tentang *democratisch centralism*. Paralelisme keduanya dapat dilihat dari asumsi-asumsi dasarnya, yakni menolak demokrasi liberal (demokrasi barat) yang terjelma sebagai sistem parlementer (Swastika, 2004:107). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa sistem presidensial merupakan perwujudan konsep negara yang dicita-citakan oleh Soekarno yang menentang pemberlakuan demokrasi ala barat yang diwujudkan dalam bentuk demokrasi Parlementer.

Selain itu pula, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai satu-satunya wadah politik bagi rakyat. Partai ini didirikan tanggal 22 Agustus 1945 dan dikatakan menjadi partai negara (*staatspartij*), yang berusaha mencapai tujuan: 1) memperkuat persatuan bangsa dan Negara; 2) memperbesar rasa cinta, setia, dan bakti kepada Tanah Air; 3) mengikhtiarkan program ekonomi dan sosial; 4) membantu tercapainya keadilan sosial dan perikemanusiaan dengan jalan perdamaian Internasional (Sekretariat Negara RI, 1995:504).

Hal yang menarik disini, konsepsi Soekarno tentang sistem Presidensial dan pendirian partai tunggal Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai *staatspartij* pada perkembangan selanjutnya tidak berjalan lancar. Pendirian suatu partai tunggal seperti ini berlawanan sama sekali dengan cita-cita Mohammad Hatta tentang demokrasi, Mohammad Hatta beranggapan partai tunggal ini cenderung kepada negara fasis atau komunis yang mana hal ini di tentang Mohammad Hatta (Noer, 1990:260-261). Maka dari itu, Mohammad Hatta yang dikenal sebagai seorang yang berpendirian teguh terhadap prinsip prinsipnya, melakukan manuver politik untuk menggolkan gagasannya tentang demokrasi parlementer dan bentuk negara serikat, termasuk sistem multipartai yang sangat ditentang oleh Soekarno (Adam, 2003:230).

Bersama dengan Sutan Sjahrir sebagai ketua BPKNIP, Mohammad Hatta mengeluarkan serangkaian maklumat yang radikal dalam sistem Presidensial yang termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945 yang menjadi tonggak dasar perubahan sistem Parlementer. Dimulai dengan dikeluarkannya beberapa maklumat seperti maklumat no X (Untuk Selengkapnya Lihat Lampiran B, Hal

122), maklumat 1 November 1945 dan Maklumat 3 November 1945, telah berhasil mengubah sistem pemerintahan dari sistem Presidensial menjadi sistem Parleментар.

Mohammad Hatta mengatakan bahwa peristiwa peralihan kekuasaan di bulan Nopember 1945 itu mempunyai maksud dan tujuan untuk menetralsir tuduhan bahwa Soekarno sebagai Presiden RI adalah kolaborator Jepang, dan maklumat ini hanya di tandatangi oleh Mohamad Hatta sendiri (Hatta, 2011:115). Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan sistem parlementer dan multi partai merupakan cerminan dari Mohamad Hatta sebagai sosok yang demokratis. Namun tetapi, anehnya jika keterangan tersebut benar demikian, lantas mengapa Soekarno mengatakan kepada Sayuti Melik (Priyadi, 1986:75) “bahwa ia telah diserobot Hatta”.

Terlepas dari persoalan mana yang benar dan mana yang salah dari dua keterangan *The Founding Fathers* negara RI itu, dalam melihat fenomena transformasi sistem pemerintahan yang terjadi pada 14 Nopember 1945 tersebut, bagi Adam Malik (1984:76) dan Ahmad Subardjo (1978:414) hal itu adalah merupakan suatu “*silent coup d’etat*” yang “janggal dalam arti kedaulatan rakyat dan revolusi” karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Peristiwa tersebut adalah suatu perebutan kekuasaan dengan bantuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Akan tetapi, keterangan oleh Adam Malik dan Ahmad Subardjo tersebut dibantah oleh Aboe Bakar Loebis (mantan staf wakil Presiden Mohammad Hatta) yang mengatakan bahwa “konklusi perubahan sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan Presidensial menjadi sistem Pemerintahan Parleментар sebagai hasil suatu *silent coup* merupakan konklusi yang simplitis, karena tidak mempertimbangkan suasana dan faktor-faktor lain pada waktu itu (1992:260).

Jika keterangan dari para aktor yang terlibat (*historical actor*) demikian membingungkan, lalu bagaimanakah penjelasan yang diberikan oleh para ilmuwan dari hasil penelitian-penelitiannya terhadap fenomena perubahan sistem pemerintahan RI di awal kemerdekaan tersebut? maka tidak mengherankan pula dalam memandang fenomena ini banyak mengundang interpretasi-interpretasi

yang semakin beragam khususnya bagi para ilmuwan. Salah satu interpretasi yang dinilai kontroversial dalam megilustrasikan fenomena perubahan sistem pemerintahan tersebut adalah Ben Anderson (1988:195-219) dan Lambert Giebels (2001:395-400) yang mengatakan bahwa peristiwa ini adalah suatu kudeta diam-diam (*Silent Coup*) terhadap kekuasaan mutlak yang dimiliki oleh Presiden Soekarno. Pasalnya, Maklumat X itu hanya berdasarkan tanda tangan wakil Presiden Mohammad Hatta yang mengubah Demokrasi Presidensial ke Demokrasi Parleментар.

Adam (2003:236) memandang fenomena perubahan tersebut adalah suatu “kudeta konstitusional” wakil Presiden Mohammad Hatta terhadap Presiden Soekarno. Jelas dalam UUD 1945, secara normatif bahwa wakil Presiden adalah sebagai peran pengganti daripada Presiden ketika Presiden berhalangan, namun dalam praktiknya wakil Presiden Mohammad Hatta memiliki kekuasaan yang besar untuk bertindak secara independen dari Presiden. Serangkaian maklumat dan peraturan yang bersandar pada kekuatan tanda tangan wakil Presiden Mohammad Hatta telah mengubah sistem Presidensial menjadi sistem Parleментар. Oleh karena itu, penjelasan yang sedemikian membingungkan dan belum menemukan titik terang turut menjadi dasar alasan pertimbangan kepada penulis mengapa penelitian ini dilakukan.

Setelah sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi sistem pemerintahan Parleментар, konsekuensi politik saat itu maka, suara rakyat harus di salurkan melalui organisasi politik. Artinya partai-partai politik harus didirikan, sehingga tidak mengherankan pada bulan Mei 1946, tercatat jumlah partai politik terdiri dari 137 partai politik (lihat Anderson, Kelahiran Partai-Partai, 1988:231-260; dan Budisantoso, 2002:349).

Selain itu, perilaku politik Mohammad Hatta dinilai juga sangat berani dalam mengambil keputusan yakni salah satunya ketika Mohammad Hatta lebih memilih mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 1 Desember 1956 (Ricklefs, 2005:502). Mohammad Hatta menanggalkan jabatan Presiden yang untuk sebagian orang jabatan wakil Presiden adalah sangat Prestisius karena menjadi salah satu pemimpin politik dalam suatu negara. Namun

hal tersebut tidak berpengaruh kepada Mohammad Hatta, ia lebih memilih mundur pada tanggal 1 Desember 1956. Hal ini juga menjadi akhir dari Dwitunggal Presiden Soekarno dan wakil Presiden Mohammad Hatta yang terbentuk ketika mereka bersatu dan menghilangkan perbedaan demi mencapai cita-cita bersama dan memimpin bangsa ke gerbang kemerdekaan. Namun sejak pengunduran tersebut Mohammad Hatta lebih memilih menjadi warga biasa lebih memilih mundur dan membaaur dengan rakyat sambil mengintip jendela perpolitikan pemerintahan negara dengan lebih berperan di luar ranah pemerintahan.

Dari uraian-uraian di atas, dapat diketahui hal-hal yang menjadi alasan pertimbangan kepada penulis mengapa penelitian ini dilakukan. Menarik sekali untuk dikaji lebih mendalam, bagaimana wujud-wujud perilaku politik dan faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku politik Mohammad Hatta dari ia pertama kali menjadi wakil Presiden tahun 1945 hingga ia mengundurkan diri pada 1 Desember 1956. Oleh karena itu, untuk memahami lebih lanjut tentang perilaku politik Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden, maka penulis memilih permasalahan tersebut yang kemudian dirumuskan dengan judul **“Perilaku Politik Wakil Presiden Mohammad Hatta tahun 1945-1956”**.

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Penegasan pengertian judul dimaksudkan untuk menghindari adanya persepsi yang berbeda dalam penelitian ini, harapan penulis dengan adanya keseragaman persepsi akan membantu memahami penelitian ini yang berjudul *“Perilaku Politik Wakil Presiden Mohammad Hatta tahun 1945-1956”*.

Mohammad Hatta adalah wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, adalah sosok pemimpin yang berwatak jujur dan disiplin, Muslim yang saleh, negarawan yang demokrat, dan ekonom yang berideologi kerakyatan. Kepribadiannya terbentuk dari lingkungan serta pengalaman hidupnya sedari kecil serta dimatangkan oleh ilmu pengetahuan yang diperolehnya (Alfarizi, 2012:11).

Sedangkan pengertian “perilaku politik” adalah pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Surbakti, 1992:131), sedangkan menurut

Sastroadmojo, perilaku politik adalah tindakan manusia dalam situasi politik (1995:57). Dari pendapat tersebut, dapat kiranya di simpulkan bahwa, perilaku politik adalah pembuatan dan pelaksanaan keputusan individu dalam bidang politik. Tetapi dari pengertian teori tentang “perilaku politik” ini, agaknya hampir memiliki suatu definisi yang sama dengan istilah “partisipasi politik”, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ramlan Surbakti (1992:141) bahwa “partisipasi politik merupakan perilaku politik, tetapi perilaku politik tidak selalu berupa partisipasi politik”.

Oleh karena itu, untuk menghilangkan perbedaan persepsi dari kedua teori tersebut yang hampir memiliki suatu pengertian yang sama, perlu diuraikan disini perbedaan yang mendasar dari teori tersebut. Perbedaan yang mendasar antara perilaku politik dengan partisipasi politik ialah bahwa “perilaku politik merupakan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik oleh individu beserta lembaga pemerintahan (*public policy*)”. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat seluruhnya, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. “Keikutsertaan” warga masyarakat dalam proses menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupan suatu masyarakat dan suatu negara ini adalah yang disebut sebagai “partisipasi politik” (Surbakti, 1992:140-141).

Dipertegas oleh Budiardjo (1982:1) bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Dari uraian tersebut kiranya dapat diketahui perbedaan yang jelas antara “partisipasi politik” dengan “perilaku politik”. Perilaku politik yang terwujudkan dalam keputusan-keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah dalam suatu negara dikatakan sebagai *public policy* (kebijakan publik) (Anderson, dalam Hamdi, 2014:36-37). Sehingga wajar, keputusan politik dari tiap-tiap negara sangatlah berbeda dari negara satu dengan negara lainnya, karena proses pembuatan keputusan politik ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku politik.

Smith (1968:25) menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu, faktor tersebut adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu agama, pendidikan, keluarga dan kelompok pergaulan, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku politik adalah seperti sistem politik, sistem ekonomi, keadaan geografi, sistem budaya, media massa, suasana kelompok dan ancaman dengan segala bentuknya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dalam konteks penelitian ini yang dimaksud penulis dengan judul "*Perilaku Politik Wakil Presiden Mohammad Hatta tahun 1945-1956*" adalah pengambilan keputusan politik wakil Presiden Mohammad Hatta yang dipengaruhi oleh berbagai dimensi faktor internal dan eksternal selama ia menjadi wakil Presiden Republik Indonesia dari tahun 1945-1956.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan ruang lingkup di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang kondisi lingkungan sosial, budaya, pendidikan dan politik Mohammad Hatta?
2. Bagaimana wujud perilaku politik Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden Republik Indonesia?

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari fokus permasalahan yang dikaji, maka penulis merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup masalah yang ada baik dalam aspek materi, waktu (temporal), dan tempat (spasial). Penulis membatasi ruang lingkup materi ini pada kajian sejarah intelektual yang fokusnya meliputi latar belakang ideologi apa saja yang mempengaruhi perilaku politik Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden Republik Indonesia.

Ruang lingkup waktu (temporal) dalam penelitian ini adalah dimulai pada tahun 1945 sampai tahun 1956. Tahun 1945 adalah Mohammad Hatta menjadi wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama kali, awal kali pemerintahan

Indonesia sebagai negara berdaulat dibentuk. Sedangkan tahun 1956 adalah berakhirnya pemerintahan Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden dengan mundurnya ia menjadi wakil presiden tertanggal 1 Desember 1956 yang otomatis Mohammad Hatta tidak mempunyai kekuasaan politik di kancah pemerintahan Indonesia. Dalam hal menentukan ruang lingkup ini tidaklah mutlak namun bersifat fleksibel, karena tidak menutup kemungkinan penulis di dalam pembahasannya akan menyinggung peristiwa yang terjadi sesudah tahun 1956 ataupun sebelum tahun 1945.

Ruang lingkup tempat (spasial) dalam penelitian ini memfokuskan peristiwa yang terjadi di Indonesia dan tempat tempat yang menyangkut tokoh Mohammad Hatta berada. Sedangkan ruang lingkup materi yaitu mengenai perilaku politik Mohammad Hatta ketika menjabat sebagai wakil Presiden Republik Indonesia dari tahun 1945 sampai tahun 1956.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Memahami latar belakang kondisi lingkungan sosial, budaya, pendidikan dan politik Mohammad Hatta;
2. Memahami wujud perilaku politik Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden Republik Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Penulis, sebagai sarana latihan dalam melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah, latihan berfikir dan memecahkan masalah secara kritis dan logis memperdalam pengetahuan tentang perilaku politik Mohammad Hatta selama menjabat sebagai wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Bagi mahasiswa dan calon guru sejarah, dapat menambah penguasaan materi Sejarah Politik;

3. Bagi ilmu pengetahuan, dapat menambah perbendaharaan khasanah ilmiah tentang perilaku politik Mohammad Hatta selama menjabat sebagai wakil Presiden Republik Indonesia serta pengembangan ilmu Sejarah di Indonesia umumnya;
4. Bagi Almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka mengemukakan tentang kajian penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni “*Perilaku politik wakil Presiden Mohamad Hatta tahun 1945-1956*”. Penelitian terdahulu tersebut berupa jurnal, skripsi, tesis ataupun penelitian yang lain. Disamping itu akan dikemukakan juga pendekatan maupun teori-teori dari para ahli dari penelitian terdahulu.

Permasalahan mengenai “perubahan sistem pemerintahan negara RI pada masa awal kemerdekaan” merupakan pokok penelitian yang dilakukan oleh Kayan Swastika (2004). Penelitian tersebut memberikan suatu analisis dan interpretasi dalam melihat transformasi sistem pemerintahan RI di awal kemerdekaan yang tidak lepas dari faktor konflik Soekarno dengan Sjahrir yang sungguh-sungguh memainkan peranan sangat urgen dan krusial dalam fenomena perubahan dari sistem pemerintahan Presidensial menjadi sistem parlementer. Meskipun akar-akar konflik Soekarno-Sjahrir terjadi sejak zaman pergerakan nasional di tahun 1930-an, namun momentum konflik yang akhirnya mengarah kepada perubahan bentuk sistem negara RI dikatakan berawal dari bulan Agustus 1945.

Dimulai ketika gagasan “sosio-demokrasi” Soekarno, khususnya yang terkait dengan ide tentang “*democratie centralism*” yang tampak nyata berhasil mewarnai sistem politik dan sistem kepartaian negara RI yang termaktub di dalam UUD 1945, yaitu dengan diberlakukannya sistem pemerintahan presidensial yang bersifat sentralistik dan ide pendirian partai pelopor dengan dibentuknya “PNI-*Staatpartij*” pada tanggal 21-22 Agustus 1945. Keberhasilan gagasan-gagasan Soekarno ini yang mempengaruhi preferensi sistem pemerintahan RI di awal kemerdekaan, mendorong Sjahrir, yang sudah semenjak masa pergerakan dahulu berseberangan dalam hal gagasan dengan Soekarno, tampil ke medan konflik.

Sjahrir, tidak saja ingin mematikan pengaruh-warna gagasan Soekarno, tetapi juga berusaha menggantikannya dengan pengaruh gagasan “demokrasi liberal” yakni dengan usaha resistensinya menggagalkan upaya lanjutan pembentukan PNI-*Staatpartij* dan merubah sistem presidensial menjadi sistem

parlementer dengan langkah melalui BPKNIP yang diusahakan menjadi parlemen yang disetujui oleh wakil Presiden Mohammad Hatta. Pada tanggal 14 Nopember 1945, bentuk sistem pemerintahan negara RI secara resmi berubah dari sistem Presidensial menjadi Parlementer dengan ditandai jatuhnya kabinet Presidensial Soekarno dan, koinsidensi lahirnya kabinet parlementer baru di bawah Perdana Menteri Sjahrir. Esensi-tujuan perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI di awal masa kemerdekaan ini adalah lebih sebagai “pengambilalihan kekuasaan (politik), oleh Sjahrir terhadap Soekarno, dan bukannya tujuan-tujuan yang lain.

Penelitian tersebut fokus kepada konflik antara Soekarno dan Sjahrir dalam fenomena perubahan sistem pemerintahan di awal kemerdekaan tersebut. Kayan Swastika menegaskan bahwa sekurang-kurangnya, ada satu kekurangan dalam penelitiannya tersebut yang tidak terselesaikan yaitu persoalan yang menyangkut perilaku politik Mohammad Hatta dalam peristiwa transformasi tersebut. Dari dokumen-dokumen yang ada, serta hasil analisis dan interpretasi terhadap dokumen itu, diketahui sangat besar peranan dari Mohammad Hatta sebagai pembuka jalan diberlakukannya sistem pemerintahan Parlementer di Indonesia pada 14 Nopember 1945. Oleh karenanya, penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian dan memfokuskan kajiannya dalam konteks “perilaku politik Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden dari tahun 1945-1956”, yang turut pula membahas terkait peranan Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden dalam fenomena perubahan sistem pemerintahan yang terjadi di awal kemerdekaan tersebut.

Aman (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemikiran Mohammad Hatta tentang Demokrasi, Kebangsaan, dan Hak Asasi Manusia”, menjelaskan pemikiran Mohammad Hatta tentang demokrasi, kebangsaan dan hak asasi manusia. Tentang demokrasi, Mohammad Hatta percaya bahwa demokrasi adalah sistem politik yang cocok untuk Indonesia kedepannya. Implikasi pemikiran-pemikiran Mohammad Hatta tentang Demokrasi diperlihatkan sejak zaman pergerakan nasional yang menuntut untuk Indonesia merdeka dari penjajahan, dan juga, dalam perilaku politiknya ketika Mohammad Hatta menjadi wakil Presiden untuk menegakkan tentang Demokrasi.

Mohammad Hatta mengatakan bahwa ada tiga sumber pokok demokrasi yang megakar pada bangsa Indonesia yang pertama yaitu sosialisme barat yang membela prinsip prinsip humanisme, kedua adalah ajaran agama islam yang memerintahkan kebenaran dan keadilan tuhan pada masyarakat, dan yang ketiga yaitu pola hidup dalam bentuk kolektivisme sebagaimana terdapat dalam kehidupan di desa-desa di wilayah Indonesia. Pandangan Mohammad Hatta tentang kebangsaan ditentukan oleh keinsafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu. Menurut Mohammad Hatta, ada tiga macam rasa kebangsaan yakni kebangsaan cap ningrat, kebangsaan cap intelek, dan kebangsaan cap rakyat, Mohammad Hatta sendiri tidak sesuai dengan kebangsaan cap ningrat dan kebangsaan cap intelek.

Karena paham keduanya adalah memandang rendah rakyat, kebangsaan yang dicita citakannya adalah kebangsaan cap rakyat. Perjuangan Mohammad Hatta sangat gigih dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), kegigihannya dalam memperjuangkan HAM itu dituangkan oleh Mohammad Hatta dalam pasal 28 UUD 1945. Penelitian ini menjelaskan bahwa Mohammad Hatta adalah seorang negarawan yang selalu mementingkan kepentingan rakyat. Rakyatlah yang menjadi tujuan utama dari perjuangannya. Jika berpegangan pada prinsip kedaulatan rakyat maka pemikiran-pemikiran Mohammad Hatta selalu tetuju kepada kepentingan rakyat.

Senada pada penelitian oleh Aman, Feri Priyanto (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemikiran Mohammad Hatta tentang Demokrasi Indonesia pada tahun 1928-1960” memfokuskan penelitiannya pada sosok Mohammad Hatta sebagai penggagas Demokrasi Indonesia. Konsep demokrasi dari Mohammad Hatta berbeda dengan demokrasi barat yang dikiritiknya karena melahirkan kekuasaan kapitalisme.

Mohammad Hatta mengharapkan bukan hanya demokrasi di bidang politik saja, tetapi di bidang ekonomi harus diperhatikan. Hasil penelitian yang dilakukan adalah kondisi lingkungan sosial, budaya, ekonomi, politik dan pendidikan yang turut membentuk pola fikir Mohammad Hatta. Budaya Minangkabau menjadi sumber utama untuk memahami pemikiran Mohammad Hatta tentang demokrasi

Indonesia, cermin kehidupan desa seperti budaya musyawarah, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkirkan diri dari kekuasaan.

Bentuk pemikiran Mohammad Hatta tentang demokrasi Indonesia seperti pandangannya terhadap demokrasi barat yang melenceng dari prinsip-prinsip kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan yang terdapat dalam semboyan revolusi Prancis yang menjadi kritik Mohammad Hatta. Demokrasi barat hanya memberikan kedaulatan rakyat di bidang politik saja, tetapi tidak dalam demokrasi di bidang ekonomi dan sosial. Wujud dari demokrasi ekonomi Mohammad Hatta yakni Koperasi. Melalui koperasi Mohammad Hatta ingin memupuk rasa tanggung jawab rakyat dengan asas gotong royong serta asas-asas ekonomi pasar yang rasional dan kompetitif.

Wujud dari bentuk-bentuk pemikiran Mohammad Hatta tercermin dari perilaku politiknya sebagai wakil Presiden dan perdana Menteri. Mohammad Hatta menganggap bahwa Pemerintahan Parlementer adalah bentuk dari kedaulatan rakyat. Sumber-sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial menurut analisa Mohammad Hatta ada tiga pokok yaitu paham sosialisme barat yang menjunjung tinggi perikemanusiaan, ajaran Islam, dan kolektivisme masyarakat Indonesia.

Arfiani (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Kebijakan Politik Mohammad Hatta Tahun 1948-1950, penelitian ini menjelaskan mengenai perilaku politik Mohammad Hatta sebagai perdana Menteri Indonesia pada tahun 1948-1950. Dalam menentukan keputusan politiknya, Mohammad Hatta memperhatikan kondisi Intern dan Ekstern Indonesia, sehingga kebijakan politik Mohammad Hatta merupakan usaha untuk memperkuat Indonesia baik ke dalam maupun ke luar dalam pentas Internasional. Dari penelitian ini kita ketahui bersama bahwa kebijakan ini terlihat dari 3 masalah penting yang dikeluarkan oleh Mohammad Hatta yaitu diplomasi dengan pihak Belanda, mengadakan rasionalisasi di bidang militer, dan pembangunan. Jurnal ini memfokuskan perilaku politik Mohammad Hatta dari tahun 1948 sampai 1950.

Yuliawan (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemikiran Mohammad Hatta dalam Pembangunan Sistem Perekonomian Indonesia tahun 1921-1956”. Fokus kajian dalam penelitian ini tentang wujud dari pemikiran Mohammad Hatta mengenai sistem perekonomian Indonesia. Pemikiran tentang perekonomian yang digagas oleh Mohammad Hatta dalam penelitian ini tidak lepas dari ajaran Islam sebagaimana agama yang dianutnya yang terdapat dalam pasal 33 UUD 1945. Seperti yang kita ketahui gagasan Mohammad Hatta dalam pasal 33 UUD 1945 wujudnya berupa koperasi.

Koperasi menurut Mohammad Hatta merupakan jalan keluar dari masalah perekonomian yang asas utamanya berdasarkan kekeluargaan yang sudah terwujud pada sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Fokus kajian dalam penelitian ini mengkhususkan pada pemikiran Mohammad Hatta mengenai pembangunan perekonomian Indonesia yang tercermin dari perilaku politiknya di bidang ekonomi berupa keputusan-keputusan politik dalam pembangunan ekonomi selama ia menjadi wakil Presiden dan perdana Menteri sampai tahun 1956.

Herlina Setiyarini (2014) Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Koperasi Tahun 1925-1953. Penelitian ini mengulas Mohammad Hatta sebagai seorang intelektual di bidang ekonomi, yang mencurahkan idenya untuk kemajuan bangsa salah satunya dengan koperasi. Pendirian koperasi tidak terlepas dari kondisi masyarakat Indonesia yang memprihatinkan akibat penjajahan terutama kondisi ekonomi. Rakyat banyak yang terjebak hutang oleh lintah dara dengan bunga yang tinggi. Koperasi mempunyai persamaan dengan sistem sosial asli yang berakar dari adat istiadat bangsa Indonesia, yakni kolektivisme. Masyarakat gotong-royong Indonesia gemar tolong menolong, sementara koperasi juga menganut prinsip tolong-menolong. Mohammad Hatta yang berlatar belakang dari keluarga berdagang, membuat Hatta menekuni bidang ekonomi.

Hatta meneruskan gerakan koperasi yang sebelumnya sudah pernah diadakan, pemikiran didorong oleh kondisi rakyat Indonesia yang memprihatinkan, tekanan penjajah membuat rakyat menderita terutama masalah ekonomi. Sejak belajar di negeri Belanda hingga menjadi anggota Perhimpunan

Indonesia, Hatta terjun langsung mempelajari koperasi di negara-negara Eropa yang mampu meningkatkan perekonomian rakyat. Ide Mohammad Hatta diterapkan di Indonesia, dengan didasarkan pada adat istiadat bangsa Indonesia yaitu gotong royong, ide Hatta juga tertuang dalam pasal 33 UUD 1945. Hatta bertindak aktif dalam usaha mengembangkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia bahkan Hatta terjun langsung mengawasi gerakan koperasi, hingga Hatta ditetapkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Penelitian ini memfokuskan pada pemikiran Mohammad Hatta di bidang koperasi dan juga latar belakang keadaan sosial yang membentuk kepribadian Mohammad Hatta serta implementasi pemikirannya di bidang koperasi dan realisasinya dalam perekonomian di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Yudiyanto (2016) yang berjudul “Pandangan Nasionalisme Mohammad Hatta di Indonesia tahun 1942-1956” bertujuan untuk mengetahui latar belakang kehidupan Mohammad Hatta dan upaya membangun nasionalisme yang berdasar pada kedaulatan rakyat dan perekonomian Indonesia serta hubungan perekonomian kerakyatan, dengan pembangunan di Indonesia pada bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya dalam scop temporal di mulai penjajahan Jepang hingga ia mengundurkan diri sebagai wakil Presiden di tahun 1956. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Mohammad Hatta merupakan seorang tokoh pergerakan nasional Indonesia yang memiliki wawasan luas dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Nasionalisme Mohammad Hatta yang bertumpu pada konsep kedaulatan rakyat mempunyai arti, bahwa kekuasaan tertinggi berda ditangan rakyat, dan dilaksanakan yang di kontrol oleh dewan yang dipilih oleh rakyat, demi kepentingan rakyat.

Konsep kedaulatan rakyat memiliki pokok-pokok demokrasi dibidang politik dan bidang ekonomi. Aktualisasi pandangan nasionalisme Mohammad Hatta tertuang dalam pasal-pasal UUD 1945 dan sila-sila Pancasila, yang memuat ketentuan-ketentuan nilai ketuhanan sebagai landasan moral bagi Indonesia. Nilai kemanusiaan, nasionalisme dari berbagai aliran, cita-cita kefilsafatan politik dan keadilan sosial untuk kesejahteraan rakyat. Penelitian ini memfokuskan kepada pandangan Mohammad Hatta tentang nasionalisme

Permana (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Mohammad Hatta tahun 1945 – 1956” menjelaskan tentang gaya kepemimpinan Mohammad Hatta yang muncul didalam dirinya terlihat dari sifat sifat yang dimilikinya. Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Mohammad Hatta tergolong dalam tipe kepemimpinan yang rasional, yaitu pemimpin yang diangkat karena kemampuan individu yang menyebabkan ia dapat diterima secara rasional karena sifat kepribadiannya yang jujur, cerdas, disiplin, dan sifat sifat terpuji lainnya. Penelitian ini juga memfokuskan kajiannya mengenai nilai nilai keteladanan yang ada dalam diri Mohammad Hatta diantaranya adalah sikap cinta tanah air, sikap demokratis dan moralitas yang luhur. Sikap ini diperlihatkan ketika Mohammad Hatta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, selain itu penelitian ini membandingkan bagaimana gaya kepemimpinan Mohammad Hatta yang tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan bangsa dengan para pemimpin sekarang yang notabene tindakannya ahanya merugikan bangsa Indonesia dengan salah satunya melalui praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Wahyu Hari (2014) yang berjudul “Kebijakan Rasionalisasi Militer pada Masa Pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Hatta tahun 1948-1950”. Penelitian ini memfokuskan kepada perilaku politik Mohammad Hatta dalam mngeluarkan keputusan tentang rasionalisasi militer ketika menjabat sebagai perdana Menteri. Awal tahun 1948 Indonesia mengalami krisis ekonomi, ini disebabkan oleh Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali. Pabrik-Pabrik, perusahaan dagang dan perkebunan perlahan lahan dapat dikuasai oleh Belanda. Berbagai usaha oleh pemerintah untuk mengatasi kondisi krisis tersebut, salah satunya dengan menjalankan program rasionalisasi di bidang Militer.

Rasionalisasi militer ini dibuat oleh Mohammad Hatta untuk mengurangi pengeluaran kas negara yang cukup besar dan juga dirasa bahwa kondisi militer Indonesia pada masa awal kemerdekaan kurag efektif dan belum bisa dikatakan sebagai tentara yang profesional. Tujuan rasionalisasi ini adalah untuk perbaikan susunan negara dan alat negara, khususnya organisasi militer Indonesia agar terbentuk suatu negara yang profesional dengan cara mengurangi jumlah anggota tentara dan mencapai perimbangan antara pendapatan dan belanja negara.

Penelitian ini hanya memfokuskan membahas tentang kebijakan politik Mohammad Hatta tentang rasionalisasi militer dari tahun 1948 sampai 1950.

Dari beberapa penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas, kita dapat menarik kesimpulan, bahwa Mohammad Hatta selama menjadi wakil presiden telah banyak mengeluarkan banyak keputusan politik yang mana pada saat itu Indonesia mengalami tekanan dari pihak Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia namun tetap gigih mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sosok Mohammad Hatta adalah figur seorang pemimpin yang selalu memperlihatkan sikap teladan yang baik ketika menjabat sebagai wakil Presiden maupun setelah mengundurkan diri. Pemikiran-pemikiran Mohammad Hatta banyak berpengaruh pada perkembangan bangsa Indonesia baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan militer yang ia realisasikan dalam bentuk keputusan politik, sikap, maupun kritik.

Berdasarkan uraian penelitian-penelitian yang telah dipaparkan diatas, penelitian-penelitian terdahulu tersebut lebih banyak memfokuskan kepada pemikiran Mohammad Hatta di bidang Demokrasi beserta upaya-upayanya dalam menegakkan demokrasi yang dapat dilihat dari perilaku politik Mohammad Hatta baik menjadi wakil Presiden konstitusional dan sebagai perdana Menteri. Juga, gaya kepemimpinan Mohammad Hatta, serta peran dan perjuangan Mohammad Hatta yang fokus pada satu objek penelitian seperti peran di bidang ekonomi, maupun peran dalam rasionalisasi militer. Paparan penelitian di atas, ternyata masih ada celah-celah yang belum diteliti yakni yang fokus membahas tentang perilaku Politik Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden secara komprehensif. Posisi penelitian ini lebih menitikberatkan kepada masalah perilaku politik Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden dari tahun 1945 sampai 1956. Penelitian ini sendiri menjadi pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini bisa dikembangkan oleh penulis lain untuk menyempurnakan kajian materi dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu yang masih belum menyinggung tentang perilaku politik Mohammad Hatta dari ia pertama menjadi wakil Presiden hingga ia mengundurkan diri dari jabatan wakil Presiden.

Penulisan skripsi ini membutuhkan pendekatan untuk menganalisis permasalahan terkait dengan perilaku politik Mohammad Hatta selama menjadi wakil Presiden Indonesia dengan tujuan untuk mempermudah dalam penulisan sejarah. Mengenai suatu peristiwa sejarah sangat tergantung pada pendekatan, ialah dari segi mana kita memandangnya, dimensi yang diperhatikan, unsur-unsur yang diungkapkan. Hasil pelukisan akan ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipakai (Kartodirdjo, 1992:4).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Politikologi. Menurut pendapat Kartodirdjo (1992:4) pendekatan politikologi merupakan pendekatan yang menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan dan lain sebagainya. Pendapat tentang politikologi tersebut dipertegas lagi oleh Hoogerwerf (1985:8-12), Politikologi atau ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Bidang bidang bagian terpenting (*subfields*) yang dikaji dari politikologi yakni antara lain sistem dan perkembangan politik suatu negara, tata pemerintahan, hubungan-hubungan internasional dan kebijakan-kebijakan pemerintah dan lain-lain. Pendekatan politikologi dalam penelitian ini digunakan sebagai sudut pandang penulis untuk melihat atau menyoroti keputusan-keputusan politik pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya keputusan politik yang dikeluarkan oleh Mohammad Hatta, pertentangan kekuasaan, bentuk pemerintahan, serta pergolakan politik Indonesia pada saat Mohammad Hatta menjabat sebagai wakil Presiden Indonesia.

Sedangkan, untuk memperdalam kajian dari pendekatan yang telah disebutkan, penulis menggunakan teori dalam penelitian ini. Teori yang digunakan oleh penulis adalah teori aksi (*action theory*) yang dikemukakan oleh Talcot Parson. Talcot Parson menjelaskan bahwa teori aksi ini memang tidak bisa menerangkan atau menjelaskan secara keseluruhan keseluruhan aspek kehidupan sosial. Asumsi dasar teori aksi ini adalah bahwa tindakan manusia muncul dari kesadaran sendiri sebagai subjek dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai

objek. Sebagai objek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena dari itu, Parson membangun konstruksi teori aksi ini didasarkan dari beberapa premis, yakni:

1. Adanya individu sebagai aktor;
2. Aktor dipandang sebagai pemburu dari tujuan-tujuan tertentu;
3. Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta tehnik untuk mencapai tujuannya;
4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu, misalnya jenis kelamin dan tradisi;
5. Aktor berada di bawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan, salah satunya kendala kebudayaan (Ritzer, 2014:48-49).

Dari premis-premis tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori aksi ini melihat bahwa individu sebagai pemburu dari tujuan-tujuan tertentu sehingga individu tersebut mempunyai alternatif cara, alat serta tehnik untuk mencapai tujuannya tersebut, meskipun individu akan berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional dan di bawah kendali dari nilai-nilai dan norma yang ada. Tetapi, kedudukan norma-norma itu tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat, tetapi ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih. Teori aksi dari Tacot Parson ini digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis untuk melihat sosok Mohammad Hatta dalam perilaku politiknya adalah sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan alternatif cara, alat serta tehnik untuk mencapai tujuannya. Hal ini dalam bentuk keputusan politik yang didasari dengan ide-ide atau pemikiran Mohammad Hatta tentang kebangsaan dengan tujuan kebaikan bersama dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai wakil Presiden.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Prosedur Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian sejarah karena objek-objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah peristiwa sejarah sehingga metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Sebelum menguraikan langkah langkah dalam penelitian sejarah, terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah menurut Louis Gottschalk adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan rekonstruksi yang imajinatif (2015:39). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa metode penelitian sejarah adalah sarana atau alat bantu yang digunakan sejarawan dalam suatu prosedur kerja untuk menguji dan menganalisis secara kritis bahan bahan atau jejak jejak yang ditinggalkan di masa lampau. Metode penelitian sejarah berupa aturan yang sistematis untuk memberikan arah dalam penelitian sejarah. Adapun langkah langkah metode penelitian sejarah meliputi; (1) heuristik, (2) kritik, (3) interpretasi, (4) historiografi (Gottschalk, 2015:42)

Langkah pertama dalam penelitian sejarah adalah heuristik. Kuntowijoyo (1993:45) mengatakan bahwa langkah heuristik merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan atau jejak-jejak yang akan digunakan untuk penulisan sejarah atau mencari sesuatu yang digunakan untuk menceritakan kembali peristiwa sejarah. Sedangkan sumber sejarah menurut Louis Gottschalk adalah sesuatu yang digunakan sebagai sumber dalam penulisan atau penceritaan kembali masa lampau (1975:45). Langkah kedua dalam penelitian sejarah adalah kritik. Kritik adalah menyeleksi atau menilai sumber sumber atau data data sejarah menjadi fakta sejarah / historical fact (Nugroho Notosusanto, 1971:17). Kritik sumber dilakukan setelah penulis berhasil mengumpulkan sumber yang selanjutnya akan dikritik untuk memperoleh keabsahan sumber yang digunakan. Kritik sejarah dapat dibedakan menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Dalam hal ini, dilakukan uji keabsahan tentang keaslian sumber yang dilakukan

melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern (Abdurrahman, 2007:68).

Kegiatan selanjutnya agar fakta-fakta sejarah yang didapat memiliki makna, maka langkah yang dilakukan penulis adalah melakukan interpretasi. Menurut Kuntowijoyo (1995:100-101) Interpretasi sejarah sering juga disebut sebagai analisis sejarah. Dalam hal ini, ada dua metode yang digunakan, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti berarti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menyatukan. Fakta yang sudah terhimpun dirangkai dan dihubungkan menjadi suatu bentuk yang logi, rasional dan objektif dan kausalitas sehingga dapat membentuk fakta yang rasional dan faktual berdasarkan pada aspek pembahasan. Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah Historiografi. Historiografi menurut Gottschlak (1983: 33) adalah yang dilakukan oleh penulis adalah menyusun dan menulis cerita sejarah dengan cara merangkai fakta-fakta sejarah dari hasil heuristik, kritik dan interpretasi. tahap ini, peneliti melakukan penulisan secara kronologis, logis, dan sistematis dengan cara merangkai fakta-fakta sejarah sebagai hasil penafsiran atas fakta-fakta sejarah sebagai hasil penafsiran atas fakta-fakta tersebut sehingga terjadi suatu kisah sejarah ilmiah.

3.2 Sumber Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian sejarah, jadi dalam penelitian ini penulis mencari sumber tertulis dari buku buku, dokumen, artikel dan lain sebagainya. Bagi setiap studi sejarah masalah sumber penelitian merupakan masalah yang pokok. Maka terkait dengan penelitian ini, penulis mengawali langkah awalnya dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber penelitian yang berhubungan dengan perilaku politik Mohammad Hatta selama menjabat sebagai wakil Presiden Republik Indonesia. Kegiatan dalam mencari sumber, penulis melakukan penelusuran di beberapa perpustakaan, seperti perpustakaan Universitas Jember, perpustakaan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, ruang referensi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember, selain melakukan pengumpulan dari perpustakaan, penulis juga banyak memperoleh referensi dari toko buku dan mengandalkan pula koleksi pribadi.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti, maka penulis berhasil menemukan beberapa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang ditemukan diantaranya “Untuk Negeriku” dari jilid 1 sampai 3 yang buku ini merupakan autobiografi Mohammad Hatta yang ditulis sendiri oleh orang yang mengalami peristiwa atau terlibat secara langsung sebagai pengambil keputusan-keputusan politik sebagai wakil Presiden pertama Indonesia. Sumber ini memberi keterangan-keterangan penting tentang Mohammad Hatta sejak ia dilahirkan di Minangkabau, pendidikannya di Eropa dan perjuangannya melawan penjajah kolonial Belanda hingga Jepang dan sampai Indonesia menuju gerbang kemerdekaan, selain itu juga kegiatan-kegiatan politik Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden. Namun dalam Autbiografi ini, Mohammad Hatta membatasi keterangan-keterangannya hingga sampai penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949.

Untuk melengkapi data kronologi-kronologi dalam rekonstruksi penelitian ini, diperlukan sumber-sumber primer lain, yakni penulis menemukan buku Mohammad Hatta yang berjudul “Bung Hatta’s Answer”. Buku ini adalah wawancara langsung Mohammad Hatta dengan Zainul Yasni yang memberikan keterangan-keterangan tentang dwitunggal Soekarno-Hatta hingga retaknya dwitunggal tersebut dengan mundurnya Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden dan pula catatan penting lainnya. Selain itu buku “Kumpulan Karangan Mohammad Hatta” yang terbit tahun 1953 yang merupakan kumpulan karangan-karangan yang diterbitkan dalam *Daulat Ra’jat* yakni saat Mohammad Hatta di dalam PNI Baru pada zaman pergerakan nasional dan buku “Demokrasi Kita” yang merupakan kritik-kritik Mohammad Hatta terhadap sistem demokrasi terpimpin yang diterapkan oleh Soekarno.

Selain sumber primer, beberapa sumber sekunder yang ditemukan penulis yakni diantaranya karya Deliar Noer dengan judul “Mohammad Hatta Biografi Politik” dan “Mohammad Hatta Hati Nurani Bangsa”, buku “Hatta si bung Jujur dan Sederhana” karya Adhe Firmansyah, buku “Mohammad Hatta Biografi Singkat 1902-1980” karya Salman Alfarizi dan buku yang disunting oleh anak sulung Mohammad Hatta sendiri, Meutia Farida Swasono yang berjudul “Bung

Hatta Pribadinya dalam Kenangan”, buku “Demokrasi Untuk Indonesia” karya Zulfikri Suleman, buku “Mohammad Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat” karya Sri Edi Swasono dan beberapa sumber-sumber pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam rekonstruksi penelitian ini. Semua sumber yang dipaparkan diatas digunakan oleh penulis sebagai bahan rujukan dalam penulisan karya ilmiah ini.

Sistematika penulisan skripsi tersusun dalam 6 bab. Bab 1 terdapat pendahuluan yang berisi latar belakang alasan peneliti dalam memilih judul “Perilaku Politik Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 1945-1956, penegasan pengertian judul, ruang lingkup permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab 2 adalah tinjauan pustaka yang berisi pendapat dari berbagai sumber dan penelitian penelitian terdahulu yang terkait mengenai Perilaku Politik Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 1945 - 1956, dan pendekatan maupun teori yang relevan yang digunakan dalam penelitian ini. Bab 3 berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis yakni metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Deskripsi hasil penelitian akan diuraikan dalam bab 4 yakni berisi pembahasan tentang wujud perilaku politik Mohammad Hatta selama menjabat wakil Presiden Republik Indonesia. Bab 5 membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik wakil Presiden Mohammad Hatta. Bab 6 berisi mengenai kesimpulan dan hasil penelitian serta saran yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB 5. WUJUD PERILAKU POLITIK WAKIL PRESIDEN MOHAMMAD HATTA

Pada bab ini akan dibahas mengenai wujud-wujud perilaku politik Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, tugas seorang wakil Presiden adalah sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, namun tidak dijelaskan dalam Undang Undang Dasar sejauh mana perbantuan wakil Presiden terhadap Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Mohammad Hatta, selama menjadi wakil Presiden Indonesia, banyak sekali mengeluarkan keputusan-keputusan politik dan keputusan-keputusan tersebut khususnya pada saat revolusi kemerdekaan bertujuan demi mempertahankan kelangsungan negara Indonesia yang baru merdeka dari penjajah kolonial Belanda yang ingin berkuasa kembali. Tetapi penulis disini tidak mengkaji secara keseluruhan semua perilaku politik Mohammad Hatta selama ia menjabat sebagai wakil Presiden, dan mengecualikan ketika ia menjabat sebagai Perdana Menteri dalam kurun waktu dari tahun 1948-1950.

Penulis dalam penelitian ini meneliti tentang perilaku politik wakil Presiden Mohammad Hatta yang masih konteksnya dianggap kontroversial dan *debatable* karena beberapa kalangan mempunyai pendapat atau perspektif sendiri yang berbeda dan terjadi silang pendapat terkait perilaku politik tersebut. Urgensi untuk membahas perilaku politik Mohammad Hatta tersebut yang masih dianggap *debatable* adalah untuk mencari titik terang dan mengetahui secara ilmiah “apa” dan “bagaimana” yang melatar belakangi terjadinya perilaku politik sehingga suatu keputusan politik tersebut dikeluarkan oleh Mohammad Hatta dalam kedudukannya sebagai wakil Presiden. Sebab, dibalik perilaku politik Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden, dalam pengambilan keputusan dan penegakan keputusan dilatar belakangi atau dipengaruhi oleh berbagai dimensi yang dijadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan politiknya. Smith

(1968:25) menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu, faktor tersebut adalah faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yang mempengaruhi individu terhadap perilaku politiknya adalah yang membentuk kepribadian aktor politik tersebut yakni agama, pendidikan, keluarga dan kelompok pergaulan. Dari lingkungan sosial politik yang membentuk kepribadian individu, secara langsung individu mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai, norma dan ide-ide kehidupan bermasyarakat, bernegara dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku politik adalah seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, media massa, suasana kelompok dan ancaman dengan segala bentuknya.

Jadi, ada dua dimensi yang urgen atau penting yang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik. Faktor-faktor ini, saling berkaitan antara satu, dan dengan yang lainnya sebagai bahan pertimbangan seseorang yang terwujud dalam perilaku politiknya. Karena, perilaku politik elit suatu negara, dalam implikasinya akan menyangkut hajat kehidupan seluruh warga negaranya dan dinamika perjalanan kedepan suatu bangsa tersebut. Penulis mengklasifikasikan wujud-wujud perilaku politik wakil Presiden Mohammad Hatta dalam dua bagian *scop* temporal yakni masa revolusi kemerdekaan yang dimulai tahun 1945 samapai 1949, kemudian zaman demokrasi Liberal pada tahun 1950 hingga sampai Mohammad Hatta menanggalkan jabatannya sebagai wakil Presiden

5.1 Masa Revolusi Kemerdekaan Tahun 1945-1949

Memproklamasikan kemerdekaan adalah lebih mudah daripada mempertahankannya, apalagi buat pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru berdaulat dan merdeka pada bulan Agustus 1945 lebih banyak berdasarkan semangat dan kemauan untuk merdeka lepas dari penjajahan. Negeri yang begitu luas wilayahnya dan baru berdiri pada saat itu masih dalam keadaan tidak mempunyai pemerintahan yang satu padu secara administratif karena masih baru berdiri. Tetapi dalam hal semangat persatuan, rakyat Indonesia secara bulat

menyatakan merdeka dan bersatu mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terlihat dengan banyaknya rakyat yang sangat begitu antusias sekali mendukung revolusi kemerdekaan Indonesia waktu itu.

Hal ini dicerminkan dari beragamnya bentuk dukungan masyarakat terhadap jalannya revolusi Indonesia, yang salah satunya di perlihatkan oleh para pegawai-pegawai dan polisi yang sebelumnya bekerja untuk jawatan-jawatan pemerintah Jepang namun setelah Indonesia merdeka, pegawai-pegawai dan polisi itu menyatakan diri untuk menjadi pegawai dan polisi Indonesia (Pespongoro dan Notosusanto, 2008:166). Antusiasme masyarakat juga dapat dirasakan dalam rapat raksasa di Lapangan Ikada, Jakarta pada 19 September 1945.

Pada rapat raksasa di Ikada ini, secara tidak langsung memberikan kesempatan yang pertama kepada massa rakyat untuk turut mengambil bagian dalam revolusi kemerdekaan Indonesia (Anderson, 1988:146-147). Antusiasme-antusiasme dukungan masyarakat tersebut secara langsung memperlihatkan dukungan penuh masyarakat Indonesia terhadap jalannya revolusi kemerdekaan Indonesia yang baru merdeka dan berdaulat. Masa revolusi yang terjadi seperti di kebanyakan negara, lebih-lebih pada masa permulaanya, adalah waktu yang dinilai sulit. Maka, tidak mengherankan atau menjadi suatu keniscayaan pulalah jika setelah suatu bangsa memperoleh kemerdekaannya, perebutan hegemoni, pola-pola interaksi antara para elit politiknya mengalami suatu perubahan daripada sebelumnya, dan hal itupun terjadi tak tekecuali di negara Indonesia.

5.1.1 Transformator Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Dari Sistem Presidensial Menjadi Sistem Parlementer

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang yang menghasilkan beberapa keputusan yakni pengesahan UUD 1945, pemilihan Presiden dan wakil Presiden dan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (Subardjo, 1978:346). Dengan disahkannya UUD 1945 dan terpilihnya Soekarno dan Mohamad Hatta sebagai Presiden dan wakil Presiden pada tanggal 18 Agustus 1945, telah menandai bahwa bangsa Indonesia telah memiliki pedoman dasar mengenai tatanan kehidupan kenegaraan, baik secara de facto maupun de jure

(Lihat Gambar 4, lampiran E halaman 141). Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Indonesia menganut bentuk negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem pemerintahan Presidensial.

Sistem pemerintahan presidensial adalah konsep negara yang telah disetujui sebelumnya dalam rapat BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Sistem Presidensial ini merupakan preferensi bentuk negara yang tidak lain dan tidak bukan adalah suatu perwujudan atau manifestasi gagasan-gagasan dari Presiden Soekarno. Karena, jika dilihat dari gagasan-gagasan dasarnya, kiranya tidak jauh dari kenyataan yang sebenarnya, bahwa sistem presidensial tersebut merupakan perwujudan, atau setidaknya pengaruh, dari gagasan “sosio-demokrasi” Soekarno, khususnya ide Soekarno tentang *democratisch centralism*. Paralelisme keduanya dapat dilihat dari asumsi-asumsi dasarnya, yakni menolak demokrasi liberal (demokrasi barat) yang terjelma sebagai sistem parlementer (Swastika, 2004:107). Uraian tersebut berpendapat bahwa sistem presidensial merupakan perwujudan konsep negara yang diinginkan oleh Soekarno dengan bentuk penolakan terhadap demokrasi ala barat yang diwujudkan dalam bentuk sistem demokrasi Parlementer.

Tanggal 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melaksanakan sidang yang berhasil menetapkan pembentukan Komite Nasional dan pendirian Partai Nasional Indonesia (PNI) (Bahar, Eds, 1995:503 dan Subardjo, 1978:368). PNI ini didirikan sebagai satu-satunya wadah politik bagi rakyat dan dikatakan menjadi partai negara (*staatspartij*). Pendirian partai tunggal ini secara otomatis Indonesia menganut sistem partai tunggal (*one-party system*) yakni Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia (PNI) ini mempunyai tujuan yakni: 1) memperkuat persatuan bangsa dan Negara; 2) memperbesar rasa cinta, setia, dan bakti kepada Tanah Air; 3) mengikhtiarkan program ekonomi dan sosial; 4) membantu tercapainya keadilan sosial dan perikemanusiaan dengan jalan perdamaian Internasional (Bahar, (Eds), 1995:504 dan Subardjo, 1978:368).

Namun dalam perkembangan selanjutnya, pendirian suatu partai tunggal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena hal ini berlawanan dengan cita-

cita Mohammad Hatta tentang demokrasi. Mohammad Hatta beranggapan pendirian partai tunggal ini cenderung seperti negara fasis atau komunis dan hal ini di tentang oleh Mohammad Hatta (Noer, 1990:260-261). Preferensi konsep sistem pemerintahan yang di inginkan Soekarno tentang sistem Presidensial yang sudah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pendirian partai tunggal (*one-party system*) yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai *staatspartij* dalam kenyataan perjalanan kedepannya tidak berjalan lancar sesuai apa yang di inginkan oleh Presiden Soekarno.

Pasalnya, wakil Presiden Mohammad Hatta yang dikenal sebagai seorang yang berpendirian teguh terhadap prinsip prinsipnya, melakukan manuver politik dalam rangka untuk meujudkan gagasan-gagasannya tentang demokrasi parlementer dan preferensi bentuk negara serikat sebagai wujud ideal untuk diterapkan di negara Indonesia dan termasuk sistem multipartai yang sangat ditentang oleh Soekarno (Adam, 2003:230).

Seperti dikatakan oleh Feith (1988:xxxii) atmosfir politik pada masa revolusi kemerdekaan di Indonesia amat pekat sekali dengan konflik-konflik yang terjadi di antara para elite politiknya. Friksi gagasan maupun politik dari para elite di awal kemerdekaan terjadi lebih menonjol dan terbuka bahkan lebih keras dibandingkan yang terjadi pada masa-masa sebelum kemerdekaan. Manuver-manuver, intrik-intrik politik terjadi khususnya di bulan-bulan awal Indonesia baru merdeka yang berimplikasi kepada terjadinya transformasi sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan Presidensial menjadi sistem pemerintahan Parlementer.

Pada bulan-bulan awal kemerdekaan, Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden bersama Sjahrir sebagai ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengeluarkan keputusan-keputusan politik yang dinilai agak kontroversial karena bertentangan atau kontradiksi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai dewan penasihat konstitusi mempunyai tugas untuk membantu Presiden menginginkan agar diberikan status sebagai Parlemen dan pandangan ini didukung atau setidaknya disambut baik oleh Mohammad Hatta.

Apakah Mohammad Hatta atau Sjahrir yang menjadi kreator dalam usaha membentuk parlemen ini, apakah hal ini suatu kebetulan atau suatu kesengajaan?, namun dukungan Mohammad Hatta dalam pemberian hak Parlemen terhadap KNIP mempertegas atau setidaknya menunjukkan suatu hubungan antara Mohammad Hatta dan Sjahrir saling memiliki kesamaan orientasi politik karena mereka memiliki kesamaan atau keterkaitan secara ideologis dan didukung pula sama-sama berasal dari Minangkabau.

Tidak jauh dari hal itu pula, faktanya, antara Mohammad Hatta dan Sjahrir memang sudah memiliki hubungan yang erat sejak mereka masih berjuang bersama dalam Perhimpunan Indonesia di Belanda, dalam Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) baru, dan bahkan, di tempat pengasingan yang sama. Hal ini semakin memperkuat asumsi bahwa Mohammad Hatta dan Sjahrir saling memiliki kesamaan ideologi dan kepentingan politik, yakni sama-sama condong terhadap ideologi sosialis-demokrat, yang dalam hal gagasan-gagasan politiknya banyak diwarnai oleh gagasan demokrasi Liberal. Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden dengan Sjahrir sebagai ketua BPKNIP ingin membentuk sistem demokrasi Parlementer seperti halnya di negara-negara Eropa pada umumnya.

Diawali dengan sebuah petisi yang diajukan pada awal Oktober 1945 oleh anggota KNIP yang berjumlah 50 orang yang berisi permohonan agar KNIP diberi status yang sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (Kahin, 2013:220; Anderson, 1988:200; Giebels, 2001:396; lihat juga Poesponegoro dan Notosusanto, 2008:163). Petisi ini didasarkan atas penafsiran Sjahrir terhadap kata-kata *dengan bantuan* dalam pasal IV tentang aturan peralihan yang diartikan secara eksplisit untuk memberikan KNIP status Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai badan konstitusi tertinggi (Kahin, 2013:220).

Langkah Sjahrir dalam menafsirkan pasal IV ini agaknya dinilai suatu manuver politik untuk mewujudkan keinginannya untuk membentuk sistem pemerintahan parlementer, yang mana langkah ini adalah inskonstitusional. Sjahrir ingin menjadikan KNIP sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang seharusnya terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus melalui pemilihan umum dan posisi KNIP hanya sebagai pembantu Presiden.

Padahal, jika melihat pasal IV tentang aturan peralihan, “sebelum MPR dan DPR terbentuk dari pemilihan umum, segala kekuasaan dijalankan Presiden dan dibantu oleh KNIP”, artinya KNIP hanya sebagai pembantu dari Presiden dalam menjalankan pemerintahan dan menunggu adanya pemilu untuk membentuk suatu MPR dan DPR. Pasal IV tersebut menyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus terbentuk secara prosedural melalui suara rakyat dengan dilaksanakan pemilihan umum. Tetapi memang dalam kelanjutannya, pemilihan umum memang tidak kunjung terlaksana (terlaksana pertama kali pada tahun 1955) mengingat keadaan pada waktu itu situasi dan kondisi Indonesia dalam upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dari tangan Sekutu khususnya Belanda yang ingin berkuasa lagi

Petisi yang di usulkan oleh anggota KNIP ini tidak diterima oleh Soekarno, namun Soekarno pun juga tidak menolak akan petisi ini, pada tanggal 16 Oktober 1945 ketika Soekarno sedang tidak berada di Jakarta, akhirnya, petisi ini ditandatangani oleh Mohammad Hatta dan dikenal sebagai Maklumat wakil Presiden No. X (Giebels, 2001:396) (Lihat Lampiran B). Hal ini memperlihatkan sikap ambivalensi Soekarno terkait petisi tersebut, menurut penulis, penolakan petisi ini adalah didasarkan atas gagasan-gagasan pemikiran Soekarno yang tidak setuju akan pemberlakuan sistem Parlementer yang condong terhadap demokrasi barat. Tetapi, Soekarno pun juga menerima akan hal itu karena mengingat dengan tidak adanya parlemen yang membuat Undang-Undang, membuat kesulitan bagi Indonesia dan otomatis dengan kondisi semacam itu mudah dituduh bahwa kemerdekaan adalah bentukan Jepang yang fasis.

Namun, kembali lagi pada sosok Mohammad Hatta yang sangat teguh dalam pendiriannya, untuk mewujudkan apa yang menjadi ideal atau cocok dalam pemikirannya dan di kongkritkan dalam perilaku politiknya, akhirnya Maklumat tersebut ditandatangani sendiri oleh wakil Presiden Mohammad Hatta dan tanpa tandatangan dari Presiden Soekarno. Mohammad Hatta sendiri menjelaskan kenapa nomor Maklumat tersebut adalah nomor X (bukan dibaca sepuluh) karena pada waktu itu, sekretaris negara Mr. Gafar Pringgodigdo tidak membawa nomor urutan maklumat sehingga Maklumat tersebut ditulis nomor X dan hingga

sekarang nomor maklumat tersebut tidak di ubah tetap menggunakan nomor X (Hatta, 2011:114-115). Pokok isi dari Maklumat no X itu adalah :

“Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat, diserahkan kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara, serta menjetudju bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnja keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerdja jang dipilih di antara mereka dan jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat (Anderson, 1988:201).

Lahirnya Maklumat No.X tersebut pada tanggal 16 Oktober 1945 dapat dikatakan sebagai tonggak politik Mohammad Hatta yang mengubah Demokrasi Presidensial ke Demokrasi Parleментар. Setelah munculnya Maklumat X pada tanggal 16 Oktober 1945, pada 1 November 1945, Mohamad Hatta mengeluarkan manifesto politik atau disebut juga sebagai Haluan Politik Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang pokok isinya adalah menghormati hak-hak milik asing. Isi maklumat tersebut adalah berisi “segala hutang Belanda sebelum penyerahan Jepang, patut menjadi tanggungan kita, kita akui sebagai hutang kita. Segala milik bangsa asing selain daripada yang diperlukan oleh negara kita untuk diusahakan oleh negara sendiri, dikembalikan kepada yang berhak serta yang diambil oleh negara akan dibayar kerugiannya dengan seadil-adilnya (Noer, 1990:291). Dari maklumat ini, mencerminkan perilaku politik Mohammad Hatta yang “Sosialis Demokratis”.

Seperti yang dikatakan oleh Ebenstein (2014:305-306), kaum sosialis tentang permasalahan nasionalisasi aset atau kepemilikan suatu alat, cenderung mengikuti keyakinan demokratis pada umumnya. Tidak seorang warga negara pun yang boleh dirampas hak miliknya tanpa proses dan kompensasi yang wajar. Karena mengingat pentingnya kepemilikan umum atas industri-industri dasar bagai rencana mereka, kaum sosialis menganggap pemilikan umum bukan sebagai tujuan tapi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Suatu alat yang tidak membenarkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak milik.

Fakta secara garis besar, isi maklumat tersebut adalah menghormati hak milik asing yang berasal dari sisa zaman Hindia Belanda, beserta hutang-hutang

Belanda juga dianggap menjadi tanggungan pemerintah Indonesia. Ini berarti, bahwa semua hak milik asing yang berasal dari zaman Belanda yang ada di Indonesia, dan dalam keadaan dirampas akan diserahkan kembali. Maklumat tersebut lagi-lagi hanya ditandatangani oleh wakil Presiden Mohammad Hatta tanpa ketidakikutsertaan Presiden Soekarno. Dengan dikeluarkannya maklumat ini adalah tidak lain sebagai upaya mempermudah perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui jalan diplomasi terhadap Sekutu khususnya Belanda. Karena Belanda tidak mau melakukan perundingan dengan Indonesia karena pemerintah Indonesia dianggap adalah sebagai kolaborator Jepang.

Hal yang menarik disini untuk dikaji, soal prinsip pemikiran yang melatar belakangi ketidakikutsertaan Presiden Soekarno dalam menandatangani Maklumat 1 November ini, sekalipun Soekarno sebagai Presiden, namun tetapi, hanya ditandatangani oleh wakil Presiden Mohammad Hatta dalam maklumat 1 November tersebut. Jelas untuk soal ini, secara prinsip, pemikiran Mohammad Hatta bertentangan sama sekali dengan pemikiran Presiden Soekarno khususnya konsep pemikiran tentang “Marhaenisme”. Gagasan pokok pemikiran Soekarno tentang Marhaenisme, mempunyai muara-tujuan yakni untuk “berupaya mengusir segala bentuk kapitalisme dan imperialisme di Indonesia” (Soekarno, 1964:17; Dahm, 1987:178 dan Ingleson, 1988:214).

Jelas, dari gagasan pemikiran tersebut, arah pemikiran Soekarno tidak akan mengakui sisa-sisa hak milik asing di Indonesia. Kekayaan-kekayaan tersebut seharusnya adalah digunakan untuk negara sendiri dalam rangka mewujudkan kepentingan rakyat dan mengakhiri segala bentuk kapitalisme di Indonesia. Dengan kata lain, jika maklumat itu di didasarkan atas pemikiran Presiden Soekarno yaitu “Marhaenisme”, mungkin maklumat itu tidak akan terlahir, atau setidaknya maklumat tersebut tidak akan disetujui oleh Presiden Soekarno. Faktanya, memang demikian adanya, maklumat tersebut ditandatangani oleh Mohammad Hatta sendiri tanpa mengikutsertakan Soekarno sebagai Presiden, karena maklumat 1 November 1945 secara perspektif pemikiran, berkontradiksi dengan pemikiran Soekarno. Bahkan, tidak itu saja,

selain saling berseberangan dengan Presiden Soekarno, Mohammad Hatta juga saling bertentangan dengan Tan Malaka terkait Maklumat tersebut.

Tan Malaka, dan juga Presiden Soekarno memiliki kesamaan pandangan terkait Maklumat 1 November tersebut, yakni menolak atau tidak setuju dengan apa yang menjadi isi maklumat tersebut, yaitu “menghormati hak milik asing”. Hal ini dapat dilihat dari gagasan-gagasan dasar pemikiran Tan Malaka pula yakni mengenai tujuan revolusi Indonesia. pemikiran Tan Malaka mengenai revolusi Indonesia yaitu revolusi total di segala bidang yakni di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya untuk melepaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme. Khususnya, program dalam bidang ekonomi, seperti yang dikutip dari buku “*Semangat Muda*” yang ditulis oleh Tan Malaka pada tahun 1926, ia menyatakan program di bidang ekonomi yang berisi:

1. Nasionalisasi atau memindahkan Pabrik dan Tambang (seperti pabrik gula, kina, kelapa, semen dan tambang arang, emas, timah dan sebagainya) ke pihak Pemerintah Rakyat Indonesia;
2. Nasionalisasi Tanah dan Kebun, seperti Gula, Getah, Tebu, Kopi, Kina, Kelapa, Indigo dan sebagainya;
3. Nasionalisasi Transportasi dan Komunikasi (Kereta, Kapal, Telegraf dan Telepon);
4. Nasionalisasi Bank, Perusahaan dan lain-lain Anggota-Perniagaan (Tan Malaka, 2015:20-21).

Dari program-program tersebut, dapat kita ketahui Tan Malaka dalam memandang revolusi tidak akan berkompromi dengan penjajah, menuntut kemerdekaan secara penuh dan total untuk Indonesia. Dan hal ini pula, pada gilirannya menunjukkan kepada kita bahwa adanya suatu perbedaan yang mendasar antara Tan Malaka (berikut pula dengan Soekarno dengan pemikiran tentang Marhaenisme) di satu sisi yang menentang atau setidaknya tidak setuju dalam perspektif pemikiran terkait Maklumat 1 November 1945 yang dikeluarkan oleh Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden.

Perseberangan pemikiran ini pula pada gilirannya juga berimplikasi kepada strategi perjuangan Indonesia setelahnya dalam mempertahankan revolusi

kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Kaum sosialis demokrat seperti Mohammad Hatta, Sjahrir dan para pendukungnya lebih memilih jalur perundingan atau diplomasi dengan Belanda daripada berperang total secara fisik. Jalur perundingan ini ditentang sama sekali oleh Tan Malaka dan para pendukungnya seperti Muhammad Yamin, Ahmad Subardjo, Sukarni, bahkan Jenderal Sudirman yang menuntut untuk merdeka 100 persen melawan Belanda (Subardjo, 1978:424-425). Sayuti Melik mengatakan, pertentangan yang semakin meruncing dan memuncak akibat perbedaan strategi perjuangan ini mengakibatkan terjadinya penculikan Perdana Menteri Sjahrir yang terkenal dengan “peristiwa 3 Juli 1946” (Priyadi, 1986:81). Namun disini penulis tidak akan menguraikan secara panjang lebar terkait peristiwa tersebut.

Pasca setelah penandatanganan manifesto politik 1 November 1945 tersebut, selang beberapa hari setelahnya, yakni tepatnya 2 hari yakni pada tanggal 3 November 1945, Mohammad Hatta mengeluarkan maklumat wakil Presiden tentang pembentukan partai-partai politik. Perlu diketahui, persetujuan atau penandatanganan maklumat ini lagi-lagi hanya berdasarkan atas tanda tangan dari wakil Presiden Mohamad Hatta, dan tidak melibatkan Presiden Soekarno (waktu itu Soekarno dikabarkan tidak sedang di Jakarta). Isi Maklumat tersebut adalah: “1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran yang ada dalam masyarakat; 2. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946” (Hatta, 2011:115-116 dan Subardjo, 1978:401).

Pemberian hak yang seluas-luasnya ini kepada rakyat untuk mendirikan partai-partai politik adalah dengan restriksi bahwa pendirian partai politik itu harus memperkuat perjuangan, mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan keamanan rakyat. Dengan adanya partai politik, pemerintah mengharapkan, melalui partai politik tersebut semua aliran dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan teratur (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008:203). Mohammad Hatta menjelaskan, bahwa, dengan terbentuknya partai-partai politik adalah sebagai upaya menghidupkan dan mengembangkan demokrasi dan

sekaligus untuk menghapus atau setidaknya adalah sebagai upaya resistensi sisa-sisa pengaruh fasis Jepang (Loebis, 1992:170).

Pasca dikeluarkannya maklumat 3 November tersebut, tidak elak, banyak partai-partai politik yang berdiri. Terbentuknya partai-partai politik sebagai implikasi dari maklumat 3 November 1945 tersebut, Indonesia telah menganut sistem multi partai (*multy-party system*) dalam sistem pemerintahannya, yang mana, hal ini adalah suatu syarat dasar atau suatu sarana dalam menuju sistem pemerintahan Parleментар. Manakala terbentuknya partai-partai politik saat itu, diumpamakan seperti “tumbuhnya jamur di musim penghujan” sehingga tidak mengherankan, jumlah partai politik yang tercatat pada bulan Mei 1946, terdiri dari 137 partai politik (lihat Anderson, Kelahiran Partai-Partai, 1988:231-260 dan Budisantoso, 2002:349).

Berdasarkan pengumuman BP-KNIP Nomor 5, pada tanggal 11 Nopember 1945, BP-KNIP membuat suatu pengumuman yang mendesak Presiden Soekarno tentang perlunya pengalihan pertanggung jawaban menteri-menteri yang sebelumnya bertanggung jawab kepada Presiden menjadi kepada lembaga legislatif yang didasarkan atas pasal IV tentang Aturan Peralihan UUD 1945. Mengalihkan pertanggung jawaban menteri-menteri ini, berarti pula juga mengalihkan bentuk sistem pemerintahan negara, yang secara demikian, pengumuman BP-KNIP tersebut harus diartikan pula sebagai desakan untuk perubahan sistem pemerintahan Presidensial (menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presiden) menjadi sistem pemerintahan Parleментар yang mengharuskan menteri-menteri bertanggung jawab kepada lembaga legislatif atau parlemen (Swastika, 2004:134).

Setelah itu, maka sistem pemerintahan di Indonesia berubah menjadi sistem pemerintahan Parleментар dengan terbentuknya kabinet parleментар yang diketuai oleh Sjahrir pada tanggal 14 Nopember 1945, yang komposisi dan susunannya adalah sebagai berikut:

Perdana Menteri	: Sutan Sjahrir
Menteri Luar Negeri	: idem
Menteri Dalam Negeri	: idem

Menteri Penerangan	: Mr. Amir Sjarifuddin
Menteri Keamanan Rakyat	: idem
Menteri Keuangan	: Mr. Sunario Kolopaking
Menteri Pendidikan	: Dr. Mr. T.G. S Moelia
Menteri Kehakiman	: Mr. Suwandi
Menteri Sosial	: dr. Adjidarmo Tjokronegoro
Menteri Kesejahteraan	: Ir. Darmawan Mangoenkoesoemo
Menteri Kesehatan	: dr. Darmasetiawan
Menteri Pekerjaan Umum	: Ir. Putuhena
Menteri Perhubungan	: Ir. Abdul Karim
Menteri Negara	: H. Rasjidi (Hatta, 2011:124-125 dan Subardjo, 1978:417).

Setelah kabinet terbentuk sesuai susunan yang disebutkan di atas, sejak saat itu pula kekuasaan pemerintah eksekutif mulai beralih dari tangan Presiden Soekarno kepada Perdana Menteri Sjahrir dan bertanggung jawab kepada BP-KNIP sebagai parlemen. Mohammad Hatta mengatakan “bahwa dengan terbentuknya kabinet Parlemerter yang di ketuai oleh Sjahrir dan kawan-kawannya dari partai sosialis adalah dengan tujuan untuk memudahkan perundingan dengan pihak Belanda” (Hatta, 2011:124). Dalam hal ini, suatu pertanyaan yang sederhana muncul dalam pikiran kita terkait hal tersebut, yakni apakah hanya dengan alasan “untuk mempermudah berunding dengan Belanda”, sistem pemerintahan Presidensial yang termaktub dalam UUD 1945 harus di ubah menjadi sistem pemerintahan parlementer?, yang juga pada kenyataannya secara otomatis, perubahan sistem pemerintahan tersebut telah mengurangi kekuasaan eksekutif Presiden Soekarno dengan sistem prsidensialnya dianggap mempuyai kekuasaan terlalu kuat dan totaliter (Mansoer, 1977:113; Kahin, 2013:219).

Namun tetapi, terlepas dari tujuan “untuk mempermudah berunding dengan Belanda”, peristiwa ini agak kontroversial dan sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam, karena peristiwa ini bisa dikatakan sebagai awal telikungan Mohammad Hatta terhadap kekuasaan yang mutlak Presiden Soekarno. Pasalnya, Maklumat X itu hanya berdasarkan tanda tangan wakil Presiden Mohammad

Hatta sendiri, namun tetapi, implikasinya mengubah hal yang sangat fundamen dalam sistem pemerintahan negara Indonesia waktu itu.

Transformasi sistem pemerintahan di awal kemerdekaan ini secara otomatis telah juga mengundang banyak penilaian dan interpretasi yang saling bertentangan bahkan kontroversial terkait hal tersebut, yakni dari keterangan para aktor yang terlibat (*historical aktor*) yang saling bertentangan dan membingungkan. Lalu juga penjelasan atau pendapat dari para ilmuwan terkait hasil penelitiannya terhadap fenomena perubahan sistem pemerintahan RI di awal masa kemerdekaan.

Para ilmuwan-ilmuan luar negeri, seperti halnya Ben Anderson yang berpendapat bahwa preferensi gagasan demokrasi Liberal dan institusi-institusinya yang diberlakukan sebagai sistem pemerintahan negara Indonesia sejak tanggal 14 November 1945, bukan karena proses apapun juga kecuali satu yakni hasil dari apa yang dinamakan sebagai “kudeta diam-diam” (*silent coup*) (1988:195-219). Kudeta diam-diam tersebut adalah sebagai suatu upaya resistensi yang dilakukan Mohammad Hatta bersama Sjahrir terhadap gagasan sistem pemerintahan Presidensial yang di gagas oleh Soekarno yang dirasa begitu absolut di tangan Presiden. Dalam konteks ini, pandangan Anderson sama dengan pandangan Ricklefs (2005:439) dan Giebels (2001:395-400) bahwa hal ini adalah suatu kudeta diam-diam atau *silent coup* atas kekuasaan Presiden.

Hal senada juga diucapkan oleh beberapa ilmuwan dalam negeri untuk mengilustrasikan proses transformasi sistem pemerintahan ini yang terjadi di awal-awal kemerdekaan, salah satunya yakni menurut Adam (2003:236) yang mengatakan “tidak berlebihan kiranya, bahwa hal ini adalah “kudeta konstitusional” wakil Presiden Mohammad Hatta terhadap Presiden Soekarno”. Jelas dalam UUD 1945, secara normatif bahwa wakil Presiden adalah sebagai peran pengganti daripada Presiden ketika Presiden berhalangan, namun dalam praktiknya, wakil Presiden Mohammad Hatta memiliki kekuasaan yang begitu besar untuk bertindak secara independen dari Presiden. Serangkaian maklumat dan peraturan yang bersandar pada kekuatan tanda tangan wakil Presiden

Mohammad Hatta telah mengubah sistem Presidensial menjadi sistem Parlementer.

Dilihat dari perspektif faktor *eksternal*, memang adanya transformasi sistem pemerintahan di awal kemerdekaan adalah suatu kebutuhan karena melihat situasi dan kondisi saat itu untuk mencari dukungan internasional karena revolusi Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, adalah merupakan suatu bagian yang tidak bisa dilepaskan dari perang dunia ke dua di Asia (perang Asia Timur Raya). Jepang yang terlibat dalam perang dunia ke dua sebagai pihak fasis melawan sekutu berhasil menguasai wilayah asia tenggara khususnya Indonesia saat itu pada tahun 1942 sampai tahun 1945. Tetapi pada tahun 1945, Jepang secara perlahan semakin terhimpit dan sering mengalami kekalahan melawan sekutu.

Pada bulan Juli 1944, Kepulauan Saipan yang letaknya sudah sangat dekat dengan Jepang jatuh ke tangan Amerika, yang berdampak menimbulkan keguncangan dalam masyarakat Jepang (Pesponegoro dan Notosusanto, 2008:121). Dampak dari kekalahan-kekalahan yang sering di alami oleh Jepang, membuat Perdana Menteri Koiso mengumumkan tentang pendirian pemerintah kemaharajaan Jepang, bahwa daerah Hindia Timur (Indonesia) diperkenankan untuk merdeka, hal ini lebih familiar disebut sebagai “janji Koiso” (Hatta, 2011:64; Pesponegoro dan Notosusanto, 2008:121). Realisasi dari janji Koiso tersebut, maka, pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (*Dokuritsu Junbi Cosakai*) yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka di kemudian hari. Selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, di bentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dokuritsu Junbi Inkai*) sesuai dengan keputusan Jenderal Terauchi. Menindaklanjuti pengumuman pembentukan PPKI, tiga orang tokoh pemimpin Indonesia yang terdiri dari Soekarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat dipanggil untuk menghadap Terauchi pada 9 Agustus 1945 di Dalat, Vietnam.

Selanjutnya, pada tanggal 11 Agustus 1945, Terauchi menerima ketiga tokoh tersebut dan melantik Soekarno dan Mohammad Hatta masing-masing sebagai ketua dan wakil ketua PPKI (Hatta, 2011:67-72; Subardjo, 1978:294 dan Anderson, 1988:85). Pada saat ketiga tokoh PPKI yang telah dilantik di Vietnam berangkat kembali menuju Jakarta tanggal 14 Agustus 1945, Jepang mengalami pengeboman oleh Sekutu di Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom dan secara mutlak Jepang bertekuk lutut menyerah kepada Sekutu. Berita kekalahan Jepang saat itu didengar oleh tokoh pemuda yakni salah satunya adalah Sjahrir, dan Sjahrir pun, mendesak agar proklamasi kemerdekaan dengan segera diproklamasikan. Namun, Soekarno, Mohammad Hatta dan golongan tua yang lain tidak setuju atas desakan Sjahrir ini yang mewakili golongan pemuda.

Dalam hal ini, Soekarno sebagai wakil dari golongan tua berkata “aku tidak berhak bertindak sendiri, hak itu adalah tugas PPKI, alangkah janggalnya di mata orang, setelah kesempatan terbuka untuk mengucapkan kemerdekaan Indonesia, aku bertindak sendiri melewati PPKI yang ku ketuai” (Hatta, 2011:75). Sikap inilah yang tidak disetujui oleh golongan pemuda, yang menganggap PPKI adalah badan *bikinan* Jepang yang tunduk pada kemauan Jepang. Dari sini, terjadi perbedaan sikap antara golongan tua dan muda dalam melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Sebagai implikasi dari pertentangan ini, maka terjadilah apa yang lebih dikenal sebagai “peristiwa Rengasdengklok”.

Dalam peristiwa Rengasdengklok ini, para pemimpin dari golongan tua diculik dan di bawa ke Rengasdengklok, sebuah kota kewedanan di Kabupaten Kerawang. Namun, disini penulis tidak akan membahas kronologi peristiwa Rengasdengklok, melainkan peristiwa setelah dari Rengasdengklok tersebut yakni detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu, setelah kekalahan Jepang kepada Sekutu, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*), dan Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah *status quo* yang artinya semua tentara Jepang semata-mata sudah merupakan alat-alat Sekutu dan diharuskan tunduk kepada perintah Sekutu (Pesponegoro dan Notosusanto, 2008:141).

Namun demikian, perumusan naskah proklamasi tetap dijalankan. Perumusan teks proklamasi dilaksanakan di rumah Laksmana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 pada tanggal 16 Agustus dinihari, dan dilanjutkan proklamasi kemerdekaan esok harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta (Hatta, 2011:94). Setelah menjadi negara yang berdaulat, menjadi negara yang baru merdeka, tidak serta merta menjadikan Indonesia lepas dari kolonialisme dan imperialisme. Sebab, kekalahan Jepang terhadap Sekutu, membuat wilayah jajahan Jepang di Asia khususnya Indonesia sebagai bekas jajahan Jepang secara otomatis menjadi wilayah kekuasaan Sekutu.

Indonesia ketika baru merdeka, adalah dalam posisi *status quo* sampai Sekutu datang ke Indonesia. Ketika Sekutu datang ke Indonesia, selain bertujuan untuk menerima “menyerahnya angkatan bersenjata Jepang”, juga harus membentuk serta mempertahankan keamanan dan ketertiban di Indonesia sampai pemerintah Belanda dapat berfungsi secara mandiri (Kahin, 2013:205). Artinya, Belanda akan datang untuk menguasai dan mengembalikan Indonesia sebagai negara jajahannya. Hal ini secara otomatis mendapat reaksi perlawanan bangsa Indonesia yang tidak mau di jajah kembali. Banyak pertempuran-pertempuran yang terjadi di wilayah Indonesia dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Namun tetapi, dalam mempertahankan kedaulatan bangsa, perjuangan Indonesia yang dilakukan untuk melawan Belanda tidak saja menggunakan jalur perang atau pertempuran saja. Indonesia menggunakan strategi perjuangan melalui jalan perundingan atau diplomasi melawan Belanda. Dengan catatan, meskipun pemerintah Indonesia dalam strategi perjuangannya menggunakan jalan diplomasi, tetapi tidak berarti mengabaikan perjuangan menggunakan strategi militer alias melalui pertempuran (Noer, 1990:288). Pemerintah Indonesia berusaha memperoleh pengakuan internasional terhadap kedaulatan negara pemerintah RI khususnya dari pihak Sekutu, terlebih juga dari pihak Belanda yang masih menganggap Indonesia sebagai daerah jajahannya.

Pergeseran sistem pemerintahan di awal kemerdekaan dari sistem Presidensial ke sistem Parlemen adalah untuk menunjukkan bahwa negara

Indonesia yang baru merdeka adalah negara yang demokratis. Negara yang demokratis menurut negara-negara barat pada saat itu adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer dan multi-partai. Sehingga, pergeseran sistem pemerintahan Indonesia dari Presidensial ke sistem Parlementer di awal kemerdekaan adalah sebagai suatu strategi yang bertujuan untuk menarik dukungan internasional terhadap revolusi Indonesia (Zulkarnain; 2012:6). Kondisi pada saat itu, pemerintah Belanda tidak mau atau tidak setuju untuk berdiplomasi dengan Pemerintah Indonesia karena dianggap sebagai kolaborator Jepang yang fasis (Ricklefs, 2005:438).

Sekutu dan Belanda mengeluarkan propaganda di mana-mana yang menekankan bahwa pasukan sekutu akan didaratkan di Jakarta dan mengambil tindakan tegas terhadap semua kolaborator Jepang. Propaganda itu dilancarkan salah satunya melalui siaran radio SEAC (*South East Asia Command*) yang dipancarkan dari Ceylon. Siaran radio tersebut dalam rangka perang urat syaraf, siaran radio tersebut berkali-kali menyatakan bahwa tentara sekutu akan mengadakan perhitungan tersendiri dengan para pemimpin Indonesia yang telah bekerja sama dengan militerisme Jepang, dan bagi tentara sekutu tidak ada ruang untuk bekerja sama dengan rezim Soekarno yang dianggap tidak demokratis dan fasis buatan Jepang (Malik, 1984:91; Poeze, 2008:50).

Transformasi sistem pemerintahan menjadi sistem Parlementer yang disetujui oleh Mohammad Hatta dan memunculkan Sjahrir sebagai Perdana Menteri adalah sebagai jawaban terhadap kondisi situasi saat itu sebagai upaya mencari pengakuan internasional dan berdiplomasi dengan Belanda. Artinya, perjuangan tidak hanya melalui jalan pertempuran melawan sekutu khususnya Belanda, namun tetapi juga melalui jalan perundingan. Pelaksanaan sistem pemerintahan Parlementer adalah suatu cara yang diyakini menguatkan kedudukan pemerintah Republik Indonesia di dunia Internasional ketika mengadakan diplomasi dengan Belanda (Kahin, 2013:221-222). Maka, sosok Sjahrir lah yang dinggap cocok dalam menempuh jalur perundingan ini, Sjahrir dianggap sebagai politisi Indonesia yang di anggap oleh Sekutu “cukup demokratis” dan bukan kolaborator Jepang (Poeze, 2008:47).

Secara *ekstern* faktor perubahan sistem pemerintahan Presidensial menjadi sistem Parlemerter memang tidak lepas dalam upaya untuk mencari dukungan dan pengakuan dari dunia Internasional terhadap negara Indonesia yang baru merdeka ini. Namun begitu, jika persoalan yang sama dicoba dilihat dari perspektif lain, yaitu persepektif gagasan-gagasan dasarnya (faktor *intern*), kiranya tidak jauh dari kenyataan yang sebenarnya pula, jika dikatakan bahwa transformasi sistem pemerintahan yang terjadi di awal kemerdekaan merupakan perwujudan gagasan demokrasi yang di anut oleh Mohamad Hatta, yakni demokrasi parlementer dan sistem multi partai.

Preferensi sistem demokrasi parlementer ini, sekurang-kurangnya adalah tidak lepas dari visi adat dan falsafah Minangkabau yang dikembangkan oleh Mohammad Hatta yang ia padukan dengan pengaruh dari “rantau” yaitu pengaruh pendidikannya di Eropa khususnya Belanda, yang mana negara tersebut dalam sistem pemerintahannya menganut sistem parlementer.

Sistem parlementer yang diterapkan di Belanda beserta sistem multi-partai dinilai mencerminkan nilai-nilai demokratis, dan sistem ini adalah sistem yang paling tidak, memiliki kesamaan dengan nilai-nilai sistem demokrasi yang ada di Minangkabau. Meskipun ada beberapa kritik oleh Mohammad Hatta terhadap demokrasi barat (demokrasi parlementer) namun setidaknya, demokrasi tersebut bagi Mohammad Hatta adalah yang paling cocok dan ideal untuk diterapkan di Indonesia setelah merdeka. Karena kondisi Indonesia yang mempunyai banyak keanekaragaman suku, etnis, budaya, agama, bahasa dan sebagainya. Preferensi gagasan ini ini jelas diungkapkan oleh Mohammad Hatta dalam peraturan dasar Pendidikan Nasional Indonesia yang berjudul “*Ke Arah Indonesia Merdeka*”, ia mengatakan:

“...Demokrasi atau pemerintahan Rakjat sekarang dilakukan dengan djalan perwakilan. Rakjat jang banjak memilih wakil-wakilnja pada tiap-tiap waktu jang ditentukan untuk bersidang di dalam dewan rakjat. Djadinja pemerintahan rakjat sekarang dilakukan dengan perantaraan dewan rakjat atau parlemen. Pemerintah itu dapat berdiri kalau di akui oleh Parlemen. Suatu pemerintah jang tiada dipertjajai oleh parlemen tentu tidak dapat hidup lama, karena dewan rakjat dapat menewaskan dia setiap waktu dengan menerima mosi tanda tidak pertjaja. Kalau

pemerintah yang didjatuhkan itu menjangka bahwa gelagat dewan rakjat itu tidak lagi tjotjok dengan kemauan rakjat yang terbanyak, maka ia berhak membubarkan dewan rakjat dan mengadakan pemilihan baru untuk menduga kemauan rakjat yang sebenarnya. Djika sekiranya rakjat yang memilih mengutus kembali wakil-wakil lama kedalam dewan rakjat yang baru itu, maka ini suatu tanda bagi pemerintah, bahwa ia mesti mundur, supaya digantikan oleh pemerintah baru. Sebab itu, dalam susunan *Parlementaire Democratie* (Demokrasi Parlemerter) sekarang, pemerintah itu perlu mendapat kepertjajaan dari dewan rakjat. Barulah ia dapat bekerdja mendjalankan kewadjabannja. Kalau tidak, ia harus mundur, supaya di ganti oleh pamerintah yang dipertjajai oleh parlemen (1953:68; dan Hatta, 2008:23-24) (Untuk Selengkapnja Lihat Lampiran D, Hal 124).

Dari pernyataan tersebut, Mohammad Hatta menjelaskan sistem pamerintahan parlemerter (karena kecenderungan Mohammad Hatta terhadap demokrasi parlemerter tersebut yang tidak jauh dari nilai-nilai demokrasi Minangkabau) yang dijadikannya sebagai preferensi sistem pemerintahan Indonesia setelah merdeka. Mohammad Hatta mengatakan bahwa, sistem parlemerter dan sistem multi-partai memang sesuai dengan kondisi Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya (Ingleson, 1983:13). Sehingga keanekaragaman, pluralitas dan segala aliran ideologi yang ada di masyarakat tersebut harus dapat dipimpin ke jalan yang teratur melalui organisasi partai-partai politik (Hatta, 2011:115-116). Dan, menurut Ingleson pula, Mohammad Hatta dan Sjahrir (keduanya memang memiliki kesamaan ideologi) adalah memang sebagai penganjur utama sistem parlemerter dan multi-partai (*multy-party system*) untuk Indonesia (1983:187).

Sehingga tidak mengherankan, apabila Mohammad Hatta ketika menjadi wakil Presiden di awal kemerdekaan, mengeluarkan serangkaian maklumat yang membuka jalan diberlakukannya sistem pemerintahan Parlemerter di Indonesia dan memang terjadi transformasi sistem pemerintahan dari Presidensial menjadi sistem parlemerter. Peristiwa yang dinilai agak inskonstitusional ini, tidak lain adalah sebagai suatu pengejewantahan dari nilai-nilai demokrasi Minangkabau dan ideologi yang di anut oleh Mohamad Hatta yakni sosialisme demokrat yang

terjelma sebagai sistem parlementer dan multi-partai (*multy-party system*) yang ia suarakan sejak zaman pergerakan nasional.

Oleh karena itu, dalam melihat fenomena transformasi sistem pemerintahan yang terjadi pada 14 Nopember 1945 tersebut, bagi Adam Malik (1984:76) dan Ahmad Subardjo (1978:414) hal itu adalah merupakan suatu “*silent coup d’etat*” yang “janggal dalam arti kedaulatan rakyat dan revolusi” karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Peristiwa tersebut adalah suatu perebutan kekuasaan dengan bantuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.

Apalagi, jawaban Mohammad Hatta ketika ditanya akan fenomena perubahan sistem pemerintahan tersebut oleh Sayuti Melik, Hatta cuma menjawab “Itu semua sudah menjadi keputusan Badan Pekerja KNIP dan harus dilaksanakan” (Priyadi, 1986:75). Dari ungkapan tersebut, secara implisit dapat kita ketahui bahwa Mohammad Hatta mendukung atau setidaknya membuka ruang untuk merealisasikan keinginan KNIP untuk di jadikan sebagai parlemen, hal ini jelas dari serangkaian maklumatnya yang ia tandatangani sendiri. Padahal secara beriringan pula, di dalam internal lembaga KNIP saat itu, terjadi manuver-manuver politik, yang dalam sidang-sidang plenonya yang menurut Sayuti Melik (Priyadi, 1986:80) dan Anderson (1988:202) diduga telah di atur sebelumnya melalui *deal-deal politik* sehingga memunculkan Sjahrir sebagai ketua BPKNIP.

Apakah kejadian hal ini hanya suatu kebetulan belaka antara Mohammad Hatta dan Sjahrir, atukah hal ini sudah di atur sebelumnya?, Mengingat mereka mempunyai ideologi yang sama, yakni lebih condong kepada sistem Parlementer sebagai manifestasi dari ideologi “sosial demokrat” yang mereka anut, dan sama-sama pula dilahirkan dari adat dan budaya Minangkabau sehingga ada kemungkinan preferensi gagasan tersebut untuk diwujudkan bersama-sama saat Indonesia merdeka. Terlebih pula, sejak masih di Belanda hingga zaman pendudukan Jepang, antara Mohammad Hatta dan Sjahrir selalu bersama memperjuangkan Indonesia, bahkan di tempat pembuangan yang sama pula yakni di Digul dan Banda Neira.

Namun hingga sampai saat ini, hal ini belum jelas, penulis belum menemukan suatu fakta-fakta yang jelas memperlihatkan adanya suatu

kesepakatan bersama antara Mohammad Hatta dan Sjahrir dalam proses transformasi tersebut. Kecuali memang suatu fakta umum, kolaborasi antara wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai pembuka jalan pemberlakuan demokrasi parlementer dengan beberapa maklumatnya dan manuver Sjahrir dalam internal KNIP untuk menjadikan KNIP sebagai parlemen telah berhasil mengikis kekuasaan Soekarno sebagai Presiden yang dalam konstitusi UUD 1945 kedudukan Presiden mempunyai kedudukan yang kuat. Dan, hanya dengan waktu sesingkat itu pula, *set up* UUD 1945 yang menggunakan sistem pemerintahan yang condong kepada sistem Amerika (sistem pemerintahan Presidensial), dalam praktiknya telah di belokkan menjadi sistem pemerintahan Eropa barat atau Parlementer (Adam, 2003:235).

Hal ini pula, semakin memperjelas dan menjawab kekecewaan Soekarno kepada Mohammad Hatta menanggapi transformasi sistem pemerintahan tersebut, sebagaimana yang dikatakan kepada Sayuti Melik, Soekarno mengatakan bahwa “Hatta telah menyerobot saya” (Priyadi, 1986:75) kiranya mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Karena dalam konteks perubahan sistem pemerintahan RI di awal kemerdekaan tersebut, tidak jauh pada kenyataannya adalah konflik elit politik Indonesia yaitu pertarungan antara gagasan-gagasan, ide-ide dan kepentingan politik para *The Founding Fathers* yang mana benih-benih pertentangan tersebut telah ada sejak zaman pergerakan nasional, dan pada saat revolusi kemerdekaan meletus pada Agustus 1945, atmosfir politik setelahnya amat pekat sekali dengan konflik-konflik yang terjadi di antara para elite politiknya.

Friksi gagasan maupun kepentingan politik dari para elite di awal kemerdekaan terjadi lebih menonjol dan terbuka bahkan lebih keras dibandingkan yang terjadi pada masa-masa sebelum kemerdekaan. Sehingga, selain Soekarno yang merasa diserobot oleh Mohamad Hatta, ungkapan kekesalan juga di utarakan oleh Ahmad Subardjo sebagai seorang menteri Luar Negeri kabinet “*bucho*” Presidensial Soekarno. Ia memperlihatkan kekecewaannya dalam mengilustrasikan peristiwa transformasi sistem pemerintahan ini dari semula yang

menerapkan sistem partai tunggal (Presidensial) kemudian berubah menganut sistem multi partai (Parlementer), dalam autobiografinya, ia mengatakan:

“...tidaklah mungkin terdapat kekompakan nasional dengan adanya partai-partai politik yang berbeda-beda ideologinya itu. Secara logis, dan menurut alam pikiran demokrasi liberal, haruslah di adakan pemilihan umum agar terdapat *majority-rule*. Hal demikian itu hanya dapat di adakan dalam suatu negara demokrasi liberal yang *established* dalam suasana tentram dan aman. Tidaklah mungkin pemilihan umum dapat di adakan dalam suasana revolusi yang sedang menjalani “*Umwertung aller Werte*” (suatu proses pemutar balikan nilai-nilai. Oleh karena itu, Maklumat wakil Presiden Hatta yang menganjurkan agar dibentuk partai-partai politik tidaklah sesuai dengan dasar dan tujuan UUD 1945 dan tidak pada tempatnya untuk dilaksanakan dalam suasana revolusi Indonesia. Karena, Maklumat itu di umumkan di tengah-tengah letusan bom, mortir, meriam, senapan dimana-mana. Pemerintah RI pada waktu itu dibanjiri dengan berita-berita mengenai pertempuran antara rakyat ndonesia melawan serdadu-serdadu NICA, Inggris, Jepang yang dihasut oleh Sekutu untuk menindasnya” (Subardjo, 1978:401).

Dari pernyataan tersebut, dapat di simpulkan bahwa pembelakuan sistem parlementer dan multi-partai ketika revolusi berlangsung tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena rakyat semakin tidak dapat bersatu dan dengan adanya partai-partai politik yang berbeda-beda ideologinya. Sementara itu, keadaan situasi dan kondisi saat revolusi berlangsung memerlukan kekompakan dengan bersatu padunya semua golongan dalam menghadapi agresi pihak sekutu. Namun, dengan Maklumat yang dianjurkan agar dibentuk partai-partai politik, maka rakyat semakin terpecah belah karena fokus membentuk partai dari akibat maklumat yang dikeluarkan oleh wakil Presiden Mohammad Hatta tersebut.

Hal ini terlihat pada 10 November 1945, pada saat pertempuran di Surabaya terjadi, saat itu pula pada hari yang sama didirikanlah Partai Kristen Indonesia (PARKINDO) yang diketuai oleh B. Probowinoto. Padahal, keadaan saat itu membutuhkan persatuan karena keadaan sangat genting akibat pertempuran yang sengit di Surabaya antara rakyat Indonesia melawan Sekutu. Pada hari itu juga, didirikan pula Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO) di Yogyakarta yang tadinya bernaung di bawah Pemuda Republik Indonesia.

Perkembangan selanjutnya dalam pembentukan partai-partai, menurut Subardjo (1978:412) yang sangat mencolok akibat dari anjuran mendirikan partai-partai politik ialah didirikannya Partai Komunis Indonesia (PKI) di Medan pada tanggal 18 Nopember 1945. Padahal para perumus dasar Undang-Undang Dasar 1945 telah menolak ideologi Marxisme bagi dasar negara, karena tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan memang pada selanjutnya, lambat laun dengan keaktifan PKI di Indonesia tidak dapat di hindarkan bentrokan mental dan fisik dengan pemerintah Republik Indonesia maupun dengan partai-partai politik golongan lain di Indonesia. Hal ini, terbukti kemudian dengan meletusnya pemberontakan PKI yang berdarah di Madiun tahun 1948.

5.1.2 Testamen Kita (Testamen Politik Kepada Tan Malaka)

Dalam rangka upaya transformasi sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan Presidensial menuju sistem Parlementer, suatu perkembangan yang membahas Tan Malaka perlu pula mendapat perhatian dalam penelitian ini. Perkembangan ini berhubungan dengan apa yang disebut “Testamen Kita” atau lebih familiar disebut sebagai “Testamen Politik Tan Malaka”, yakni semacam surat wasiat politik yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta pada tanggal 1 Oktober 1945 (Subardjo, 1978:363-364; Malik, 1984:149; Poeze, 2008:60; Noer, 2012:93-94; lihat juga Alfarizi, 2013:155). Testamen politik yang diberikan kepada Tan Malaka adalah hasil keputusan bersama antara Soekarno, sebagai Presiden dan wakil Presiden Mohammad Hatta.

Sebelumnya, antara Mohammad Hatta dengan Tan Malaka, telah saling mengenal ketika waktu Mohammad Hatta masih studi di negeri Belanda pada tahun 1922, namun antara Mohammad Hatta dan Tan Malaka tidak mengenal secara dekat, dalam artian dekat secara personalia (Hatta, 2011:182-185). Setelah perkenalan tersebut, sosok Tan Malaka tidak terlalu mencuat ke permukaan politik pergerakan nasional, karena Tan Malaka dibuang oleh pihak kolonial ke negeri Belanda pada 24 Maret 1922 hingga tahun 1942 baru ia kembali ke Indonesia (Rahman, 2013:102-200).

Proses pemberian testamen politik ini kepada Tan Malaka, adalah murni inisiatif dari Presiden Soekarno karena mengingat gentingnya keadaan pada waktu itu, keadaan ini demikian diakibatkan karena ada desas-desus bahwa pihak sekutu akan menangkap Presiden Soekarno yang dianggap oleh Sekutu sebagai penjahat perang (*war criminal*) (Loebis, 1992:167). Desas-desus tersebut memang benar terjadi, Malik (1984:149) mengatakan bahwa Belanda berniat untuk membunuh dwitunggal Soekarno dan Mohammad Hatta, pembunuhan tersebut dilancarkan ketika mobil Soekarno di cegat dan ditembaki, sopir mobil Soekarno saat itu luka-luka parah, tetapi kebetulan Soekarno sedang tidak berada di dalamnya. Berdasarkan situasi yang genting itu, maka diprakarsai kelahiran testamen politik kepada Tan Malaka sebagai strategi cadangan bilamana kedudukan dwitunggal terancam dan tidak dapat menjalankan fungsinya

Namun, dalam sub bab ini, yang menjadi duduk permasalahannya, yakni permasalahan “ketidaksetujuan” atau dengan kata lain Mohammad Hatta menolak atas inisiatif testamen politik kepada Tan Malaka yang digagas oleh Presiden Soekarno tersebut. Pada tanggal 25 Agustus 1945, Tan Malaka mengunjungi Ahmad Subardjo, kawan lama Tan Malaka ketika di Belanda yang kemudian Ahmad Subardjo lah yang memperkenalkan Tan Malaka kepada tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir. Iwa Kusumsumantri, Buntaran Martoadmodjo dan tokoh pejuang yang lain (Subardjo, 1978:362 dan Loebis, 1992:167-168). Dari perkenalan tersebut, dengan demikian, Tan Malaka mendapat kesempatan untuk muncul kembali di permukaan politik.

Tanggal 9 September 1945, Tan Malaka bertemu kembali dengan Soekarno, adalah sosok Sayuti Melik yang mempertemukan atau sebagai tokoh kunci yang mengatur pertemuan antara Presiden Soekarno dengan Tan Malaka yang bertempat di rumah dokter pribadi Soekarno, yakni dr. Suharto. Pertemuan antara Presiden Soekarno dan Tan Malaka itu sangat dirahasiakan. Sebab, Jepang masih sedikit memiliki kekuasaan terhadap Indonesia pada waktu itu sehingga dipandang perlu oleh Soekarno untuk bertemu dengan tokoh revolusioner populer seperti Tan Malaka agar dirahasiakan (Rahman, 2013:224).

Pertemuan itupun dilangsungkan di kamar belakang rumah dr. Suharto dan hanya, disaksikan oleh Sayuti Melik. Akhirnya, Tan Malaka memperkenalkan diri dan membuka identitasnya, setelah Tan Malaka membuka identitasnya (yang sebelumnya mengaku bernama samaran Ilyas Husein), Presiden Soekarno membuka pembicaraan dengan sebuah pertanyaan mengenai salah satu hal yang ada di dalam buku *Aksi Massa* Tan Malaka.

Presiden Soekarno berkata, “Dalam buku *Aksi Massa*, rupanya saudara (Tan Malaka) menganggap bahwa sifat imperialisme Inggris berada di antara imperialisme Belanda dan imperialisme Amerika (lihat selengkapnya dalam Tan Malaka, 2000:13-18; Subardjo, 1978:362). Setelah percakapan tersebut, Presiden Soekarno yang mendengarkan pendapat-pendapat panjang lebar dari Tan Malaka dalam pertemuan itu, Presiden Soekarno, terpesona dan mengagumi sosok Tan Malaka, lantas mengharapkan pandangan-pandangan veteran pejuang revolusioner ini dalam menghadapi revolusi Indonesia, dan dengan spontan, Presiden Soekarno berkata “ Jikalau suatu saat saya tidak lagi bebas bertindak, maka kepemimpinan revolusi saya serahkan kepada anda” (Priyadi, 1986:42-43; dan Loebis, 1992:167). Selanjutnya, peristiwa penyerahan pimpinan revolusi tersebut diceritakan oleh Tan Malaka kepada Ahmad Subardjo.

Subardjo menilai hal ini adalah sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan dan selain itu, memang Subardjo terlihat sangat setuju dengan janji penyerahan pimpinan revolusi tersebut. Koincidensi saat itu, bahwa terdengar desas-desus bahwa Presiden Soekarno akan ditangkap oleh Inggris dengan tuduhan “penjahat perang” karena membantu Jepang sebagai pihak yang bermusuhan dengan Sekutu. Hal itu, turut membuat keadaan di Jakarta genting dan mendesak, dari sini, Subardjo melihat pentingnya janji penyerahan revolusi kepada Tan Malaka agar di legalkan dan ditulis dalam bentuk dokumen “hitam di atas putih” (Rahman, 2013:227). Dapat disimpulkan bahwa, peranan Ahmad Subardjo lah yang cukup dominan, terhadap pembuatan testamen ini yang melihat bahwa keadaan yang genting waktu itu.

Ahmad Subardjo mendesak Presiden Soekarno agar melegalkan janji itu kepada Tan Malaka, yakni dengan tujuan, agar tongkat estafet revolusi Indonesia

tetap berjalan khususnya jika ketika Presiden Soekarno dan pemimpin lainnya benar-benar ditangkap.

Maka, pada tanggal 30 September 1945, di adakanlah sebuah pertemuan dengan Presiden Soekarno di rumah Ahmad Subardjo yang disaksikan oleh Iwa Kusumasumantri dan Gatot Tarunamihardjo. Kesepakatan diambil, maka disusunlah surat wasiat itu dan akan ditandatangani sendiri oleh Presiden Soekarno dan wakil Presiden Mohammad Hatta. Maka selepas itu, Presiden Soekarno pulang dengan membawa rancangan testamen tersebut dan menuju kediaman Mohammad Hatta. Mohammad Hatta terkejut ketika membaca rancangan testamen itu, ia *menolak* hasil rancangan testamen tersebut. Mohammad Hatta berkata, “Kenapa tidak bicara dulu kepada saya? Engkau (Soekarno) mestinya kenal baik siapa itu Tan Malaka” (Alfarizi, 2012:156). Mohammad Hatta mengemukakan bahwa Presiden Soekarno telah “bertindak terlalu jauh” dan terlalu “menuruti perasaannya” dalam pemberian testamen tersebut.

Mohammad Hatta menolak hasil pertemuan yang menghasilkan testamen politik itu. Penolakan Mohammad Hatta terhadap testamen tersebut, tidak diartikan bahwa testamen itu langsung dibatalkan begitu saja, karena, ditolaknya testamen itu oleh Mohammad Hatta di satu sisi, namun tetapi di sisi yang lain, Mohammad Hatta harus pula menyelamatkan wibawa Presiden Soekarno yang telah terlanjur berjanji untuk memberikan testamen politik kepada Tan Malaka. Maka, Mohammad Hatta mengusulkan dan memutuskan untuk menambah “pewaris” dari surat wasiat politik tersebut (Noer, 1990:266). Penambahan yang di usulkan Mohammad Hatta dalam testamen tersebut adalah tetap diberikan kepada Tan Malaka sebagai wakil dari golongan kiri, dan Hatta mengusulkan untuk menambah Sutan Sjahrir mewakili kelompok golongan tengah kiri, yang disebut Oleh Mohammad Hatta sebagai “golongan sedang”; dan Wongsonegoro mewakili golongan kanan dan feodal; dan terakhir, Sukiman mewakili golongan Islam.

Akhirnya, testamen itu disetujui bersama antara Presiden Soekarno dan wakil Presiden Mohammad Hatta (Subardjo, 1978:364; Hatta, 1981:15; Loebis,

1992:167; Kahin, 2013:217) (Naskah Testamen selengkapnya Lihat Lampiran C, Hal 123). Sesuatu yang agak ganjil, dimana Mohammad Hatta menyebutkan dalam “testamen politik” bahwa Sukiman ketika itu adalah ketua Masjumi. Padahal, testamen politik itu dibuat dalam bulan September, dan paling lambat awal bulan Oktober, sedangkan Masjumi baru berdiri pada 7 November 1945 (Anderson, 1988:249).

Deliar Noor menjelaskan hal ini sebagai suatu kekhilafan atau kekeliruan dari Mohammad Hatta (1990:266). Setelah testamen itu di setujui, pertemuan pun diatur untuk merampungkan surat wasiat ini. Presiden Soekarno menghubungi Soebardjo dan mengundang orang-orang yang akan menerima testamen tersebut. Keesokan harinya, tanggal 1 Oktober 1945, Tan Malaka dan Iwa Kusumasumantri sudah hadir di rumah Ahmad Subardjo untuk menyambut kedatangan Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta, sedangkan Sjahrir, Wongsonegoro, dan Sukiman yang juga akan menerima testamen itu tidak hadir.

Dalam pertemuan 1 Oktober tersebut, Soekarno dan Mohammad Hatta menyetujui mengganti Sukiman dengan Iwa Kusumasumantri, alasannya karena Iwa Kusumasumantri adalah sahabat dari Sukiman dan dekat dengan kelompok Islam, mengingat pula saat itu, Sukiman juga tidak bisa hadir karena berada di Yogyakarta dan sulit untuk di hubungi. Selanjutnya, naskah testamen politik akhirnya disetujui dan diketik oleh Ahmad Subardjo. Ahmad Subardjo membuat salinan testamen politik tersebut rangkap tiga yang kemudian ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan wakil Presiden Mohammad Hatta.

Ahmad Subardjo ditugasi memberikan teks testamen politik itu kepada Sjahrir dan Wongsonegoro, karena memang sebelumnya, Sjahrir dan Wongsonegoro tidak hadir dalam pertemuan 1 Oktober 1945 tersebut. Tetapi kemudian, perkembangan selanjutnya, Sjahrir dan Wongsonegoro tidak memperoleh testamen politik tersebut. Hal ini, bermula ketika sepuluh hari setelah dikeluarkannya surat testemen politik, tatkala wakil Presiden Mohammad Hatta menanyakan “apakah Sjahrir telah menerima testamen tersebut?”. Sjahrir terkejut, dan mengatakan bahwasanya dirinya tidak tahu-menahu adanya testamen itu.

Demikian juga, ketika Mohammad Hatta menemui Wongsonegoro yang sedang berada di Solo pada bulan Februari 1946, Wongsonegoro juga mengatakan hal yang sama seperti dikatakan oleh Sjahrir, bahwa dirinya tidak tahu perihal testamen tersebut. Lantas demikian, Mohammad Hatta mencurigai Ahmad Subardjo telah mengingkari tugasnya yang telah dipercaya untuk menyampaikan testamen itu (Rahman, 2013:229-230). Ahmad Subardjo, kemudian mengakui bahwa menjadi tugasnya untuk menyampaikan salinan surat testamen politik tersebut kepada Sjahrir dan Wongsonegoro, tetapi “berhubung karena suasana tidak aman karena revolusi, hubungan pers, lalu lintas dan peristiwa lain-lain, maka saya tidak dapat lagi menyampaikannya kepada saudara-saudara yang disebut itu” (Subardjo, 1978:364).

Hal yang cukup ganjil rasanya, tidak disampaikannya surat testamen itu oleh Subardjo kepada Sjahrir dan Wongsonegoro hanya karena alasan tidak amanya keadaan saat itu. Menurut penulis, ada perspektif lain yang melatarbelakangi Subardjo tidak memberikan surat testamen tersebut, yaitu perbedaan ideologis antara Subardjo dengan Sjahrir dan Wongsonegoro. Ahmad Subardjo secara ideologis adalah nasionalis seperti halnya Tan Malaka, sedangkan Sjahrir adalah penganut sosialisme demokrat dan Wongsonegoro seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah golongan kanan dan feodal. Perbedaan secara ideologis antara Subardjo dengan Sjahrir ini diungkapkan Subardjo dalam autobiografinya, ia mengatakan:

“...Pandangan saudara (Sjahrir) sebagai seorang sosialis Internasional tidak dapat saya ikuti, karena saya sebagai seorang nasionalis berpedoman pada ideologi Perhimpunan Indonesia, yakni percaya pada diri sendiri sebagai bangsa, tidak meminta bantuan dari pihak manapun dalam menentukan nasib diri sendiri” (Subardjo, 1978:418).

Karena secara ideologis antara Sjahrir (dan Wongsonegoro) kontradiktif dengan Ahmad Subardjo. Dan, ketika secara ideologis berbeda, maka ambisi-ambisi politik, kepentingan politik berbeda pula dalam politik praktisnya, maka menjadi wajar ketika Ahmad Subardjo tidak memberikan surat testamen politik tersebut kepada Sjahrir dan Wongsonegoro.

Selain itu pula, adanya ketidakserasian antara wakil Presiden Mohammad Hatta (sebagai pengusul Sjahrir sebagai penerima testamen politik tersebut) dengan Ahmad Subardjo, padahal mereka adalah kawan-kawan seperjuangan dalam Perhimpunan Indonesia (PI). Menurut catatan Mohammad Hatta, menjelang akhir Agustus 1945, Mohammad Hatta sakit dan di rawat di rumah sakit Pusat (kini Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo), ketika Mohammad Hatta sakit, bersamaan pula diselenggarakan sidang kabinet yang memutuskan agar Presiden dan Wakil Presiden berpindah ke pedalaman untuk menjaga keselamatan, dan agar di Jakarta di bentuk suatu “diktatur perjuangan” yang terdiri dari Ahmad Subardjo, Iwa Kusumasumantri, dan Gatot Tanumihardja. Mohammad Hatta, yang diceritakan oleh Presiden Soekarno tentang keputusan kabinet itu tidak menyetujuinya (Poeze, 2008:72).

Mohammad Hatta berpendapat, belum saatnya untuk pindah ke pedalaman. Oleh sebab itu, dalam rapat kabinet berikutnya, Mohammad Hatta meminta agar keputusan sebelumnya di ubah, secara otomatis soal “diktatur perjuangan” batal, dan mayoritas semua anggota kabinet menyetujui pendirian Mohammad Hatta, kecuali Ahmad Subardjo dan Iwa Kusumasumantri. Jika hal ini dikatkan dengan testamen politik, Mohammad Hatta kemudian jauh berpikir akan kemungkinan testamen politik tersebut, perwujudannya barangkali mengganti Soekarno dan Mohammad Hatta dengan Tan Malaka (Noer, 1990:268).

Maka, kurang begitu masuk akal, apabila testamen politik yang seharusnya diberikan kepada Sjahrir dan Wongsonegoro tidak disampaikan oleh Ahmad Subardjo dengan dalih bahwa keadaan saat itu tidak aman. Ada faktor-faktor lain yang menyebabkan tidak disampaikannya testamen politik tersebut kepada Sjahrir dan Wongsonegoro yaitu perbedaan secara ideologi dan kepentingan politik. Interpretasi ini sekaligus mendukung apa yang di uraikan oleh Poeze (2008:62) bahwa alasan Soebardjo tidak menyampaikan testamen tersebut kepada Sjahrir dan Wongsonegoro bukan karena keadaan yang tidak memungkinkan, namun hanya karena ketidakmauan saja.

Terlepas dari hal tersebut, dengan demikian, hal yang menjadi pokok penting dan duduk permasalahan dalam surat testamen politik tersebut, adalah

peran penting dari Mohammad Hatta yang menolak adanya pewarisan tongkat estafet revolusi kepada satu orang saja. Agar supaya lebih demokratis, Mohammad Hatta mengusulkan agar ditambah Sjahrir, Iwa Kusumasumantri, dan Wongsonegoro sebagai representasi dari setiap aliran yang ada saat itu.

Mohammad Hatta menolak pewarisan revolusi melalui surat testamen tersebut hanya kepada Tan Malaka saja. Testamen politik ini sekurang-kurangnya dalam pandangan Mohammad Hatta adalah suatu pengimplementasikan *democratisch centralisme* oleh Soekarno. Karena, jika memang benar-benar terjadi revolusi itu harus diwariskan kepada Tan Malaka saja (Soekarno dan Mohammad Hatta ditangkap) praktis kepemimpinan revolusi dilanjutkan dan tersentralisasi kepada Tan Malaka saja. Oleh karenanya, hal tersebut ditolak oleh Mohammad Hatta dan menambahkan pewaris testamen tersebut untuk mencegah atau sekurang-kurangnya menghilangkan kekhawatiran terjadinya sentralisasi kekuasaan (*democratisch centralisme*).

Hal ini tidak lepas dari gagasan dasar pemikiran Mohammad Hatta yang sangat menolak sentralisasi kekuasaan (*democratie centralism*) dan menghormati keanekaragaman aliran-aliran di dalam masyarakat. Hal ini memang benar, ketika kita melihat ke belakang, Mohammad Hatta mengkritik Partai Nasional Indonesia ketika saat kehilangan sosok pemimpin pasca Soekarno dan pemimpin lainnya ditangkap oleh pihak kolonial Belanda. PNI tersebut mengalami suatu dekadensi dan kelesuan, dan Mohammad Hatta menganggap bahwa PNI kekurangan pemimpin-pemimpin eselon ke dua, ketiga dan seterusnya yang menyebabkan partai tersebut menjadi terpecah belah dan terpolarisasi. Oleh karena dari itu, Mohammad Hatta sebagai sosok yang demokratis mengusulkan penambahan penerima testamen tersebut. Hal ini sudah barang tentu ia lakukan sebagai bentuk manifestasi dari gagasan-gagasan pemikiran Mohammad Hatta yang menghormati pluralitas dan keanekaragaman aliran yang ada di masyarakat.

Pada perkembangan selanjutnya, testamen politik tersebut terjadi kesimpangsiuran karena keberadaannya tidak jelas dengan keluarnya versi yang berbeda. Menurut Kahin, bukan Soekarno yang memprakarsai testamen tersebut, tetapi Tan Malaka dan setelah ia mendapatkan surat wasiat politik itu, Tan Malaka

menyebutkan bahwa Soekarno dan Hatta menyerahkan seluruh kekuasaan mereka kepada dirinya apabila Soekarno dan Hatta tidak mampu menjalankan kekuasaannya, serta memalsukan tanda tangan keduanya.

Berdasarkan surat tersebut, Tan Malaka berkeliling ke seluruh Jawa dan mengatakan bahwa Soekarno dan Hatta telah ditawan oleh Inggris, dan tidak bisa meninggalkan Jakarta. Oleh karena mereka sebagai tawanan, maka menjadi tugas Tan Malaka untuk mengambil alih kekuasaan sesuai testamen tersebut. Penyebaran kabar angin oleh Tan Malaka itu, mendorong Soekarno melakukan perjalanan propaganda untuk memperlihatkan dirinya tidak menjadi tawanan Inggris, dan bahwa pemerintahan telah dipindah ke Yogyakarta.

Mungkin agak berlebihan juga, Kahin mengatakan bahwa perpindahan pemerintahan dari Jakarta ke Yogya salah satu penyebabnya kemungkinan Soekarno dan Hatta akan dibunuh oleh kelompok Tan Malaka (2013:217-218). Hal ini mendapat kritik dari Poeze (2008:66), bahwa pendapat Kahin itu tidak bisa diterima, pemalsuan dokumen testamen tersebut menurut Poeze adalah dari pendukung Tan Malaka yang heterogen dan berniat mengotorkan atau merusak citra Tan Malaka, bukan dari Tan Malaka sendiri. Mohammad Hatta mengatakan pemalsuan dokumen testamen politik tersebut adalah dilakukan oleh Chairul Saleh. Hal ini didasarkan pada hasil pemeriksaan dinas penyelidikan sipil dan militer Belanda (Noer, 1990:271 dan Adam, 2006:6; dan Alfarizi, 2012:159). Kemudian, persoalan masalah “siapa yang memprakarsai surat testamen” tersebut, Poeze juga tidak menerima pendapatnya Kahin. Poeze mengatakan bahwa “ia mengenal sosok Tan Malaka, Tan Malaka adalah sosok yang tidak mempunyai filsafat *‘het doel heiligt de middelen* (menghalalkan segala cara).

Tan Malaka dalam kehidupan sehari-hari menjaga benar kesucian batinnya, suka bicara terus terang. Dan, kalau tidak dapat, lebih baik diam. Tidak suka membohong, apalagi fitnah. Berani hidup menderita, sanggup memberikan segala pengorbanan dan tidak ada ambisi pribadi (2008: 66-68). Dari pernyataan Poeze ini, rasanya sedikit sulit untuk mengaitkan sifat Tan Malaka ini dengan apa yang di ilustrasikan oleh Kahin sebelumnya, hal ini pula didukung oleh pernyataan dari Sayuti Melik (Priyadi, 1986:43) bahwa Tan Malaka tidak pernah

meminta testamen politik, semuanya itu terjadi sama sekali adalah dari prakarsa Presiden Soekarno.

Pada perkembangan selanjutnya, berita tentang testamen itu mencuat kembali karena berada di tangan pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) Aidit di tahun 1960, meskipun Tan Malaka telah meninggal di tahun 1949. Naskah testamen itu berada di tangan Aidit beserta naskah proklamasi kemerdekaan. Sayuti Melik (1986:44-45) menjelaskan bahwa Aidit mendapat dua naskah tersebut dari bekas Sekretaris dan ketua Angkatan Komunis Muda (Akoma) yakni Ibnu Parna.

Ketua Akoma tersebut, Ibnu Parna terkenal dekat kepada Tan Malaka, dan Malik mengatakan bahwa naskah testamen tersebut langsung diperoleh berasal dari Tan Malaka. Oleh Aidit, kedua naskah tersebut yakni naskah Proklamasi kemerdekaan dan naskah testamen politik di sampaikan kepada Presiden Soekarno agar dibakar, namun yang dibakar oleh Soekarno hanya naskah testamen saja.

Lagi pula, menurut Loebis tidak terlalu mempermasalahkan surat tetamen tersebut. Surat testamen tersebut adalah suatu bagian kecil dari revolusi agar tetap berjalan dan “bahwa surat wasiat yang diberikan kepada Tan Malaka itu hanyalah berarti jika perjuangan dan pimpinan pemerintahan tetap berada di tangan Presiden Soekarno sebagai seorang presiden eksekutif. Tetapi, setelah terjadi sistem pemerintahan Parlementer, dan kekuasaan tidak lagi berada di tangan Soekarno menjadi kekuasaan Perdana Menteri Sjahrir, artinya surat testamen politik tersebut sejatinya sudah tidak berlaku lagi (1992:167-168). Penulis setuju dengan apa yang dikatakan oleh Loebis tersebut, karena kekuasaan eksekutif berpindah kepada Sjahrir maka secara konstitusi testamen politik tersebut sudah tidak relevan dan tidak berlaku lagi.

Hal ini, didukung oleh pendapat dari Poeze yang mempunyai perspektif hampir sama dengan pendapat Loebis (2008:64), namun sedikit agak berbeda. Ia mengatakan bahwa “esensi dari testamen politik tersebut adalah jika terjadi penahanan atau penangkapan terhadap Soekarno dan Mohammad Hatta, maka revolusi itu diteruskan oleh Tan Malaka dan penerima yang lain, namun begitu,

tentang penahanan atau penangkapan tersebut sama sekali tidak terjadi. Perihal ini dipastikan pada tanggal 29 September 1945, pada pendaratan pasukan Inggris pertama disertai dengan pernyataan panglima mereka, yakni Letnan Jenderal Christison yang mengatakan bahwa “Inggris tidak bermaksud untuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, tapi hanya hendak menegakkan hukum dan ketertiban”. Dengan demikian, testemen tersebut sudah tidak relevan lagi.

5.1.3 Persetujuan Perjanjian Linggajati

Pada saat revolusi kemerdekaan Indonesia, dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, berbagai upaya strategi dilaksanakan. Strategi dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut dapat digolongkan menjadi dua yakni strategi melalui militer atau pertempuran dan strategi diplomasi atau melalui jalur perundingan. Khususnya upaya diplomasi, telah banyak dilakukan oleh Indonesia sejak tahun 1945 seperti salah satunya yakni perjanjian Linggajati, Renville, dan Konferensi Meja Bundar (KMB). Dari perjanjian-perjanjian tersebut yang menjadi fokus kajian dalam sub bab pembahasan ini yang terkait perilaku politik Mohammad Hatta yakni mengenai perjanjian Linggajati.

Perjanjian Linggajati dilakukan antara Indonesia dengan Belanda yang dianggap sebagai suatu penyelesaian akhir antara negeri Belanda dan Republik Indonesia pada 15 November 1946 yang bertempat di Linggajati, sebelah selatan Cirebon, Jawa Barat (Kahin, 2013:274). Delegasi Indonesia dalam perundingan Linggajati ini di wakili langsung oleh Perdana Menteri Sjahrir yang di lantik kembali sebagai perdana Menteri ke tiga kali pada 2 Oktober 1946 oleh Presiden Soekarno, sedangkan dari pihak Belanda, diwakili oleh Wilhelm Schermerhorn (Hatta, 2011:137-138). Perundingan yang dilakukan antara Indonesia dan pihak Belanda ini menghasilkan beberapa persetujuan yang tersusun sebagai naskah Linggajati yang terdiri atas 17 Pasal. Naskah ini kemudian diparaf oleh kedua belah pihak untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah masing-masing. Pada tanggal 15 Nopember 1946 naskah Linggajati diparaf di Jakarta, sedangkan pada tanggal 20 Oktober 1946, *Tweede Kamer* (Parlemen Belanda) di negeri Belanda menyetujui perjanjian tersebut (Hatta, 2011:139).

Isi naskah perjanjian Linggajati yang telah dicapai oleh pemerintah Indonesia dengan Belanda secara garis besar antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan *de facto* Republik Indonesia atas Jawa dan Sumatera;
2. Pemerintah Indonesia dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negaraberdasarkan federasi, yang dinamai Negara Indonesia Serikat (NIS);
3. Pemerintah NIS akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia-Belanda (Poeponegoro dan Notosusanto, 2008:212 dan Kahin 2013:275).

Isi perundingan Linggajati ini yang merupakan suatu kompromi Indonesia dengan Belanda, secara garis besar dari pasal-pasal hasil perundingan dirasa sangat merugikan Indonesia dan bertentangan sama sekali dengan semangat perjuangan rakyat (Malik, 1984:176). Maka tidak mengherankan, setelah perundingan tersebut menghasilkan suatu persetujuan sebagaimana yang disebutkan di atas, perjanjian ini menimbulkan berbagai macam tanggapan dari masyarakat Indonesia. Khususnya kritik yang cukup tajam pada sebagian kalangan masyarakat yang tidak dapat menerima perundingan tersebut yang pada gilirannya memunculkan pertentangan dalam dalam masyarakat Indonesia, khususnya internal KNIP saat itu.

Pro dan kontra terkait perjanjian ini telah menjadikan kekuatan Republik Indonesia yakni internal KNIP terbagi menjadi dua front yang mulai saling menjatuhkan. Kedua front tersebut yakni kelompok atau partai-partai pendukung pemerintah yang setuju akan perjanjian Linggajati yakni Partai Sosialis, Pesindo, Partai Buruh, Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia, Partai Kristen Indonesia, dan partai lainnya yang mana front pendukung pemerintah ini disebut sebagai aliran “Sayap Kiri”. Sementara itu, kelompok atau partai-partai yang menolak hasil perjanjian ini yakni antara lain PNI, Masyumi, Angkatan Komunis Muda (Akoma), dan Partai Rakyat Indonesia yang disebut sebagai aliran “Benteng Republik” (Malik, 1984:176). Perimbangan kekuatan antar sayap kiri dan benteng republik ini dikatakan hampir sama dan pertentangan pendapat mengenai pro dan

kontra mengenai naskah perjanjian Linggajati ini terus berlangsung antara golongan sayap kiri sebagai golongan yang menolak dengan golongan Benteng Republik sebagai golongan pendukung pemerintah.

Persetujuan Linggajati ini perlu mendapat ratifikasi parlemen (dalam hal ini KNIP sebagai parlemen), maka untuk menyelesaikan permasalahan perjanjian Linggajati ini, KNIP bersidang di Malang pada tanggal 25 Februari 1947 – 5 Maret 1947. Pada hari-hari sebelumnya, karena dalam internal KNIP terjadi kebuntuan terkait pro dan kontra perjanjian Linggajati ini, pemerintah bertindak untuk mengubah perimbangan kekuatan di dalam KNIP agar supaya cenderung kepada sikap “pro” Linggajati. Pada bulan Desember 1946, dikeluarkan Peraturan Presiden No.6/1946 yang bertujuan untuk menambah anggota KNIP (*Soeara Merdeka*, 3 Desember 1946 dalam Poeponegoro dan Notosusanto, 2008:213). Peraturan Presiden No.6 ini menggariskan pembebasan para pejabat negara yang aktif sebagai anggota KNIP, seruan kepada partai-partai politik besar untuk memilih calon-calonnya sejumlah dua kali lipat jumlah hak perwakilan mereka dalam KNIP, serta penambahan wakil-wakil dari daerah luar yakni Jawa dan Madura (*Soeara Merdeka*, 4 Januari 1947 dalam Poeponegoro dan Notosusanto, 2008:212).

Peraturan Presiden No.6/1946 ini secara otomatis menambah keanggotaan KNIP dari jumlah 200 menjadi 514 orang yang di atur sedemikian rupa sehingga kekuatan-kekuatan partai yang mendukung kebijakan pemerintah menjadi lebih besar dengan tujuan agar KNIP dapat meratifikasi perjanjian Linggajati (Malik, 1984;176). Perubahan akibat Perpres ini ditentang keras oleh anggota BP-KNIP khususnya aliran Benteng Republik yang menganggap bahwa dikeluarkannya Perpres ini dilakukan tanpa berunding lebih dahulu dengan Badan Pekerja (BP). Badan Pekerja berpendapat bahwa Perpres itu tidak sah, karena setelah ada kabinet, Presiden tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat legislatif, lagipula dalam Perpres itu dikeluarkan tanpa perundingan dengan BP terlebih dahulu sehingga ada kesan bahwa Perpres itu untuk “menggolkan” perjanjian Linggajati (Noer, 1990:294).

Badan Pekerja mengkritisi perihal kekuasaan Presiden dalam mengeluarkan Perpres No.6/1946 ini yang tidak didasarkan pada persetujuan MPR *ad interim* (sementara) atau BPKNIP (Kahin, 2013:284). Maka sidang Pleno KNIP dilaksanakan di Malang pada tanggal 25 Februari 1947 – 5 Maret 1947 untuk merundingkan Peraturan Presiden No.6/1946 tersebut. Terjadi perdebatan yang sangat alot terkait Perpres tersebut, khususnya PNI dan Masyumi yang menuduh bahwa Perpres yang berimplikasi kepada penambahan anggota KNIP itu adalah bertujuan untuk meratifikasi perjanjian Linggajati (Hatta, 2011:140).

Saat keadaan genting dan macet tersebut, wakil Presiden Mohammad Hatta dalam pidatonya yang berapi-api mempertahankan Peraturan Presiden No.6/1946 tersebut, ia menyatakan bahwa bila KNIP mendukung keputusan BPKNIP dan menolak Peraturan Presiden No.6/1946, maka tidak ada jalan lain bagi Presiden dan wakil Presiden selain meletakkan jabatan (Malik, 1984:177) (Lihat Gambar 5, lampiran E, halaman 142). Mohamad Hatta mengatakan:

“...bilamana tidak puas dengan pimpinan Presiden dan wakil Presiden hendaknya mencari Presiden dan wakil Presiden yang baru. Tuduhan. . . itu adalah yang terberat yang ditujukan kepada Kepala Negara. Hendaknya diketahui bahwa dengan susunan Komite Nasional lama naskah perjanjian Linggajati itu sudah “goal”, karena imbangan kontra dan pro ialah sedikit-dikitnya 104 melawan 151” (Noer, 1990:295).

Mohammad Hatta memberikan satu-satunya alternatif yaitu adalah pembubaran KNIP. Reaksi KNIP terhadap pidato Mohamad Hatta tidak diragukan lagi, setelah pidato banyak anggota yang bersedia mendukung Perpres itu dengan ditariknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berisi penentangan atas Perpres tersebut. Dampak dari pidato Mohammad Hatta untuk mempertahankan Perpres No.6/1946 tersebut berhasil dengan adanya dukungan KNIP terhadap Perpres itu dan Badan Pekerja menarik kembali sikap oposisi mereka (Kahin, 2013:285).

Pidato yang dilakukan oleh Mohamad Hatta tersebut dilakukan tanpa teks, dan tampaknya memang sengaja ia tampilkan (dan bukan Soekarno yang hadir saat itu) untuk menghadapi golongan oposisi terkait Perpres tersebut. Parada Harahap (seorang jurnalis dan mantan anggota BPUPKI yang berasal dari Batak)

dalam autobiografinya Mohammad Hatta mengatakan bahwa “belum pernah sebelum ini Mohammad Hatta menyampaikan pidato sehebat ini”.

“...terperanjat karena ketegasan Bung sehingga banyak wartawan yang tidak mencatat. Banyak sekarang yang meminta teks pidato Bung. Hatta menjawab, aku berpidato tidak memakai teks, barangkali stenografi kita yang bertugas mencatat pidatoku. Harahap menjawab, “tiada yang mencatat Bung”. Mereka semuanya terpelongo mendengar Bung berbicara tegas. Banyak wartawan yang membenarkan pendapatku bahwa pidato Bung Hatta itu adalah suatu pidato yang bersejarah” (Hatta, 2011:141).

Akhirnya sidang menerima peraturan Presiden tersebut, dan pada tanggal 28 Februari 1947 dilantik sejumlah 232 anggota baru KNIP. Dengan penambahan suara itu, pemerintah berhasil memperoleh dukungan dari KNIP untuk meratifikasi perjanjian Linggarjati. Pada tanggal 25 Maret 1947 naskah persetujuan ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda Istana Merdeka, Jakarta (Hatta, 2011:143).

Secara faktor *ekstern*, perjanjian Linggajati ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya untuk mencari dukungan Internasional. Saat itu, pemerintah Inggris yang bertugas atas nama Sekutu ingin secepatnya melepaskan dan meninggalkan diri dari kesulitan pelaksanaan tugasnya di Indonesia. Pemerintah Inggris mengirimkan surat kepada Belanda bahwa menjelang akhir 1946, pasukan Inggris akan mulai ditarik mundur, dan mendesak Belanda untuk mengadakan perjanjian dengan Republik Indonesia.

Desakan dari Inggris, ditambah dengan orang-orang Belanda yang progresif yang bersedia membuat kompromi-kompromi nyata sesuai dengan sudut pandang Indonesia, membuat pemerintah Belanda mengirimkan Willem Schermerhorn (pemimpin partai buruh Belanda) ke Indonesia. Kedatangan Willem Schermerhorn ini ke Indonesia untuk merintis suatu perundingan dengan Indonesia yakni yang dikenal dengan “Perjanjian Linggajati” (Hatta, 2011:138-139 dan Kahin, 2013:274). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hasil dari perjanjian Linggajati ini sekurang-kurangnya dinilai sangat merugikan kepada pihak Indonesia, sehingga tidak mengherankan, proses untuk meratifikasi perjanjian ini di dalam parlemen menuai pro dan kontra yang sangat tajam.

Polemik tentang Perpres No.6/1946 terkait penambahan anggota di dalam internal KNIP (yang mempunyai tujuan penambahan anggota ini untuk meratifikasi perjanjian Linggajati) dirasa tidak menemukan jalan keluar, maka sosok Hatta dengan pidatonya yang berapi-api mempertahankan Perpres ini yang membuat anggota KNIP menyetujui Perpres No.6/1946. Sehingga pada tanggal 2 Maret 1947 KNIP (dengan anggota-anggota yang baru) telah dapat bersidang dan meratifikasi perjanjian Linggajati (Noer, 1990:295). Meskipun pada perkembangan selanjutnya perjanjian Linggajati ini dianggap gagal karena Belanda melancarkan aksi militernya pada 21 Juli 1947, namun yang menjadi duduk permasalahannya disini adalah sosok Hatta sebagai sosok penting terlahirnya perjanjian Linggajati ini.

Di lihat secara perspektif situasi dan kondisi *ekstern* saat itu memang jalur perundingan dibutuhkan dalam rangka mencari pengakuan Internasional, namun begitu jika persoalan tersebut dilihat dari perspektif faktor *intern*, kiranya tidak jauh dari kenyataannya hal ini merupakan salah satu perwujudan atau setidaknya tidaknya pengaruh dari paham sosialisme demokrasi yang di anut oleh Mohamad Hatta. Seperti yang dikatakan oleh Surbakti, “sosialisme demokrasi” adalah sosialisme yang menaruh kepercayaan kepada demokrasi liberal dan bukan kepada revolusi, sebagai kekuatan bagi usaha perjuangan mewujudkan terciptanya masyarakat sosialis dan egalit yang tidak berkelas (1992:37-38). Kaum sosialis sangat percaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut adalah dengan jalan damai dan lebih demokratis (Ebenstein, 2014:308). Artinya dapat disimpulkan, bahwa sebagai seorang “sosialis demokrat”, Mohamad Hatta lebih cenderung memilih jalan perundingan atau diplomasi dalam rangka mewujudkan Indonesia merdeka dan masyarakat yang sosialis, dan akibat dari perundingan Linggajati tersebut Indonesia pada selanjutnya semakin banyak mendapat pengakuan Internasional.

Yaitu pada 17 April 1947, Inggris dan Amerika Serikat mengakui Republik Indonesia secara *de facto*, juga pada 1 Juni 1947 Mesir mengakui Republik Indonesia; dan berturut-turut pada 29 Juni 1947 yakni Lebanon, 2 Juli 1947 Suriah dan pada 16 Juli 1947 adalah Irak mengakui secara *de facto* Republik

Indonesia (Hatta, 2011:143-144). Hal ini pula semakin memperkuat posisi Indonesia di mata Internasional saat itu.

5.1.4 Rasionalisasi Militer

Pada 29 Januari 1948, Mohammad Hatta menjabat sebagai Perdana Menteri sekaligus merangkap sebagai wakil Presiden. Saat itu Presiden Soekarno menunjuk Mohammad Hatta sebagai formatur kabinet untuk menggantikan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri Sebelumnya. Maka terbentuklah suatu susunan kabinet, yakni sebagai berikut:

Perdana Menteri	: Mohammad Hatta
Menteri Luar Negeri	: H. Agus Salim
Menteri Dalam Negeri	: dr. Soekiman
Menteri Pertahanan	: Mohammad Hatta
Menteri Penerangan	: Mohammad Natsir
Menteri Keuangan	: MR. A.A Maramis
Menteri Kesehatan	: dr. Leimena
Menteri Perburuhan dan Sosial	: Dr. Mr. T.G. S Moelia
Menteri Kehakiman	: Mr. Susanto Tirtoprodjo
Menteri PP dan K	: Mr. Ali Sastroamidjojo
Menteri Kemakmuran	: Mr. Safrudin Prawiranegara
Menteri Pembagian	
Makanan Rakyat	: I.J Kasimo
Menteri Agama	: K.H Maskur
Menteri Negara	: Sultan Hamengku Buwono IX
Menteri Pembangunan dan Pemuda	: Supeno (Hatta, 2011:178-179)

Pada awal menjabat sebagai Perdana Menteri, Mohammad Hatta berusaha untuk menata kembali perekonomian yang masih mengalami kekacauan sebagai akibat dari perang kemerdekaan melawan pasukan Belanda. Hal ini yang berujung rusaknya sebagian besar infrastruktur-infrastruktur yang menunjang perekonomian Indonesia seperti bangunan-bangunan pabrik serta terjadi inflasi yang sangat tinggi. Kondisi yang terjadi tersebut membuat usaha-usaha yang

dilakukan pemerintah guna membangun kembali Indonesia dengan memperbaiki perekonomian terhambat.

Indonesia kehilangan daerah-daerah yang subur yang mampu menghasilkan padi secara berlebih seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, selain itu Indonesia juga kehilangan pabrik-pabrik tekstil yang dikuasai oleh Belanda (Hatta, 1951:15). Semua perusahaan dagang dan perkebunan-perkebunan yang menghasilkan pemasukan bagi kas negara, perlahan-lahan dapat diambil alih oleh pihak Belanda. Selain itu, pembiayaan yang cukup besar terhadap organisasi militer turut pula membuat kondisi perekonomian Indonesia semakin memburuk, karena saat itu, Indonesia sedang berusaha melakukan pembangunan akibat dari Agresi Militer Belanda.

Kabinet Presidensial yang dipimpin oleh Mohammad Hatta yang terbentuk saat itu dalam situasi-kondisi yang darurat dan secara langsung mengumumkan program kerja kabinetnya, yakni salah satunya menjalankan kebijakan rasionalisasi di bidang militer. Pemerintahan Mohammad Hatta berusaha melanjutkan program rasionalisasi karena sebagai bentuk upaya langkah meningkatkan efektifitas dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Melalui sidang kabinet, Mohammad Hatta beserta menteri-menterinya yang masuk dalam kabinetnya, membahas masalah yang terjadi di Indonesia dan berusaha merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi program kerjanya. Berikut kebijakan Mohammad Hatta yang ia kemukakan dalam sidang BPKNIP tanggal 2 September 1948:

1. Menyelenggarakan persetujuan Renville dan berunding terus atas dasar-dasar yang telah tercapai;
2. Mempercepat terbentuk Negara Indonesia Serikat;
3. Mengadakan rasionalisasi ke dalam;
4. Pembangunan (Hatta, 1951:6).

Dihadapan sidang BPKNIP pada tanggal 14 Februari 1948, Mohammad Hatta memberikan uraian mengenai kondisi Indonesia dan menjelaskan kebijakan yang menjadi program kabinetnya, salah satunya kebijakan rasionalisasi. Rasionalisasi adalah salah satu pokok program pemerintah yang bermaksud

mengadakan perbaikan dalam susunan negara dan alat negara serit mencapai sedikit perimbangan antara pendapat dan pengeluaran negara. Mohammad Hatta (1951:18) mengatakan bahwa pendapatan negara tidak dapat menutup ongkos hidup negara, hal ini tidak mengherankan, tetapi jarak antara kelebihan pengeluaran belanja dan pendapatan negara dapat dikurangkan dengan mengadakan rasionalisasi yang tepat.

Upaya-upaya untuk mengadakan rekonstruksi besar-besaran dari aparat pertahanan sebenarnya sudah dimulai dalam bulan Desember 1947, yakni menghendaki agar kekuatan tentara dikurangi dan agar kaum veteran diberi pekerjaan produktif dan pekerjaan lainnya dalam pemerintahan (Sundhausen, 1986:64). Artinya upaya rasionalisasi ini tidak langsung memberhentikan begitu saja tentara yang diberhentikan, namun dipindahkan kepada beberapa instansi pemerintahan yang lain dan usaha-usaha lain yang produktif. Mohammad Hatta (1951:18) mengatakan:

“...bahwa pengeluaran uang tidak dapat dikurangkan sekaligus, malahan mungkin bertambah berhubung dengan mendjalankan rasionalisasi militer yakni dengan memindahkan tenaga-tenaga dari pekerdjaan jang improduktif kepada usaha jang produktif, jang menghendaki adanja pembangunan objek-objek baru. Jumlah angkatan perang jang sangat banjak tidak dapat dibelandjai oleh negara. Dengan mengurangkan djumlah angkatan perang kita tidak bermaksud akan melemahkan pertahanan negara, malahan untuk memperkuatnja. Kekuatan tentara tidak terutama bergantung kepada banjak djumlahnja, malahan kepada efektif susunnja, baik moreelnja dan disiplinja, dan tjukup perlengkapannja. Semuanja ini bisa ditjapai dengan mengurangkan djumlah angkatan perang kita sampai kepada susunan jang rasionil”. (Hatta, 1951:18).

Kebijakan rasionalisasi militer ini adalah usaha pemerintah untuk menciptakan organisasi militer yang profesional. Pemerintah menganggap jumlah kesatuan-kesatuan militer yang ada, dirasakan sangat tidak efektif dalam usaha berjuang mempertahankan kemerdekaan. Organisasi dan kekuatan TNI harus diperkecil dan disederhanakan supaya lebih efektif sesuai dengan keadaan dan posisi Republik Indonesia pada masa itu. Nasution (1968:130) mengungkapkan, selain wilayah geografis daerah Republik Indonesia yang semakin sempit,

penderitaan sosial dan ekonomi yang menjadi faktor penting. Negara dan masyarakat sudah tidak mungkin lagi harus membiayai terus-menerus kurang lebih 350.000 tentara dan ditambah 470.000 tentara laskar biro perjuangan.

Program kebijakan rasionalisasi militer pemerintahan Perdana Menteri Mohamad Hatta menimbulkan banyak pertentangan di dalam tubuh organisasi militer, Tentara Nasional Indonesia (TNI) hal ini disebabkan adanya pemahaman-pemahaman yang salah dan adanya provokasi dari pihak yang menentang, yang bertujuan menggagalkan usaha-usaha pemerintah dalam menjalankan program rasionalisasi, seperti suatu pemahaman yang menganggap rasionalisasi adalah penghematan dengan mengabaikan jasa-jasa para tentara, hal ini berdampak akan berkurangnya nilai-nilai pertahanan dan langkah rasionalisasi dianggap sebagai usaha menggabungkannya dengan tentara federal Belanda.

Usaha pemerintah melakukan rasionalisasi untuk menempatkan para tentara yang lebih berpengalaman dan memiliki kewibawaan, dengan pengalaman yang dimiliki oleh para tentara maka strategi pertahanan yang lebih efektif dan efisien dapat diwujudkan dan supaya organisasi militer Indonesia lebih kuat dalam menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi (Hatta, 1951:20). Kementerian Pembangunan dan Pemuda kemudian dibentuk oleh pemerintah untuk menampung dan menunjang anggota-anggota yang terkena rasionalisasi, di samping itu untuk menindaklanjuti kebijakan rasionalisasi, Mohammad Hatta menjalankan (3) tiga kebijakan untuk memobilisasi para tentara yang terkena rasionalisasi, antara lain:

1. Melepaskan mereka yang sukarela mau meninggalkan tentara, diantaranya adalah yang ingin kembali pada pekerjaannya yang lama sebagai guru, sebagai partikelir dan lain sebagainya;
2. Menyerahkan mereka kepada kementerian pembangunan dan pemuda yang menyiapkan objek-objek usaha bagi mereka;
3. Mengembalikan seratus ribu (100.000) tentara kembali ke dalam masyarakat desa (Hatta, 1951:22).

Usaha menampung dan menunjang anggota-anggota yang akan terkena rasionalisasi itu, diadakanlah kementerian Pembangunan dan Pemuda yang

dipimpin oleh Supeno. Untuk keperluan tersebut dikeluarkan penetapan pemerintah no.3 yang mengatur tentang penempatan tenaga dan tunjangan kepada bekas tentara setelah dirasionalisasi, dan untuk keperluan penyelesaian rasionalisasi angkatan perang, maka para anggota tentara yang diberhentikan dari jabatannya karena rasionalisasi itu sebagian dikembalikan ke desanya masing-masing dan ada juga yang dipekerjakan di perusahaan-perusahaan yang diselenggarakan oleh kementerian pembangunan dan pemuda.

Para tentara yang langsung dikembalikan ke desanya masing-masing diberi tunjangan untuk sekaligus dan satu kali saja sebesar 6 (enam) kali jumlah gaji pokok sebulannya dengan pembatasan, sekurang-kurangnya Rp.300,- (tiga ratus rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 1500,- (seribu lima ratus rupiah) (Nasution, 1978:131-132). Membentuk organisasi militer yang profesional sangat penting dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Pemerintah dalam hal ini mewujudkan organisasi militer yang profesional melakukan pembenahan terhadap struktur organisasi militer dan mengurangi jumlah anggota tentara, khususnya di daerah Jawa.

Reorganisasi dalam tubuh organisasi militer dimaksudkan untuk merubah susunan struktur organisasi militer, yang sebelumnya angkatan perang yang ada, seakan berdiri sendiri, seperti Angkatan Darat, Laut dan Udara. Pemerintah dengan program rasionalisasi berusaha menempatkan para tentara yang berpengalaman dalam bidang militer di dalam tubuh struktur organisasi, agar koordinasi antara pimpinan militer dan prajurit dapat terlaksana dengan baik.

Mohammad Hatta dengan berani mengambil kebijakan ini mengingat kondisi Indonesia saat itu terlalu banyak pengeluaran kas negara khususnya di bidang militer. Kondisi militer Indonesia saat itu bisa dikatakan tidak efektif dan efisien untuk dapat dikatakan sebagai tentara profesional karena jumlah anggota yang sangat banyak (Nasution, 1968:130). Kebijakan rasionalisasi militer ini memang tidak lepas dari faktor situasi kondisi eksternal Indonesia saat itu yang mengalami suatu krisis khususnya dari gempuran Belanda yang ingin tetap berkuasa kembali di Indonesia dan situasi kondisi ekonomi yang secepat mungkin harus dibenahi agar tidak terjadi inflasi.

5.2 Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1956

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat (RIS) resmi dinyatakan menjadi negara kesatuan kembali. RIS adalah lahir dari hasil kompromi antara RI dan negara-negara federal ciptaan Belanda yang dicapai dalam Konferensi Inter-Indonesia dan dilanjutkan dalam KMB. Ini merupakan kompromi antar elite politik, akan tetapi rakyat di negara-negara federal yang sejak akhir tahun 1949 menjadi negara bagian RIS tetap menghendaki bentuk negara kesatuan (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008:304). Pada saat diterapkan demokrasi Liberal tersebut, Mohammad Hatta terpilih kembali sebagai wakil Presiden oleh DPR pada tanggal 14 Oktober 1950. Sejak itu, Mohammad Hatta menjadi wakil Presiden negara yang konstitusional, ia tidak aktif dalam pemerintahan (Noer, 1990:409).

5.2.1 Mengundurkan diri Sebagai Wakil Presiden

Pelaksanaan demokrasi liberal antara tahun 1950-1959 di Indonesia, saat itu sering terjadi jatuh bangun kabinet dalam periode tersebut, hal ini disebabkan karena kondisi pemerintahan yang stabil tidak pernah dicapai sehingga seringkali kabinet baru yang berdiri menyerahkan mandatnya untuk di bentuk kabinet yang lain (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008:301-418).

Pada tanggal 29 Juli 1955, kabinet Ali-Wongso meyerahkan mandatnya kepada wakil Presiden Mohammad Hatta dan selanjutnya Mohammad Hatta menunjuk formatur yang bertugas untuk membentuk kabinet baru. Akhirnya, Burhanuddin Harahap berhasil membentuk kabinet baru yang terdiri dari 23 menteri. Kabinet ini mempunyai tugas utama yakni: *pertama* mengembalikan kewibawaan pemerintah, yakni mengembalikan kepercayaan angkatan darat dan masyarakat kepada pemerintah; *kedua* melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru (Peosponegoro dan Notosusanto, 2008:316). Seperti yang telah disebutkan, tugas kabinet Burhanuddin Harahap yakni melaksanakan pemilihan umum terlaksana pada tanggal 29 September 1955, terselenggaranya pemilihan umum tersebut adalah yang pertama kali di Indonesia.

Hasil pemilihan umum pertama ini, dimenangkan oleh empat partai secara berturut yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI, beserta partai-partai lainnya yang mendapatkan suara lebih kecil dari partai tersebut. Selain pemilihan umum pada tanggal 29 September 1955 tersebut, tanggal 15 Desember dilaksanakan pula pemilihan umum untuk memilih Konstituante (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008:321; dan Ricklefs, 2005:496). Akhirnya, pada tahun 1955, telah terpilih keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mayoritas adalah wakil dari partai politik pemenang pemilihan umum beserta juga pembentukan Konstituante. Konstituante adalah lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950.

Setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante tersusun, wakil Presiden Mohammad Hatta, pada tanggal 20 Juli 1956, resmi mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terbentuk sebagai hasil dari pemilihan umum. Ini surat Mohammad Hatta yang ditujukan kepada DPR tersebut, adalah berisi pengunduran dirinya sebagai wakil Presiden Indonesia. Namun, DPR tidak menanggapi isi surat tersebut. Hatta mengatakan dalam pokok surat itu:

...,”setelah DPR yang dipilih rakyat mulai bekerja dan Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai wakil Presiden Republik Indonesia. Segera, Konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan itu secara resmi. Saat itu saya pilih, karena sesuai dengan penerimaan saya dahulu waktu diminta menjadi wakil Presiden kembali, yang menurut dugaan saya di waktu itu jabatan sementara ini tidak akan lebih lama dari setahun dua tahun (Noer, 1990:482).

Dari surat tersebut yang ditujukan kepada DPR, artinya, Mohammad Hatta telah sebelumnya mengutarakan bahwa Mohammad Hatta ingin mengundurkan diri sejak terbentuknya DPR dan Konstituante hasil daripada pemilihan umum tersebut. Mohammad Hatta menganggap bahwa, sejak dahulu ia merasa tidak perlu jabatan Wakil Presiden dalam sistem kabinet Parlemerter (Noer, 1990:482). Namun, pemerintah tidak merespon surat yang berasal dari Mohammad Hatta tersebut.

Akhirnya, karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak merespon terkait pengunduran Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden, Mohammad Hatta langsung memberitahukan kepada Presiden Soekarno untuk mundur. Dan, secara resmi pada tanggal 1 Desember 1956 Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil Presiden Indonesia (Ricklefs, 2005:502). Mundurnya Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden, secara langsung membuat suatu kekagetan di dalam masyarakat, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal, ketika DPR ini menerima surat Mohammad Hatta tanggal 20 Juli, lembaga ini tidak bereaksi apa-apa.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya segera mengirim suatu delegasi yang terdiri dari lima orang untuk lebih memahami isi surat pengunduran diri Mohammad Hatta tersebut. Delegasi itu terdiri dari Arudji Kartawinata (PSII), K.H. Masjkur (NU), Hardi (PNI), Djaja Rachmat (Masjumi) dan P. Pardede (PKI). Dari delegasi tersebut, menyatakan bahwa DPR tidak rela dan sangat berat untuk menerima Mohammad Hatta mundur dari jabatannya. Namun, Mohammad Hatta tetap teguh dalam pendiriannya dan memilih mundur sebagai wakil Presiden karena berbagai alasan (Noer, 1990:484).

Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya, memang tidak bisa menolak apa yang menjadi keputusan dari Mohammad Hatta tersebut. Akhirnya, DPR mengeluarkan pernyataan secara resmi terkait pengunduran Mohammad Hatta tersebut. pernyataan tersebut yakni:

1. Menyatakan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa-jasa saudara Mohammad Hatta terhadap nusa dan bangsa;
2. Menyatakan kepercayaan bahwa saudara Mohammad Hatta akan tetap menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan rakyat dan negara (Noer, 1990:484-485).

Setelah tanggapan dari DPR tersebut, pada tanggal 5 Februari 1957, dengan keputusan No. 13/1957, Presiden Soekarno terhitung mulai 1 Desember 1956 memberhentikan Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden (Noer, 1990:485; Adam, 2003:270; lihat juga Budisantoso, 2002:338).

Pengunduran diri Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden turut mengundang penilaian dari beberapa ilmuwan. Salah satunya yakni Rauf (2002:116) yang berpendapat bahwa pengunduran diri Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden merupakan suatu puncak akumulasi dari beberapa konflik yang terjadi di antara Mohammad Hatta dengan Presiden Soekarno yang tidak bisa diselesaikan, sehingga Mohammad Hatta mengundurkan diri. Pendapat tersebut memandang bahwa pengunduran diri Mohammad Hatta itu berorientasi dan fokus kepada relasi antara Presiden Soekarno dengan wakil Presiden Mohammad Hatta saja yang memang sangat fluktuatif, dan memang menjadi suatu fakta umum, antara Soekarno dan Mohammad Hatta memiliki pertentangan secara prinsipil (meskipun tidak semua bidang mereka pertentangan sebagai dwitunggal).

Hal ini bisa diketahui pada sub bab pembahasan sebelumnya, secara implisit dan eksplisit telah memperlihatkan kepada kita bahwa selalu terjadi pertentangan yang prinsipil diantara Presiden Soekarno dengan wakil Presiden Mohammad Hatta seperti dalam peristiwa transformasi sistem pemerintahan dan naskah testamen politik Tan Malaka dan lebih jauh lagi, pertentangan-pertentangan yang terjadi sejak pada zaman pergerakan nasional. Namun tetapi, pertentangan-pertentangan yang ada di antara mereka itu (Soekarno-Hatta), mereka kesampingkan demi hal yang lebih penting yakni selama revolusi dan perjuangan kemerdekaan, khususnya ketika pendudukan Jepang, antara Soekarno dan Mohammad Hatta telah menyatukan tekad bersama dengan mengesampingkan pertentangan-pertentangan yang ada demi terwujudnya kemerdekaan Indonesia, dan sejak itu Soekarno dan Mohammad Hatta di istilahkan sebagai dwitunggal.

Hatta menjelaskan semangat dan praktek dwitunggal itu adalah suatu bentuk kebulatan suara tidak tertulis antara kami berdua (Soekarno-Hatta), yaitu, tekad kami bahwa dalam memimpin negara selama revolusi dan perjuangan kemerdekaan, kebijakan dan tindakan harus selalu ditentukan dengan suara bulat antara kami berdua (Hatta, 1981:137-138). Soekarno pun mengatakan hal yang sedemikian pula, di dalam autobiografinya, yakni ketika pertemuan dirinya dengan Mohammad Hatta, ia berkata “meski di satu waktu kita pernah tidak saling

menyukai, sekarang kita menghadapi suatu tugas yang jauh lebih besar daripada tugas yang pernah kita lakukan masing-masing. Berbagai perbedaan yang ada di antara kita tidak perlu ada lagi, sekarang kita satu. Bersatu di dalam perjuangan bersama”.

Lalu, kami pun berjabat tangan dengan sungguh-sungguh. “Inilah simbol kita sebagai dwitunggal. Kita berikrar dengan sungguh-sungguh untuk bekerja berdampingan, dan tidak akan pernah bisa dipisahkan sampai negeri kita merdeka sepenuhnya (Adams, 2014:209). Dari pernyataan antara kedua *The Founding Fathers* tersebut, secara tidak langsung agaknya telah memberikan suatu gambaran periodisasi kepada penulis bahwa rasanya tidak terlaui perlu (*a priori*) dalam pembahasan yang akan dibahas selanjutnya, mengkaji tentang pertentangan-pertentangan antara Soekarno dan Mohammad Hatta yang terjadi di zaman-zaman sebelumnya khususnya zaman pergerakan nasional. Sebab, mundurnya Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden adalah suatu rangkaian yang tidak bisa dilepaskan dari faktor pertentangannya dengan Soekarno yang terjadi pasca Indonesia merdeka, meskipun benih-benih pertentangan mereka itu telah ada sejak pergerakan nasional.

Tetapi, apakah hanya faktor pertentangan antara Mohammad Hatta dengan Soekarno sehingga Hatta mengundurkan diri sebagai wakil Presiden?. Terlepas dari itu, penulis mengungkapkan bahwa pendapat dari Rauf (2002:116) yang memandang bahwa pengunduran diri Mohammad Hatta itu, berorientasi dan fokus kepada relasi antara Presiden Soekarno dengan wakil Presiden Mohammad Hatta saja yang memang selalu berseberangan. Akan tetapi, terkecuali faktor itu, ada beberapa faktor-faktor lain yang turut membuat Mohammad Hatta menanggalkan jabatannya sebagai wakil Presiden. Faktor *eksternal* yang terjadi saat itu, yakni faktor instabilitas politik yang terjadi, jatuh bangun kabinet beserta program kabinet yang dinilai tidak sesuai target, perebutan kekuasaan antar partai politik yang menyebabkan keadaan ekonomi yang kacau dan keadaan sosial yang bergejolak di beberapa daerah turut menjadi faktor yang menyebabkan Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai wakil Presiden.

5.2.1.1 Mohammad Hatta Sebagai Wakil Presiden 1950-1956

Pada 17 Agustus 1950 Indonesia kembali kepada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan ini adalah hasil kesepakatan antara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Republik Indonesia sebagai negara bagian. Sebagai tindak lanjut kesepakatan itu dibentuklah panitia persiapan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan yang diketuai oleh Menteri Kehakiman RIS Supomo. Panitia ini membuat suatu rancangan UUD negara kesatuan yang akhirnya disetujui dan kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (Poepongoro dan Notosusanto, 2008:307). Soekarno dan Mohammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Mohammad Natsir dari Masyumi terpilih sebagai perdana Menteri pertama setelah Indonesia kembali ke bentuk kesatuan (Ricklefs, 2005:480).

Dari tahun 1950 sampai tahun 1955 sebelum pemilihan umum terlaksana, dalam pada waktu itu terdiri dari empat buah kabinet yang memerintah yakni Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951-April 1952), Kabinet Wilopo (April 1952-Juli 1953), dan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953-Agustus 1955) (Poepongoro dan Notosusanto, 2008:307-308). Dapat digambarkan bahwa, dalam waktu rata-rata satu tahun itu, tidak ada kabinet yang dapat melaksanakan programnya, karena parlemen terlalu sering menjatuhkan kabinet jika kelompok oposisi kuat. Bahkan, lebih dari itu, terjadi partai pemerintah menjatuhkan kabinetnya sendiri, hal inilah yang menyebabkan berkecamuknya instabilitas politik di dalam pemerintahan Parlemen yang implikasinya keadaan negara khususnya di bidang ekonomi semakin merosot.

Sebagai wakil Presiden Konstitusional, Mohammad Hatta tidak dapat berbuat banyak tentang masalah pembentukan dan program pemerintah kabinet. Mohammad Hatta tentu tidak aktif dalam mengatur pemerintahan, ia sangat menjaga kedudukannya dalam kabinet parlementer itu, sehingga paling banyak ia hanya mengemukakan nasihat atau anjuran, tetapi pelaksanaannya bergantung kepada pemerintah yang bersangkutan (Noer, 2012:128-129). Namun tetapi,

kebanyakan nasihat atau anjuran Mohammad Hatta kepada pemerintah kebanyakan tidak di perhitungkan dan dibiarkan begitu saja.

Hal ini pula yang menyebabkan kekecewaan Mohamad Hatta dengan pemerintahan yang ada, di satu sisi, instabilitas politik yang terjadi saat itu, turut memberikan beban moral kepada Mohamad Hatta karena posisinya sebagai pemerintah yakni wakil Presiden. Di satu sisi lainnya, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa yang terkekang oleh garis jabatannya sebagai wakil Presiden yang hanya sebagai simbol negara belaka pada saat dilaksanakannya demokrasi liberal (Hatta, 2008:92). Mohamad Hatta yang dikenal sebagai orang yang sangat patuh terhadap konstitusi, sehingga, kegiatan-kegiatan dirinya sebagai wakil Presiden, paling lebih hanya memberi nasehat, memberi masukan dan berupa teguran kepada pemerintah.

Beberapa peristiwa instabilitas politik yang turut membuat Mohammad Hatta kecewa terhadap pemerintah sehingga berimplikasi ia mundur sebagai wakil Presiden, tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang ada, yakni diantaranya:

Saat pemerintahan Kabinet Wilopo (April 1952 - Juli 1953) di bidang kepegawaian, Mohamad Hatta kecewa terhadap sistem kepegawaian di kementerian Luar Negeri saat itu yang dijabat oleh Mukarto. Hal ini didasarkan kepada pegawai-pegawai kementerian luar negeri yang yang dikirim ke luar negeri atas dasar pertimbangan sahabat atau kekeluargaan, bukan didasarkan atas giliran atau profesionalitas seseorang.

Padahal, menurut Mohammad Hatta, kementerian luar negeri yang kuat untuk menghadapi perwakilan asing harus didasarkan pada pergiliran, paling sedikit tiga tahun di suatu tempat, kemudian ditarik kembali ke Jakarta (Noer, 1990:411-412). Pada saat itu, pegawai-pegawai yang dikirim ke luar negeri bukan didasarkan atas profesionalitas karir, tetapi hanya didasarkan kepada ikatan persahabatan dan kekeluargaan ketika Mukarto menjabat sebagai menteri Luar Negeri. Mohammad Hatta (2008:96) mengatakan, menempatkan pegawai pada jabatan umum di dalam dan di luar negeri, orang lupa akan dasar tanggung jawab

beserta toleransi dalam demokrasi dan bukan didasarkan pada *“the right man in the right place”*.

Pada tahun yang sama dalam kepemimpinan kabinet Wilopo, Mohammad Hatta turut memberikan teguran pula kepada Perdana Menteri Wilopo, karena pihak kejaksaan agung saat itu memberi persetujuan kepada beberapa pihak bekas pejuang bersenjata untuk memperoleh lisensi ekspor dari kementerian perekonomian. Dukungan dari kejaksaan agung tersebut membuat Mohammad Hatta kecewa.

Mohammad Hatta mengatakan bahwa “badan yang seharusnya menjaga ketentuan negara, malah melanggar hukum secara konstitusi. Uang yang didapat dari pemberian lisensi tersebut, hanya akan diperuntukkan diri sendiri pegawai kejaksaan agung dan bukan untuk kas kejaksaan agung”. Mohammad Hatta dengan tegas meminta kepada Perdana Menteri Wilopo agar hal tersebut tidak terulang kembali (Noer, 1990:416).

Pada pemerintahan kabinet Ali I, Mohammad Hatta juga menegur keputusan kabinet Ali I yang dirasa tidak adil. Keputusan kabinet pada 1 Maret 1955 yang memberhentikan “tidak dengan hormat” Sosrodanukusumo sebagai kepala Jawatan Reserse Pusat kejaksaan Agung yang dianggap telah melakukan penyelundupan (Noer, 2002:73). Mohammad Hatta menganggap hal ini terlalu berat, dilakukan tanpa pertimbangan yang teliti dan yang bersangkutan tidak diberi kesempatan membela diri. Menurut Hatta, pemberhentian itu haruslah melalui prosedur: skors terlebih dahulu, kemudian menunggu hasil pemeriksaan jaksa agung. Terlebih pula, pemecatan secara tidak hormat berarti mencabut pensiunannya termasuk untuk anak isterinya.

Hatta mengungkapkan, bahwa (Sosrodanukusumo) telah berjasa dalam pertempuran melawan Agresi Militer Belanda ke II, bahkan puteranya tewas dalam pertempuran tersebut. Bahkan tidak itu saja, hal yang membuat kecewa Mohammad Hatta, ialah orang yang nyata bersalah dalam penyelundupan itu bisa naik pangkat, dan Presiden Soekarno tanpa mengetahui secara mendetail telah begitu saja menandatangani surat pemecatan Sosrodanukusumo tanpa membicarakan terlebih dahulu dengannya (Noer, 1990:414-415). Kekecewaan

dalam masalah kepegawaian ini dinilai oleh Mohammad Hatta sebagai suatu cermin lain dari perkembangan kepartaian yang tidak sehat.

Selain dalam masalah kepegawaian, masalah di bidang ekonomi turut pula membuat kecewa Mohammad Hatta. Khususnya dalam pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo (Juli 1953-Juli 1955) dari PNI yang lebih bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan mempertahankan kekuasaan (Ricklefs, 2005:489). Salah satunya, yakni kebijakan Menteri Iskaq Tjokroadisurjo yang dinggap memarat-maritkan ekonomi Indonesia saat itu.

Kebijakan yang menekankan Indonesiasi perekonomian dan memberi dorongan kepada para pengusaha pribumi. Akan tetapi, kenyataannya perusahaan-perusahaan baru itu hanya merupakan kedok-kedok palsu bagi persetujuan-persetujuan antara para pendukung pemerintah dan orang-orang Cina yang disebut perusahaan “Ali Baba”, dimana seorang Indonesia (“Ali”) dan pengusaha Cina (“Baba”) yang sebetulnya merupakan pemilik perusahaan tersebut (Ricklefs, 2005:489). Keputusan politik yang diambil oleh pemerintah dianggap oleh Mohamad Hatta sangat merugikan ekonomi negara. Hatta sangat kecewa terhadap keputusan ini yang dianggap hanya menguntungkan diri sendiri, ia mengungkapkan:

“...berpuluh juta ya, barangkali beratus juta uang negara yang diperoleh untuk kepentingan satu golongan kecil atas nama “Nasional”, yang beruntung hanya beberapa orang saja, tetapi masyarakat seluruhnya bertambah menderita. Harga bertambah mahal, berbagai barang sukar didapat, distribusi barang-barang kepada rakyat bertambah kacau, keuangan negara semakin meluncur di jalan inflatoir (Surat Kabar *Abadi* dan *Haluan*, 25 November 1954 dalam Noer, 1990:421).

Kritik tersebut diungkapkan sebagai suatu kekecewaan Mohamad Hatta sebagai wakil Presiden, akan tetapi, nasehat tersebut dibiarkan oleh pemerintah (Kamaluddin dan Alfian, 2015:57). Bahkan setelahnya, peristiwa yang terjadi seperti korupsi dan skandal-skandal yang melibatkan tokoh-tokoh pemerintah khususnya PNI saat itu menjadi semakin biasa (Ricklefs, 2005:489).

Selain dalam kabinet Ali I, hal yang lebih bersifat permanen yang turut pula mengecewakan Mohammad Hatta yakni terjadi di dalam pemerintahan

Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956-Maret 1957). Ialah soal modal asing, yang menurut Mohammad Hatta menganggap Undang-Undang modal asing yang dihasilkan pada masa kabinet Ali II itu menuju Kapitalisme, yang memperkuat inisiatif dan kedudukan pengusaha asing di Tanah Air. Mohammad Hatta mengatakan, hal ini adalah berlawanan dengan UUD 1945, menurutnya politik perekonomian yang lebih efektif dan sepadan dengan UUD kita ialah mengadakan eksploitasi sendiri dengan bantuan kapital pinjaman dan manajemen dari luar negeri.

Pinjaman ini, dalam pembayarannya diangsur dari hasil industri yang bersangkutan, sedangkan pihak manajemen yang disewa berasal dari luar negeri diharuskan mendidik bangsa kita, agar setelah terdidik, bangsa kita bisa menggantikan manajemen luar negeri tersebut. Tampaknya, hal ini menjadi suatu solusi dari Mohammad Hatta di bidang ekonomi kepada pemerintah, ia kemukakan hal ini kepada berbagai kabinet, namun tetapi, tanpa realisasi dari kabinet yang bersangkutan (Noer, 1990:422-424). Seperti dalam proyek Asahan yang merupakan salah satu usaha untuk mempertinggi produksi, beberapa saran dan nasehat Mohammad Hatta untuk terwujudnya proyek ini, tetapi demikian, hanya sedikit perhatian yang diberikan oleh pemerintah terhadap proyek Asahan tersebut (Kamaluddin dan Alfian, 2015:57). Hal tersebut turut membuat kecewa kepada Mohammad Hatta, suatu aset yang berharga tidak dimanfaatkan dengan maksimal.

Selain di bidang Ekonomi, permasalahan di bidang militer juga menjadi masalah yang tidak bisa dikesampingkan. Keputusan-keputusan pemerintah di bidang militer yang dinilai tidak sesuai, dan kerap membuat kecewa kepada Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden. Hal ini terlihat pada saat pemerintahan kabinet Ali I, dalam kabinet tersebut, terjadi pemecatan kepada Mayor Jenderal Simatupang sebagai kepala Staf Angkatan Perang.

Mohammad Hatta kecewa terhadap kabinet Ali I, khususnya menteri pertahanan yang dijabat oleh Iwa Kusumasumantri yang memecat Mayor Jenderal Simatupang karena kabinet tidak suka terhadap pribadinya. Mohammad Hatta mengatakan, “hendaknya kedudukan kepala Staf Angkatan Perang jangan menjadi

korban atau dihapuskan, tidaklah perlu membakar rumah hanya untuk menangkap seorang prajurit yang sedang bersembunyi di dalamnya”. Namun, nasehat yang diberikan kepada Kabinet Ali I tersebut tidak dihiraukan, dan menteri pertahanan Iwa Kusumasumantri tetap memecat Mayjen Simatupang dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.3 tanggal 5 Maret 1948 (Kamaluddin dan Alfian, 2015:57). Selain itu, dalam jabatan yang sama yakni Kabinet Ali I, masalah penetapan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) turut pula menjadi masalah. Mohammad Hatta, selain kecewa terhadap keputusan kabinet tersebut, peristiwa itu pula semakin menunjukkan hubungannya yang semakin tidak harmonis dengan Soekarno dalam konteks dwitunggal.

Pemilihan KSAU oleh kabinet Ali I yang didasarkan pertimbangan politis yakni memilih Suryadarma, mengakibatkan keributan di dalam internal angkatan udara sendiri. Pemilihan Suryadarma sebagai KSAU tersebut tidak disukai oleh perwira angkatan udara, maka dari itu, untuk mengurangi ketidaksenangan dari pengangkatan tersebut, Iwa Kusumasumantri mengangkat Komodor Muda Suyono sebagai wakil KSAU. Namun tetapi, para tentara-tentara yang tidak setuju terhadap pengangkatan Suyono tersebut, menggagalkan upacara pelantikan terhadap Suyono, dengan peristiwa pemukulan kepada Suyono dan perebutan Pataka (Harahap, 1980:437 dan Poeponegoro dan Notosusanto, 2008:344). Mohammad Hatta sangat kecewa terhadap peristiwa tersebut, terlebih pula keputusan kabinet yang menjadi sebab dalam permasalahan pengangkatan KSAU, ia mengatakan:

“...Perebutan merebut pataka (*vaandel*), panji kehormatan Angkatan Udara oleh segelintir pasukan tidak saja suatu penghinaan bagi negara, tetapi juga menodai pataka itu sendiri. Suatu lambang yang diberlakukan dengan segala hormat, tidak sekonyong-konyong direbut pada saat upacara dan dibawa lari. Apabila ini belum dimengerti oleh para perwira yang bertanggung jawab, maka perwira itu tidak layak menjadi anggota angkatan udara Republik Indonesia” (Noer, 1990:469).

Ungkapan tersebut merupakan kekesalan Mohammad Hatta terhadap peristiwa yang terjadi di KSAU, dan bahkan, Hatta menganjurkan “operasi yang mendalam” dengan membubarkan Angkatan Udara yang ada itu, dengan memilih

tim pimpinan baru. Namun tetapi, harapannya tidak terlaksana karena terbentur dengan keinginan dari Presiden Soekarno. Presiden Soekarno melihat, bahwa peristiwa itu adalah pertikaian antara saudara yang harus diselesaikan dengan musyawarah, bukan dengan tertib disiplin seperti yang di anjurkan Mohammad Hatta (Noer, 1990:470).

Turut pula, permasalahan politik luar negeri saat itu, dalam pemerintahan kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952) menempuh kebijakan yang menyimpang dari politik bebas aktif. pada bulan Januari 1952, menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo, mengadakan pertukaran surat dengan duta besar Amerika Serikat berdasarkan *Mutual Security Act* (MSA) (Poeponegoro dan Notosusanto, 2008:323).

Berdasarkan akta ini, negara yang meminta bantuan ekonomi dan teknis kepada Amerika Serikat terikat ke dalam perjanjian pertahanan keamanan dengan Amerika Serikat. Dengan demikian, kabinet Sukiman telah menjadikan Indonesia sebagai negara sekutu, dan melanggar apa yang menjadi doktrin politik luar negeri “bebas aktif” itu (Alfarizi, 2012:137-138). Sekalipun masih di tingkat pertukaran surat, kejadian ini mengundang reaksi dari berbagai pihak, khususnya, Mohammad Hatta sebagai peletak dasar keputusan luar negeri “bebas aktif”. Mohammad Hatta menyesalkan perjanjian MSA itu dengan Amerika Serikat, ia berkesimpulan bahwa, Subardjo bersalah dalam hal ini. Subardjo telah mengetahui segala implikasi dari perjanjian tersebut yang diperolehnya dari Duta Besar Amerika Serikat, M. Cochran. Akan tetapi, ia tetap melanjutkan diplomasi rahasia itu dengan sendirinya, dan seharusnya Indonesia tidak seharusnya menerima bantuan itu, karena tidak sesuai dengan semangat politik luar negeri “bebas aktif” kita (Noer, 1990:448-449).

Pada kesimpulannya, Mohammad Hatta dalam beberapa hal, sangat mengkritik keadaan pemerintahan saat itu. Menurut Hatta, partai-partai sesungguhnya belum mempraktekkan demokrasi karena keputusan di dalam partai tidak diambil dari bawah melainkan di drop dari atas. Saat itu, negara tidak menentu, pemerintah jatuh bangun, kabinet tidak dianggap sebagai amanah masyarakat. Partai menjadi agen korupsi, memberi lisensi agar uang masuk ke

dalam kas partai, sehingga akibatnya, kabinet tidak memikirkan negara, agenda mensejahterkan negara pun terabaikan (Alfarizi, 2012:183).

5.2.1.2 Mohammad Hatta Mundur Sebagai Wakil Presiden

Dari perkembangan keadaan, kegiatan berbagai tokoh serta partai, dan penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya seperti yang di uraikan pembahasan sebelumnya, beberapa hal turut membuat Mohammad Hatta kecewa. Namun, semuanya ini bisa dikatakan merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia umumnya, dan bagi Mohammad Hatta khususnya. Mohammad Hatta sendiri dapat menghadapinya dengan kesabaran.

Kekecewaan Mohammad Hatta adalah kepada kenyataan yang tak bisa hindarkan dari kedudukannya sebagai wakil Presiden yang merupakan lambang negara saja yang ia tidak dapat berbuat apa-apa. Segala kepincangan dan penyelewengan hanya dapat dilihatnya saja, paling banyak dengan teguran dan solusi yang sering tidak dihiraukan oleh pemerintah. Selain masalah-masalah yang terjadi di dalam pemerintahan, hal-hal yang membuat Mohammad Hatta mundur yakni disebabkan faktor *intern* yaitu pertentangannya dengan Soekarno.

Soekarno, yang merupakan dwitunggal bersama Mohammad Hatta, bersama-sama dalam memproklamasikan kemerdekaan, kemudian menegakkan Indonesia di masa revolusi, serta sama-sama menduduki jabatan tertinggi sesudah penyerahan kedaulatan, bukan saja tidak seia dan sependapat dengan Mohammad Hatta, malah seringkali berselisih pendapat dan menunjukkan hubungan politik yang tidak harmonis. Mohammad Hatta, dalam masa demokrasi Liberal hanya sebagai wakil Presiden konstitusional saja, ia sangat membatasi dirinya di dalam pemerintahan karena kedudukannya itu tersebut.

Namun sebaliknya, sifat kedudukan konstitusional ini tampaknya kurang dapat dipatuhi oleh Soekarno. Soekarno acapkali sering bertindak sendiri dan tidak mengindahkan kedudukannya sebagai Presiden konstitusional. Mohammad Hatta menilai, Soekarno lebih memperlihatkan sosoknya sebagai pemimpin revolusi yang tak begitu memperdulikan berbagai macam keterikatan jabatan secara konstitusi. Padahal, menurut UUDS 1950, kedudukan Presiden Soekarno

sebagai kepala negara tidak dapat mengambil tindakan sendiri, karena kepala pemerintahan dalam Demokrasi Parlementer adalah perdana Menteri.

Memang begitulah maunya sistem pemerintahan Parlementer itu, yang tentu saja dalam sistem pemerintahan ini, Soekarno merasa tidak nyaman dengan pembatasan-pembatasan yang mengekang dirinya. Hal ini pula, yang membuat Soekarno semakin antipati terhadap pelaksanaan demokrasi Parlementer (faktanya, demokrasi tersebut memang bertentangan dengan gagasa-gagasan dasar pemikirannya) tersebut, sebab sistem tersebut membuatnya tidak berdaya sebagai pemimpin revolusi (Adam, 2003:254). Presiden hanya sebagai simbol belaka dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan eksekutif di pegang oleh perdana menteri.

Soekarno dalam penerapan sistem parlementer ini, semakin tidak kuasa untuk menahan dirinya sebagai presiden konstitusional, ia seringkali melanggar hal-hal apa saja yang tidak digariskan oleh konstitusi, yang pada gilirannya tindakan-tindakan Soekarno itu membawa dirinya semakin berseberangan dengan Mohamad Hatta sebagai wakil Presiden. Pertentangan-pertentangan yang terjadi saat demokrasi Parlementer tersebut semakin memperuncing hubungan antara Soekarno dengan Mohammad Hatta sebagai dwitunggal. Hal ini bisa dilihat, dalam permasalahan seperti ketika Presiden berencana untuk berkunjung ke daerah-daerah, dan rencana tersebut belum pernah dibicarakan kepada Mohammad Hatta, dan seharusnya dibicarakan kepada dirinya dan mendapat persetujuan oleh pemerintah.

Mohammad Hatta langsung mengingatkan Soekarno pada kedudukannya sebagai Presiden konstitusional; artinya rencana perjalanannya sebagai Presiden ke daerah pun, Menurut Mohammad Hatta harus dibicarakan lebih dahulu dengan pemerintah yakni Perdana Menteri (Noer, 2002:71). Pada permasalahan yang sama pula, Mohammad Hatta sangat kecewa dengan perlawatan Soekarno yang sangat sering berkunjung ke luar negeri khususnya pada tahun 1956. Mohammad Hatta melihat ada ketidakberesan perlawatan seorang kepala negara, ia menganggap bahwa kunjungan dengan beberapa rombongan besar tersebut sangat menghamburkan uang negara, terlebih pula, perilaku Soekarno yang sering

diberitakan miring oleh media-media luar negeri saat itu, dan harap diperhatikan pula, kedudukan Soekarno saat itu sebagai kepala Negara (Onghokham, 1978:41). Sehingga, Mohamad Hatta turut pula memikul beban moral dari apa yang dilakukan Soekarno.

Selain itu, permasalahan pemberian grasi oleh Presiden Soekarno kepada Djodi Gondokusumo, menteri kehakiman dalam kabinet Ali Sastroamidjojo I yang ditangkap dengan tuduhan korupsi (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008:317), Mohammad Hatta menolak, grasi yang diberikan kepada Djodi Gondokusumo karena penyelewangannya saat menjadi menteri tidak mempunyai dasar oleh Soekarno, dan hal itu tidak dibicarakan dulu dengannya (Kleden, 2002:159). Tetapi juga, dalam permasalahan yang hampir mirip seperti yang dijelaskan sebelumnya, Mohamad Hatta sangat mengecam Soekarno karena pemecatan Sosrodanukusumo tersebut, ia berpendapat bahwa tindakan tersebut diluar penerapan sila kedua dari Pancasila, dan tanpa pembicaraan terlebih dahulu dengannya akan masalah tersebut. Mohammad Hatta, mengatakan dalam suratnya kepada Soekarno 25 Maret 1956:

“Jikalau saudara memandang Dwitunggal, yang begitu banyak dibicarakan di waktu akhir ini, hal ini lebih dari *show* saja, sebenarnya dalam hal-hal yang mengenai dasar-dasar negara, Saudara sepatutnya berembuk dengan saya lebih dahulu, sebelum mengambil tindakan” (Noer, 1990:476).

Dari surat tersebut, dapat terlihat bahwa menunjukkan adanya keretakan-keretakan dari dwitunggal Soekarno-Hatta. Tindakan-Tindakan Soekarno yang sering keluar batas secara konstitusional dan tanpa bermusyawarah dahulu dengan Mohammad Hatta, mengakibatkan hubungan dwitunggal tersebut tidak harmonis lagi. Hubungan tersebut semakin tidak harmonis, ketika Presiden Soekarno menganjurkan PKI pasca pemilu untuk berkoalisi dalam kabinet pemerintahan. Mohammad Hatta mengatakan:

“...ketika kami meninggalkan UUD 1945 dan menggantinya dengan UUD 1950, makna dan posisi Dwitunggal mulai berubah dan berkurang. Situasi ini dimanfaatkan untuk keuntungan terbaik oleh PKI dalam taktik mereka dan perjuangan politik, sehingga proses kemerosotan kapasitas mengikat dan kegunaan Dwitunggal dipercepat; sering kesalahpahaman antara kami berdua bahkan

dibuat terutama setelah partai-partai politik mulai berkelahi satu sama lain dan mencoba untuk menggulingkan satu sama lain” (Hatta, 1981:138-139).

Saat itu, PKI menjadi nomor empat partai terbesar setelah PNI, Masyumi, NU dalam pemilihan umum yakni dengan 6.176.914 suara (Ricklefs, 2005:394). Akan tetapi, memang tidak terealisasikan karena para pemimpin partai pemenang pemilu menolak mengikutsertakan PKI dalam pemerintahan (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008:321). Anjuran Presiden Soekarno tersebut menuai kritik dari Mohammad Hatta, ia mengatakan “bagaimana mungkin akan tercipta kerjasama antara PKI dengan partai-partai yang berdasarkan agama?, hal itupun jika terjadi PKI dalam kabinet, Indonesia akan melepaskan politik luar negerinya “bebas aktif” karena akan ikut poros PKI Internasional (Noer, 1990:495-496).

Memang Mohammad Hatta sangat tidak menyukai PKI, hal ini disebabkan tindak tanduk PKI yang terjadi sejak konvensi Mohammad Hatta dengan Semaun, pemberontakan PKI Madiun 1948 yang merongrong kedaulatan RI. Namun terlepas dari hal tersebut, antara Soekarno dengan Mohammad Hatta semakin memperlihatkan perbedaan yang saling kontradiktif.

Selanjutnya, pertentangan antara Soekarno dan Mohammad Hatta yang dinilai paling fundamen menurut penulis adalah masalah “revolusi selesai atau tidak”. Presiden Soekarno berpendapat bahwa revolusi Indonesia yang dimulai dengan Proklamasi kemerdekaan tahun 1945 belum selesai, dan sebaliknya Mohammad Hatta menganggap bahwa revolusi itu tidak boleh terlalu lama (Noer, 1990:490). Hal ini bisa kita lihat, dalam perbedaan pandangan Soekarno dengan Mohammad Hatta terkait Irian Barat.

Sesuai dengan kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) dimana dihasilkan suatu keputusan untuk menunda masalah Irian Barat satu tahun kemudian (Ricklefs, 2005:466; Poesponegoro dan Notosusanto, 2008:272). KMB merupakan perundingan yang sangat monumental bagi Mohammad Hatta yang hasilnya lebih menguntungkan daripada perjanjian sebelumnya, tetapi meskipun demikian, Soekarno tidak merasa puas dengan hasil itu karena wilayah Irian Barat masih belum berada dalam wilayah Indonesia seutuhnya dan hal ini tidak sesuai dengan cita-cita Soekarno yang menginginkan NKRI utuh dari

Sabang sampai Merauke. Soekarno tidak setuju dalam penyelesaian masalah Irian Barat itu hanya melalui perundingan-perundingan saja, ia menginginkan cara yang lebih revolusioner agar Irian Barat kembali ke dalam wilayah RI karena revolusi belum selesai (Rose, 1991:301-305).

Praktis pula, bahwa pandangan Soekarno terhadap revolusi yang belum selesai tersebut ia utarakan dalam pidato-pidatonya di dalam berbagai kesempatan sampai pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Salah satunya pidato di depan Pemuda Marhaenis di Jakarta, ia berkata:

“...dan kita harus bertanya-tanya kepada diri kita sendiri, kalau revolusi kita demikian, benar-benar demikian, ya, revolusi nasional, revolusi kultur, ya, revolusi sosial, bahkan lebih dari itu, apakah revolusi kita sudah selesai?, belum anak-anakku, belum! Revolusi Nasional Kita Belum Selesai, Revolusi Kita Belum Selesai!!!” (Setiyono dan Triyana, Eds, 2014:763).

Tetapi pandangan Soekarno tersebut berbeda dengan Mohammad Hatta dalam memandang revolusi tersebut. Mohammad Hatta mengakui bahwa revolusi telah meningkatkan semangat perjuangan bangsa yang memuncak dengan penyerahan kedaulatan pada tahun 1949. Tetapi ini tidak berarti, bahwa revolusi itu perlu diteruskan, hal ini pula Mohammad Hatta mengkritik kepada Soekarno yang menganggap sebaliknya, ia mengatakan:

“...Salah benar orang yang mengatakan bahwa revolusi nasional kita belum selesai. Revolusi adalah letusan masyarakat sekonyong-konyong, yang melaksanakan *Umwertung Aller Werte*. Revolusi mengguncang lantai dan sendi; pasak dan tiang jadi longgar semuanya. Sebab itu saat revolusi tidak dapat berlaku terlalu lama, tidak lebih dari beberapa minggu atau beberapa bulan. Sesudah itu harus dibendung, datang masa konsolidasi untuk merealisasikan hasil daripada revolusi itu. Yang belum selesai bukanlah revolusi itu, melainkan usaha menyelenggarakan cita-citanya di dalam waktu, setelah fondamen dibentangkan” (Feith dan Castles, 1988:82).

Pernyataan tersebut di ungkapkan oleh Mohammad Hatta sebagai pernyataan ketidaksetujuannya yang mendasar terhadap konsepsi Presiden yang menganggap bahwa “revolusi belum selesai”. Puncaknya, pertentangan antara Soekarno dengan Mohammad Hatta dalam bulan Oktober 1956, ketika Soekarno

mengemukakan pidatonya tentang Demokrasi Terpimpin (Feith dan Castles, 1988:62). Mohammad Hatta mengatakan bahwa demokrasi ini akan membawa kepemimpinan Soekarno yang diktator. Karena, konsepsi demokrasi ini jika dilihat dari gagasan dasarnya adalah suatu pengejawantahan dari apa yang disebut “*Democratie Centralisme*” oleh Soekarno. Suatu demokrasi yang di tolak oleh Mohammad Hatta sejak zaman pergerakan nasional, karena demokrasi ini bertentangan terhadap prinsip-prinsip dasar pemikiran Mohammad Hatta menitikberatkan kepada sentralisasi kepemimpinan (*Democratie Centralism*).

Mohammad Hatta dengan tegas mengecam proses pemberlakuan demokrasi ini, ia mengatakan bahwa “Demokrasi Terpimpin tujuannya baik, tapi cara dan langkah yang hendak diambil untuk melaksanakannya kelihatannya malahan akan menjauhkan dari tujuan yang baik itu (Hatta, 2008:100).

Pertentangan yang semakin meruncing antara Soekarno dan Mohammad Hatta dengan prinsip masing-masing yang berbeda, seakan-akan menghidupkan kembali benih-benih pertentangan Soekarno dan Mohammad Hatta yang telah terjadi sejak zaman pergerakan nasional, bahwa mereka ini sangat sulit untuk bersatu secara prinsipil. Akhirnya, akumulasi pertentangan-pertentangan yang semakin tidak bisa di selesaikan, pertentangan yang menganggap revolusi selesai atau belum, dan juga permasalahan instabilitas politik yang terjadi yang membuat dirinya turut memikul beban moral sebagai pemerintah, turut pula menjadi faktor penyebab mundurnya Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden yang secara resmi mengundurkan diri pada 1 Desember 1956.

Mohammad Hatta sesuai dengan pendiriannya pada saat berhenti sebagai wakil Presiden, merasa bahwa kedudukannya tersebut membawa tanggung jawab moral yang “sangat berat”, dan oleh sebab itu Mohammad Hatta menolaknya. Ia mengatakan:

“Kedudukan tersebut memikul *tanggung jawab moral* terhadap berbagai tindakan yang terjadi di luar pengetahuan dan persetujuan saya, yang diantaranya menurut pendapat saya merugikan kepada negara pada umumnya dan rakyat pada khususnya. Ini sangat berat rasanya bagi saya” (Noer, 1990:528).

Banyak sekali yang menyesalkan mundurnya Mohammad Hatta dari wakil Presiden, dwitunggal yang sejak zaman memperjuangkan dan setelah kemerdekaan telah sukses membawa Indonesia merdeka saat itu mulai retak. Maka tidak mengherankan, banyak upaya-upaya agar dwitunggal tersebut bersatu kembali. Salah satunya, Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Nopember 1957 yang membentuk suatu panitia yang mempunyai tugas kongkrit agar dwitunggal tersebut bekerjasama kembali. Namun tetapi, antara Soekarno dan Mohammad Hatta sangat sulit untuk disatukan kembali dalam memimpin perpolitikan Indonesia (Noer, 1990:527).

Tetapi, Sekalipun bertentangan, kebesaran jiwa kedua *Founding Fathers* ini diperlihatkan dengan penegasan bahwa pertentangan di bidang politik itu tak menyangkut soal pribadi, tanpa caci maki, tanpa saling hujat dan tanpa pengerahan massa apalagi sampai anarkis (Adam, 2003:8). Hal ini bisa dilihat yakni ketika Guntur Soekarnoputra (putra pertama Soekarno) di tahun 1970 hendak menikah di Bandung dan Soekarno dilarang menghadirinya, tanpa disangka sangka, bahkan Guntur sendiri tidak menyangkannya, mengingat pertikaian politik antara kedua bapak bangsa tersebut, Soekarno meminta Mohammad Hatta sebagai walinya dalam pernikahan Guntur, Bung Hatta langsung bersedia (Swasono (Ed), 1980:626) . Hubungan pribadi antara Soekarno dan Mohamad Hatta tetap terjalin secara baik dan nilai-nilai sikap negarawan inilah yang sangat perlu diteladani untuk saat ini karena menurut hemat penulis, adalah sangat mengagumkan, betapa tidak, antara sosok Soekarno dan Mohammad Hatta tidak hanya bisa saling bertentangan dan berdebat, tetapi juga saling membantu. Suatu hal yang jarang ditemukan pada saat ini.

BAB 6. PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi dalam penelitian ini yang dijabarkan dalam bab 4 dan 5, maka dapat ditarik kesimpulan serta sekaligus untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. **Pertama**, kondisi lingkungan sosial, budaya, pendidikan dan politik turut serta menjadi faktor *intern* dalam perilaku politiknya ketika menjadi wakil Presiden pada tahun 1945 sampai ia mengundurkan diri di tahun 1956. Hidup di dalam lingkungan keluarga yang berlatar belakang agama islam membuat Mohamad Hatta menjadi pribadi yang teguh dan berkarakter kuat. Dalam kondisi lingkungan sosialnya, Mohammad Hatta setiap hari melihat serdadu Belanda yang menyiksa bai fisik maupun mental setiap orang kampung yang melewati pos tentara Belanda. Hal tersebut membuat Mohamad Hatta merasa jiwanya terkekang.

Kondisi lingkungan Mohamad Hatta sebagai lingkungan budaya masyarakat Minangkabau, dan sejak lama Minangkabau dikenal sebagai daerah yang memiliki budaya politik yang sangat demokratis, dan perkembangan kedepannya nilai-nilai tersebut tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern saat ini. Hal ini karena tradisi budaya Minangkabau yakni tradisi “rantau”. Pergi merantau, menurut visi falsafah Minangkabau itu, membuka mata warganya untuk mengenal dunia luar yang luas di mana mereka akan menemui hal-hal yang baru yang nantinya akan dibawa pulang dan diterapkan di wilayah asalnya. Dari konteks kondisi ini, Mohamad Hatta adalah perantau yakni dalam bidang pendidikan yang ia lakukan di negeri Belanda, dan berhasil mengidealisasikan nilai-nilai demokrasi Minangkabau yang ia padukan dengan demokrasi barat.

Sedangkan kondisi lingkungan pendidikan dan politik Mohammad Hatta dimulai ketika ia menempuh sekolah rakyat *Europe Lagere School* (ELS) yang setingkat dengan sekolah dasar di Bukittinggi, dan melanjutkan belajar di *Meer Uegebroid Lager Onderweijjs* (MULO) di Padang pada tahun 1917. Sejak itu pula Mohammad Hatta sudah aktif berkecimpung dalam organisasi yakni *Jong*

Sumatranen Bond (JSB). Aktifitas dalam organisasi politik ini berlanjut seiring dengan karir pendidikannya yang ia lanjutkan di negeri Belanda yakni di sekolah tinggi ekonomi di *Nederland Handels Hoogeschool* (NHH). Dari kondisi sosial budaya dan lingkungan pendidikan politik yang dilalui oleh Mohammad Hatta turut menjadi faktor-faktor *intern* dalam konteks perilaku politiknya.

Hal ini dapat dilihat dari gagasan-gagasan politik Mohammad Hatta yakni yang menghormati aliran-aliran pluralisme dan keanekaragaman masyarakat dan menolak konsep *democratie centralisme* yang bermuara kepada “persatuan” yang mengorbankan asas-asas dari tiap-tiap golongan. Kesenambungan gagasan tersebut dapat dilihat dari gagasan demokrasi parlementer dan sistem multi-partai.

Kedua, wujud-wujud perilaku politik wakil Presiden Mohammad Hatta yakni, Mohammad Hatta sangat berperan dalam fenomena perubahan sistem pemerintahan yang terjadi di awal kemerdekaan Republik Indonesia. Dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer pada tanggal 14 Nopember 1945. Beberapa maklumat yang dikeluarkan oleh wakil Presiden yakni Maklumat No X yang berisi tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada KNIP, Manifesto Politik 1 Nopember 1945 yang berisi “menghormati hak-hak sisa milik asing dan Maklumat 3 Nopember 1945 yang berisi anjuran di bentuknya parta-partai. Dengan keluarnya Maklumat tersebut telah membuka jalan diberlakukannya sistem pemerintahan Presidensial yang pada akhirnya mengubah sistem pemerintahan Presidensial menjadi sistem pemerintahan Parlementer.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik Mohammad Hatta dalam transformasi sistem pemerintahan dari sistem pemerintahn Presidensial menuju sistem pemerintahan parlementer. Secara *ekstern* faktor perubahan sistem pemerintahan Presidensial menjadi sistem Parlementer memang tidak lepas dalam upaya untuk mencari dukungan dan pengakuan dari dunia Internasional terhadap negara Indonesia yang baru merdeka. Secara *intern*, faktor perubahan dari sistem presidensial menuju sistem pemerintahan Parlementer di Indonesia di awal kemerdekaan adalah manifestasi atau perwujudan dari demokrasi yang di gandrungi oleh Mohammad Hatta yakni demokrasi Liberal yang terjelma sebagai

demokrasi parlementer yang nilai-nilai demokrasi tersebut adalah tidak jauh dari demokrasi dalam adat dan budaya Minangkabau.

Selain itu, wujud lain perilaku politik Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden yakni ketidaksetujuan terhadap pemberian testamen politik kepada Tan Malaka. Mohammad Hatta mengusulkan agar penerima testamen politik tersebut diberikan kepada empat orang yakni Tan Malaka sebagai wakil dari golongan kiri, dan ditambah oleh Sutan Sjahrir mewakili kelompok golongan tengah kiri, yang di sebut Mohammad Hatta sebagai “golongan sedang”; Wongsonegoro mewakili golongan kanan dan feodal; dan terakhir, Sukiman mewakili golongan Islam. Dengan demikian, golongan-golongan penting dalam masyarakat diharapkan akan lebih mendukung kepemimpinan nasional bila pewaris itu sewaktu-waktu diperlukan. faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksetujuan Mohammad Hatta dalam pemberian testamen politik kepada Tan Malaka secara faktor *ekstern* ialah sebagai suatu strategi dari dwitunggal Soekarno dan Mohammad Hatta saat itu.

Karena keadaan yang mendesak bahwa Soekarno Hatta akan ditangkap oleh sekutu, maka adanya testamen tersebut sebagai antisipasi jika kemungkinan terburuk terjadi, maka revolusi tetap berjalan. Namun, secara *intern* fakta yang membuat Mohammad Hatta tidak setuju jika testamen tersebut hanya diberikan kepada Tan Malaka saja, ia mengusulkan agar ditambah kepada wakil-wakil aliran penting saat itu yakni Sjahrir, Wongsonegoro, dan Sukiman, hal ini tidak jauh dari dasar pemikirannya yang menolak adanya sentralisasi kepemimpinan (*Democratie Centralism*), jika memang kemungkinan revolusi itu harus diwariskan.

Selanjutnya, wujud perilaku politik wakil Presiden Mohammad Hatta yakni pada tanggal 1 Desember 1956 secara resmi Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil Presiden Indonesia. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan politik Mohammad Hatta mundur sebagai wakil Presiden yakni secara *ekstern* dan *intern* adalah disebabkan oleh pertentangan-pertentangan yang semakin tidak bisa di selesaikan antara dwitunggal Presiden Soekarno dan wakil Presiden Mohammad Hatta.

Pertentangan yang menganggap revolusi selesai atau belum, dan juga permasalahan instabilitas politik yang terjadi turut membuat Mohammad Hatta

memikul beban moral sebagai pemerintah karena dirinya sebagai wakil Presiden konstitusional. Sehingga Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai wakil Presiden pada 1 Desember 1956.

6.2 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penulis dapat menyampaikan beberapa saran. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

- a. Kepada para mahasiswa calon guru sejarah, kita harus benar-benar menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan serta dapat menerapkan nilai-nilai luhur yang pernah diperjuangkan oleh para *The Founding Fathers* seperti halnya Mohamad Hatta yang berjuang untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang sebenarnya.
- b. Kepada almamater, hendaknya berkenan memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengadakan penelitian yang sesuai dengan keinginannya, terutama yang berada di wilayah sendiri dari pada negara lain, yang akan membawa dampak terhadap rasa cinta tanah air, bangsa dan negara;
- c. Bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai perilaku politik wakil Presiden Mohamad Hatta yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hingga dalam mengisi kemerdekaan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Adam, W. T. 2003. *Demi Bangsaaku Pertentangan Sukarno vs Hatta*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Adams. C. 2014. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*. Penerjemah Syamsu Hadi. Yogyakarta: Media Pressindo
- Alfarizi, S. 2012. *Mohammad Hatta Biografi Singkat 1902 – 1980*. Yogyakarta: Penerbit Garasi
- Alfian. 1978. *Tan Malaka: Pejuang Revolusioner yang Kesepian*. Dalam Taufik Abdullah, Aswab Mahasin, Daniel Dhakidae (Red). 1978. *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: LP3ES
- Ali, F. 2002. Mensosialisasikan Nilai Demokrasi Minangkabau Untuk Model Sistem Politik Indonesia. *Jurnal Reformasi*. Vol 3. No 1.
- Aman. 2007. “Pemikiran Mohammad Hatta tentang Demokrasi, Kebangsaan, dan Hak Asasi Manusia”. Tidak diterbitkan. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Anderson, B. 1988. *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Arfiani, L. 2008. *Kebijakan Politik Mohammad Hatta tahun 1948-1950*. Tidak diterbitkan. Skripsi. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Bagun, R (Ed). 2002. *Seratus Tahun Bung Hatta*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Bahar, S (Eds). 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara RI
- Budiardjo, M. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Budiardjo, M. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

- Budisantoso, I.N. 2002. *Hatta Mundur Karena Kecewa? Silang Pendapat Sekitar Pengunduran Diri Hatta*, dalam R. Bagun (Ed), 2002. *Seratus Tahun Bung Hatta*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Ebenstein, W. 2014. *Isme Isme yang Mengguncang Dunia*. Yogyakarta: Narasi
- Feith, H dan Castle, L. 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES
- Firmansyah, A. 2010. *Hatta: Si Bung yang Jujur dan Sederhana*. Jogjakarta: Garasi
- Giebels, L. 2001. *Soekarno Biografi 1901-1950*. Jakarta: Grasindo
- Gottschalk, L. 1985. *Mengerti Sejarah*. Penerjemah: Nugroho Notosusanto. Jakarta : Universitas Indonesia
- Hamdi, M. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisa, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Harahap, B. 1980. *Bung Hatta dalam Dwitunggal*, dalam Swasono, M. F.(Ed) 1980. *Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan
- Hatta, M. 1951. *Mendajung Antara Dua Karang*. Djakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia
- Hatta, M. 1953. *Kumpulan Karangan Jilid I*. Jakarta: Bulan Bintang
- Hatta, M. 1976. *Kumpulan Karangan Jilid IV*. Jakarta: Bulan Bintang
- Hatta, M. 1981. *Bung Hatta's Answer*. Jakarta. PT Gunung Agung
- Hatta, M. 2008. *Demokrasi Kita*. Bandung: Sega Arsy
- Hatta, M. 2011. *Untuk Negeriku Jilid 1: Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Hatta, M. 2011. *Untuk Negeriku Jilid II: Berjuang dan Dibuang*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Hatta, M. 2011. *Untuk Negeriku Jilid III: Menuju Gerbang Kemerdekaan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

- Hari, W. 2014. "Kebijakan Rasionalisasi Militer pada Masa Pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Hatta tahun 1948-1950". Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Hoogerwerf, A. 1985. *Politikologi: Pengertian dan Problem Problemnya*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Ingleson, J. 1983. *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalisme Indonesia Tahun 1927-1934*. Jakarta:LP3ES
- Kahin, A. 2005. *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Terjemahan oleh Azmi dan Zulfahmi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kahin, G. M. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu
- Kamaluddin, U. A dan Alfian, M. 2015. *Dinamika Politik di Indonesia: Perjalanan Politik Sejak Orde Lama Hingga Reformasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Kartodirdjo, S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, S. 1998. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kleden, I. 2002. *Mendayung di Antara Asketik dan Politik*, dalam Bagun, R. 2002. *Seratus Tahun Bung Hatta*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta : PT. Yayasan Bentang Budaya
- Loebis, A.B. 1992. *Kilas Balik Revolusi Kenangan, Pelaku dan Saksi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Malaka, Tan. 2000. *Aksi Massa*. Jakarta: Teplok Press
- Malaka, Tan . 2015. *Semangat Muda*. Bandung: Sega Arsy
- Malik, A. 1984. *Mengabdikan Republik Jilid II: Angkatan 45*. Jakarta: Gunung Agung
- Mansoer, M. T. 1977. *Tentang kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita

- Nasroen, M. 1957. *Dasar Falsafat Adat Minangkabau*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang
- Nasution, A. H. 1968. *Tentara Nasional Indonesia 2*. Djakarta: Seruling Masa
- Nasution, A. H. 1978. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 3 (Periode Diplomasi Sambil Bertempur)*. Bandung: Disjarah AD dan Angkasa
- Navis, A, A. 2002. *Bung Hatta Kita*, dalam Bagun (ed). 2002. *Seratus Tahun Bung Hatta*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Noer, D. 1990. *Mohammad Hatta Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES
- Noer, D. 2002. *Pencerahan Diri Hatta Memilih antara Taqwa dan Kekuasaan*, dalam Bagun, R. 2002. *Seratus Tahun Bung Hatta*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Noer, D. 2012. *Mohammad Hatta Hati Nurani Bangsa*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Poesponegoro, M.D. dan Notosusanto, N. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka
- Poeze. H. A. 2008. *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia. Jilid I: Agustus 1945-Maret 1946*. Terjemahan oleh Hersri Setiawan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; KITLV-Jakarta
- Permana, A, G. 2014. "Gaya Kepemimpinan Mohammad Hatta tahun 1945-1956". Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Priyadi, A. 1986. *Wawancara dengan Sayuti Melik*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
- Priyanto, F. 2016. "Pemikiran Mohammad Hatta tentang Demokrasi Indonesia Tahun 1928-1960". Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: Universitas Jember
- Rahman, M.A. 2013. *Tan Malaka Pahlawan yang Dilupakan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Palapa
- Rajab, B. 2004. *Kebudayaan, Kekerabatan dan Perantauan: Catatan Atas Tesis yang Deterministik*. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Vol VI No. 1
- Rauf, M. 2000. *Konsensus Politik*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi

- Ritzer, G. 2014. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Penerjemah: Alimandan. Jakarta: Rajawali Pers
- Sairin, S. 1995. Demokrasi Dalam Perspektif Kebudayaan Minangkabau. *Jurnal Humaniora*. Vol 1.
- Sastroatmodjo, S. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Sastrosatomo, S. 2002. *The Father of The Founding Fathers*, dalam Sri Edi Swasono (Ed). 2002. *Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Yayasan Hatta.
- Soekarno. 1964. *Dibawah Bendera Revolusi*. Jilid I. Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi
- Setiarini, H. 2014. Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Koperasi Tahun 1925-1953. *Avatara, E-Journal Pendidikan Sejarah*. Volume 2, No. 3,
- Setiyono, B dan Triyana, B. (Eds). 2014. *Revolusi Belum Selesai*. Jakarta:Serambi
- Smith, M, B. 1968. A Map for the Analysis and Politics. *Journal of Social Issues*. Vol 24. No 3.
- Subardjo, A. 1978. *Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi*. Jakarta: PT Gunung Agung
- Sundhaussen, U. 1986. *Dwifungsi ABRI*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Surbakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo
- Surono, A. 2016. *Kisah Asmara Hatta; Bersumpah Tak Menikah Sebelum Indonesia Merdeka*, dalam Intisari. 2016. Jakarta: Kompas Gramedia
- Swantoro, P. 2002. *Genesis Pemikiran dan Cita-Cita Bung Hatta*, dalam Bagun, R. 2002. *Seratus Tahun Bung Hatta*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Swasono, M. F.(Ed) 1980. *Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan
- Swastika, K. 2004. “Konflik Elit dan Perubahan Bentuk Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pada Masa Awal Kemerdekaan: Faktor Konflik Sukarno-Sutan Sjahrir dalam Perubahan Sistem Presisdensil Menjadi Sistem Parlementer Pada Tanggal 14 November 1945”. Tidak Diterbitkan. Tesis. Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press

Yudiyanto. 2016. "Pandangan Nasionalisme Mohammad Hatta Di Indonesia Tahun 1942-1956". Tidak Diterbitkan. Skripsi. Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta

Yuliawan, S. 2008. "Pemikiran Mohammad Hatta dalam Pembangunan Sistem Perekonomian Indonesia tahun 1921-1956". Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: Universitas Jember.

Zulkarnain. 2012. Dinamika Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Sejarah Istorica*. Vol 2. No 1.



Lampiran A.

MATRIKS PENELITIAN

TOPIK	JUDUL PENELITIAN	JENIS DAN PENELITIAN	PERMASALHAN	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Sejarah Politik	Perilaku Politik Wakil Presiden Mohammad Hatta tahun 1945 - 1956	1. Jenis Penelitian a. Penelitian Sejarah 2. Sifat Penelitian a. Penelitian Kepustaka n dan Studi Literatur	1. Bagaimana wujud perilaku politik Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden Republik Indonesia? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku politik Mohammad Hatta?	1. Buku 2. Skripsi 3. Jurnal 4. Lapoan Penelitian Tempat pencarian sumber: a) Perpustakaan Universitas b) Ruang Baca Pendidkan Sejarah c) Koleksi Pribadi	Pendekatan: Politikologi Teori: Teori Aksi Metode: 1. Heuristik 2. Kritik 3. Interpretasi 4. Historiografi

Lampiran B

Maklumat Wakil Presiden No X*

KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT
Pemberian Kekuasaan Legislatif
Kepada Komite Nasional Indonesia

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SESUDAH MENDENGAR, pembitjaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaya Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat dibentuk kekuasaannja jang hingga sekarang didjalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional menurut pasal IV Aturan Peralihan dari Undang Undang Dasar hendaknja dikerdjakan oleh Komite Nasional Pusat dan supaya pekerdjaan sehari harinja berhubungan dengan gentingnja keadaan didjalankan oleh sebuah Badan bernama Dewan Pekerdja jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat:

MENIMBANG bahwa didalam keadaan jang genting ini perlu ada badan jang ikut bertanggung djawab tentang nasib bangsa Indonesia, disebelah Pemerintah;

MENIMBANG selandjutnya bahwa usul tadi bedasarkan paham kedaulatan rakjat;

MEMUTUSKAN:

Bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar dari haluan Negara, serta menjetudjui bahwa pekerdjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari berhubungan dengan gentingnja keadaan didjalankan oleh sebuah Badan Pekedja jang dipilih diantara mereka dan jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat

Djakarta, 16 Oktober 1945
Wakil Presiden Republik Indonesia
Mohammad Hatta

* Anderson, B. 1988. *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal 201.

Lampiran C

Amanat Kami*

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu, ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Setelah kami menjatakan kemerdekaan Indonesia, atas dasar kemauan rakyat Indonesia sendiri pada tanggal 17 Agustus 1945 bersandar pada undang2 Dasar yang sesuai dengan hasrat rakyat untuk mendirikan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Maka negara Indonesia menghadapi bermacam-macam kesulitan dan rintangan, yang hanya bisa diselesaikan oleh rakyat yang bersatu-padu serta gagah berani di bawah pimpinan yang tjerdik, pandai, tjakap dan tegap.

Sedangkan sedjarah dunia membuktikan pula, bahwa pelaksanaan tjita2 kemerdekaan itu bergantung pada kesanggupan seluruh rakyat untuk memberi korban apapun djua, seperti sudah dibuktikan oleh negara2 atau bangsa2 yang besar di Amerika –Utara dan Selatan, di Eropa-Barat, di Rusia, Mesir, Turki, dan Tiongkok.

Sjahkan, datanglah saatnya buat menentukan keterangan siapa akan ditaruhkan obor kemerdekaan, seandainya kami tiada berdjaja lagi akan meneruskan perjuangan kita ditengah-tengah rakyat sendiri.

Perjuangan rakyat kita seterusnya menetapkan kemerdekaannya hendaklah tetap di atas persatuan segala golongan rakyat dengan mendjundjung tinggi Republik Indonesia, seperti yang tertjantum pokok2nja Undang2 Dasar Kita.

Bahwasanja setelah kami pikirkan dengan seksama dan periksa dengan teliti pula dengan persetujuan penuh dengan para pemimpin yang ikut serta bertanggung djawab.

Maka kami putuskanlah, bahwa pimpinan perjuangan kemerdekaan kita diteruskan oleh sdr2:

Tan Malaka, Iwa Kusumasumantri, Sjahrir, Wongsonegoro.

Hidup Republik Indonesia!

Hidup Bangsa Indonesia!

Merdeka!

Djakarta, 1 Oktober 1945

Kami,
Soekarno, Moh. Hatta

* Poeze. H. A. 2008. *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia. Jilid I: Agustus 1945-Maret 1946*. Terjemahan oleh Hersri Setiawan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; KITLV-Jakarta. Hal 61.

Lampiran D

KEARAH INDONESIA MERDEKA*

Pendidikan Nasional Indonesia menudju Indonesia Merdeka Dan fasal 2 dari pada Peraturan Dasar menjebut, bahwa perkumpulan berasas K e b a n g s a a n dan K e r a k j a t a n.

Kebangsaan dan kerakjatan, itulah dua buah kata jang kerapkali mendjadi buah bibir diwaktu sekarang. Banjak pula orang jang menjangka, bahwa kedua-dua pengertian itu sekarang tidak laku lagi.

Pertama, sering orang berkata, bahwa sekarang sudah lahir “semangat internasional”. Tidak sadja didalam pergerakan kaum buruh, akan tetapi djuga didalam golongan kaum burdjuis, kapitalis dan imperialis Barat orang membangkitkan “perasaan internasional”, Dan apakah Geneve tidak dinamai oleh mereka pusat “pergaulan internasional”? tidakkah segala urusan jang penting sekarang, seperti perlutjutan sendjata dan lain-lain “didasarkan internasional”? seluruh dunia merewelkan ke-internasionalan! Tidakkah kita tersesat, kalau kita masih gila dasar kebangsaan? Dan apakah pergerakan kita nanti tidak mundur kebelakang kembali?

Kedua, bukankah orang sudah bosan kepada “Kerakjatan” atau “Demokrasi”? bukan sadja kaum ningrat atau fascis jang pentji kepada kerakjatan., melainkan djuga kaum komunis atau bolsjewik berupa tidak suka lagi kepada demokrasi dan semata-mata bersifat diktatur. Tidakkah pula Mustafa Kemal, pemimpin Turki-Muda, kembali dari demokrasi ke diktatur? Djikalau sekarang kaum radikal disebelah kana dan difihak kiri di Eropah dan lain-lain sudah memuntahkan dasar kerakjatan, mestikah kita membangkitkan dan meninggikannja lagi?

Inilah dua matjam alasan menentang “kebangsaan” dan “kerakjatan” jang mudah menarik hati orang. Akan tetapi, siapa jang menjelidiki riwayat dunia dengan betul, bagi dia njata dengan sedjelas-djelasnja, bahwa alasan itu lemah sekali. Soal “kebangsaan” dan “kerakjatan” tidak begitu mudah, apa lagi kalau kebangsaan disangkutkan kepada kerakjatan, mendjadi dua sepasang. Djika diperhatikan pula sedjarah pergerakan kemerdekaan diatas dunia ini dan susunan masjarakat zaman sekarang, maka djelaslah pula, bahwa dasar “dua-sepasang” itu kuat dan tjotjok dengan keperluan pergerakan Indonesia dimasa sekarang.

* Hatta, M. 1953. *Kumpulan Karangan Jilid I*. Jakarta: Bulan Bintang. Hal 61-77

I. KEBANGSAAN

Pendidikan Nasional Indonesia bersifat Kebangsaan oleh karena ia menudju Indonesia-Merdeka, jaitu kemerdekaan Bangsa dan Tanah-Air. Selama itu jang mendjadi tudjuannya jang utama, selama itu pergerakannya berdasar dan bersifat kebangsaan. Tidak ada pergerakan kemerdekaan jang terlepas dari semangat kebangsaan. Apa jang mau dimerdekakan dari genggaman bangsa asing kalau tidak Bangsa dan Tanah-air sendiri? Tjita-tjita kepada persatuan hati dan persaudaraan segala bangsa dan manusia ada bagus dan baik, tetapi supaja tertjapai maksud itu, haruslah dahulu ada kemerdekaan bangsa. Hanja bangsa-bangsa dan manusia jang sama deradjat dan sama merdeka dapat bersaudara. Tuan dan budak susah mendapat persaudaraan! Sebab itu selagi masih ada suatu bangsa diperintahi oleh bangsa lain, pergerakan kemerdekaan mestilah bersifat kebangsaan, jaitu menjempurnakan lebih dahulu individualitet atau roman kemanusiaan sendiri, menjempurnakan bangsa sendiri!

Oleh sebab itu tidak salah langkah Pendidikan Nasional Indonesia, kalau ia berdasar kebangsaan. Ia tidak pula memundurkan kembali pergerakan kita karena itu, melainkan memajukan dan memperkuat rohnya. Membangunkan semangat kebangsaan pada bangsa jang tidak merdeka, artinja membangunkan kemanusiannya. Selanjutnja membangkitkan kegembiraan dan keberanian hati pada orang banjak jang dahulunya sudah kehilangan sifat dan budi! Sedjarah dunia memperlihatkan pada tiap waktu, bagaimana kuatnja roh ke3bangsaan itu. Sekalipun orang mentjela atau tidak menjukai keadaan itu, a d a n j a tidak dapat disangkal. Dan tidak dapat pula dibantah, bahwa ia berlaku sebagai satu factor besar dalam tiap-tiap pergerakan bangsa jang mau merdeka. Diatas nama “kebangsaan” atau “kehormatan bangsa” orang sudi menentang maut, sudi menderita sakit jang sesakit-sakitnja, seperti jang dapat dialami waktu perang besar 1914-1918. Bagaimana djuga bodoh dan penakut orang, pada suatu saat jang penting ia sudi berkorban hendak membela Tanah-Airnja!

Tjinta bangsa dan Tanah-Air sudah mendjadi njanjian jang merdu di telinga orang banjak, istimewa bagi bangsa jang tidak merdeka, karena bangsa itu mendjadi ukuran manusia dalam pergaulan Internasional. Kalau satu bangsa mulia dan tinggi deradjatnja, orangnjapun dihargai pula. Kalau seseorang tiada mempunjai kabangsaan, seperti kita anak djadjahan, ia tiada dipandang orang dalam pergaulan Internasional. Keadaan ini tidak boleh tidak membangkitkan r a s a b a n g s a, semangat kebangsaan.

Kita tahu dan insaf, bahwa sembojan “membela kehormatan bangsa” dapat dipergunakan oleh satu golongan sadja, misalnja kaum madjikan, untuk memuaskan hawa nafsunja. Rakjat jang banjak diapakai mereka sebagai perkakas sadja. Rakjat menderita azab dunia diatas medan peperangan,

mendjadi umpan pelor dan gas ratjun,..... Atas nama kehormatan “bangsa” tetapi sebenarja untuk keperluan kaum madjikan jang berkuasa, seperti djuga terbukti dalam perang besar. Bahaja itu tidak dapat disangkal akan tetapi mau atau tidak rakjat mendjadi perkakas kaum jang berkuasa, itu sebagian besar bergantung kepada d i d i k a n rakjat. Rakjat yang bersifat dan bersemangat budak, memang sudi mengurbankan diri untuk golongan jang dipertuan atau untuk kaisar dan radjanja. Akan tetapi rakjat jang sadar akan harga dirinjatidak mudah disuruh berbuat demikian. Istimewa rakjat jang insaf akan kedaulatan dirinja.

Pendek kata, bagaimana djuga soal ini dibalik-balik, hanja satu djuga keputusan jang didapat: r o h k e b a n g s a a n adalah satu masalah jang penting dalam pergerakan kemerdekaan jang tidak dapat disia-siakan, sekalipun oleh mereka jang tiada menjukainja. A d a n j a dalam tiap-tiap perdjjuangan jang bersangkutan dengan Bngsa dan Tanah-Air tidak dapat disangkal lagi!

Eiwajat dunia tjukup member bukti, bahwa pada bangsa jang bergerak untuk kemerdekaanja, tjita-tjita kepada internasionalisme kalah oleh semangat kebangsaan.

Ambillah misalnja tanah Irlandia sesudah perang besar tatkala bangsanja berdjjuang melawan Inggeris untuk mentjapai kemerdekaanja. Bagaimana djuga giatnja Labour-Party ditanah Irlandia berusaha untuk menanam bibit internasionalisme dan persaudaraan umum, pekerjaannja tiada berhasil. Sungguhpun ia suatu partai buat kaum buruh, ia tidak sanggup menarik hati kaum buruh Irlandia. Sebagian jang terbesar daripada kaum buruh itu berfihak kepada partai Sin Fein jang semata-mata berdasar kebangsaan. Pada pemilihan umum untuk parlemen Irlandia Labour-Party hampir tidak dapat suara.

Kita tidak perlu mengambil tjontoh lagi kepada India, Mesir, Tiongkok d.l.l., kita perhatikan sadja keadaan dinegeri kita dizaman P.K.I. Partai ini memakai dasar internasionalisme dan program serta djanji-djanjinja sangan menarik hati rakjat jang banjak. Akan tetapi P.K.I sendiri tidak sanggup menarik orang banjak kedalam golongannja. Supaja dapat pengaruh atas rakjat, ia terpaksa mendirikan suatau anak-partai jaitu S a r i k a t R a k j a t, jang tiada berdasar komunisme, melainkan bersifat Nasionalisme radikal. Dan anggauta-anggautanja jang terbanjak terdiri atas kaum saudagar-saudagar ketjil. Masuk mereka kedalam Serikat Rakjat semata-mata dikemudikan oleh semangat kebangsaan.

Bukti-bukti ini menjatakan sedjelas-djelasnja, bahwa dinegeri jang tidak merdeka pergerakan rakjat berdasar kebangsaan. Kalau ada partai jang menyebut sifatnja “internasional”, itu tjuma nama sadja, batinnja nasional djuga!

Keadaan itu tidak sadja kelihatan dinegeri-negeri djadjahan, melainkan djuga dibenua Barat!

Bukti jang terang tampak pada pergerakan social-demokrasi jang berdasar internasionalisme dan mempunjai I n t e r n a s i o n a l e sendiri. Memakai dasar “internasionalisme” belum lagi berarti “bersemangat internasionalisme” betul-betul. Ja, selagi dunia aman dalam perdamaian, seluruh golongan social-demokrasi bernjanji ke-internasional-an. Akan tetapi kalau timbul pertumbukan antara negeri dengan negeri, maka internasionalisme tadi belah dua, seperti terbukti pada tahun 1914. Tatkala perang besar bertjabul kaum social-demokrasi Djerman t I d a k mentjegah peperangan melainkan memberikan suara mereka untuk menerima begroting perang. Demikian djuga kaum social-demokrasi Perantjis. Dan dimedan perang kaum buruh Djerman berbunuh-bunuhan dengan kaum buruh Perantjis.

Sebaliknja lagi mereka bersatu hati dengan kaum kapitalis untuk membela T a n a h – A i r Djerman. Disini ternjata, bahwa seruan kebangsaan lebih kuat bersuara dalam hati mereka daripada seruan internasionalisme. Dan marhum Mr. T r o e l s t r a sendiri mentjeritakan dalam Gedenkschriftnja, bahwa utusan-utusan kaum social-demokrat Djerman pada Kongres Sosial-Demokrasi di Stockholm menundjukkan sikap imperialis terhadap negeri Belgia. Ja lebih lagi: pada Kongres itu mereka berkerdja sebagai spion Tanah-Air merdeka. Keselamatan Tanah-Air Djerman masih lebih berharga daripada tjita-tjita internasionalisme.

Kita sebut hal ini bukan hendak menjindir, melainkan umtuk menjatakan, betapa kuatnja roh kebangsaan itu. Hal ini member bukti pula, bahwa semangat kebangsaan itu tidak akan luput, selama negeri lagi berbatas-batas dan selama masih ada satu bangsa diperintahi oleh bangsa asing.

Ada lagi suatu bukti jang menjatakan bahwa internasionalisme dimulut belum lagi internasionalisme dihati. Tatkala keradjaan Ustria-Unggaria masih ada, masih satu Negara, terdapat disana pisahan-pisahan dalam golongan kaum social-demokrasi menurut bangsa masing-masing. Dasar dan tudjuan partai-partai social-demokrasi didalam negeri itu sama. Akan tetapi kaum social-demokrasi bangsa Tzech dan Slowakia dan lain-lain mempunjai partai sendiri-sendiri dan tidak mau bertjampur djadi satu dengan partai social-demokrat bagsa Djerman atau Unggaria. Pada masa itu bangsa mereka belum merdeka, melainkan mendjadi anak buah keradjaan Ustria-Unggaria dan dikuasai oleh golongan Djerman. Pada kaum social-demokrat bangsa Djerman ada perasaan siterdjadjah terhadap kepada sipendjadjah. Biarpun negeri satu, oleh sebab itu ada tindasan bangsa, kaum jang batinnja sefaham dan seapas berpisah-pisah.

Demikian djuga didalam Negara Tzecho-Slowakia sekarang! Kaum Sosial-demokrat Tzech, oleh karena bangsa Djerman dinegeri itu merasa diri mereka terperintah oleh bangsa Tzech! Bagaimana djuga dalam teori mereka menanamkan diri internasional, pada lahirnja mereka tinggal orang D j e r m a

n, bersemangat k e b a n g s a a n D j e r m a n. tidak heran karena sebagian tanah asli Djerman, djaitu Bohemen, sekarang dibawah perintah Tzecho-Slowakia!

Bukti-bukti ini tjukup mendjadi keterangan, bahwa perasaan kebangsaan tidak dapat dipisah dari pergerakan kemerdekaan bangsa. Sekalipun didalam teori kaum buruh Barat tiada mempunjai Tanah-Air, riwayat dunia jang baru lalu menjatakan sedjelas-djelasnja, bahwa didalam tubuh mereka masih mengalir darah kebangsaan. Dalam sanubari orang banjak masih tertanam rasa tjinta kepada Tanah-Air.

Semuanja itu menundjukkan kepada kita, bahwa perasaan internasionalisme itu belum lagi berakar dalam. Kalau datang saat jang penting untuk memperlihatkan adanja, maka semangat kebangsaan djuga jang bangun, jang mentjul keluar.

Sebab itu P(endidikan) N(asional) I(ndonesia) daripada memakai topeng internasional palsu, lebih baik terus terang memakai badju kebangsaan, n a s i o n a l i s m e j a n g b e n a r! kita peringatkan lagi disini apa jang tertulis dalam “daulat rakjat” No.13 tentang pendirian jang sehat ini: “selama Indonesia belum mentjapai kemerdekaannja dan belum dapat mengatur nasibnja sendiri, bersatu hati dengan Barat biasanja tidak akan tertolong, melainkan digolong. Sungguhpun begitu kita tidak melupakan tjita-tjita kita jang paling tinggi, jaitu akan mendjapai “persaudaraan manusia dan bangsa-bangsa diatas dunia ini”. Akan tetapi sjarat jang pertama untuk mentjapai tingkat jang paling tinggi ini ialah menjelamatkan dahulu k e b a n g s a a n Indonesia dengan tenaga sendiri!

Dalam fasal 2 daripada Peraturan Dasar diterangkan sikap kita lebih landjut: “asas kebangsaan mengandung arti, bahwa kemerdekaan Indonesia terutama hanja dapat ditjapai dengan usaha rakjat Indonesia sendiri dengan tidak mengharap tundjangan dari luar. Sebab itu pula maka jang mendjadi pedoman pergerakan *Pendidikan Nasional Indonesia* tak lain, melainkan Semangat Nasional jang tertaman didalam hati rakjat Indonesia. Buruk baiknja nasib rakjat Indonesia dan langkah jang akan dijalankan untuk memperbaiki nasib itu haruslah hasil pertimbangan dan perbuatan sendiri dan tidak usah suruhan dari luar”.

Keterangan serta tjontoh-tjontoh jang disebut diatas tjukuplah untuk menjatakan, bahwa Pendidikan Nasional Indonesia tidak tersesat, kalau ia “gila dasar kebangsaan”. Dengan memakai dasar kebangsaan itu ia menjalankan suatu r e a l – p o l i t i k, politik jang nyata.

Akan tetapi bagaimanakah rupa kebangsaan jang dipupuk oleh Pendidikan Nasional Indonesia?

Kebangsaan ada bermatjam-matjam, menurut rupa dan warna golongan jang memadjukannja. Ada kebangsaan t j a p – n I n g r a t, ada kebangsaan t j a p – I n t e l e k dan ada pula kebangsaan t j a p – r a k j a t. riwayat dunia tjukup member bukti , bahwa ketiga-tiga golongan ini ada senantiasa.

Dikalau kaum ningrat menjebut Indonesia Merdeka, maka terbajang dimuka mereka suatu Indonesia jang terlepas dari tangan Belanda, akan tetapi takluk kebawah kekuasaan mereka. Mereka mengukur kebangsaan itu kepada golongan sendiri. Dari zaman dahulu kala sampai kewaktu sekarang kaum ningrat tinggal tetap mendjadi golongan pemerintah. Dahulu tatkala tanah-tanah Indonesia diperintah oleh radja sendiri, mereka menjdjadi tundjangan radja-radja itu, mendjadi tiang kekuasaan autokrasi dan feodalisme. Sekarang, waktu Nederland berkuasa disini, merekalah djuga jang mendjadi sendi pemerintahan Belanda. Orang Belanda mengerti, bahwa rakjat Indonesia lebih mudah diperintah dengan perantaraan “Inlandsche Hoofden” –kepala-kepala negeri- sendiri. Djadinja kaum ningrat telah mempunyai tradisi jang lama sekali sebagai kaum pemerintah! Oleh karena itu, maka tertanam keinsafan dalam sanubari mereka, bahwa merekalah juga akan berkuasa di Indonesia, kalau Indonesia sudah merdeka. Mereka merasa dalam hati, bahwa mereka mempunyai satu hak-berdasar-riwayat alias Historisch Recht atas pemerintahan Indonesia. Sebab itu mereka senantiasa mentjita-tjitakan kembalinja Keradjaan Modjopahit keatas alam Indonesia ini.

Dalam kebangsaan jang seperti itu, rakjat jang banjak tidak terhitung. Hanja kaum ningrat atau kaum bangsawan jang mendjadi ukuran bangsa!

Bagaimana pula rupa k e b a n g s a a n j a n g b e r t j a p k a u m I n t e l e k ?

Menurut faham kaum intelek, kaum terpeladjar atau kaum tjerdik pandai, Indonesia Merdeka haruslah dibawah kekuasaan mereka sendiri. Negeri tidak madju dan makmur kalau tidak dikemudikan oleh orang jang berpengetahuan tinggi. Bagi mereka orang mendjadi orang pemerintah bukan karena keturunannja, melainkan karena ketjakapannja sendiri. Bukan bangsawan karena darah, jang mereka akui, melainkan bangsawan karena otak dan ketjakapan.

Menurut teori mereka, rakjat jang banjak itu miskin dan alpadan terpaksa pula bekerdja keras sehari-hari untuk mentjaci nafkah buat hidup. Oleh karena itu rakjat tidak mempunyai waktu untuk memikirkan politik dan keselamatan negeri. Sebab itu tidak wadajib rakjat jang tidak mampu itu diberi suara tentang urusan negeri. Pada sifatnja, rakjat itu tahu mengikut sadja. Sebab itu nasib rakjat dan urusan negeri ada ditangan kaum intelek. Mereka seolah-olah mengumpamakan diri mereka sebagai dewa orang banjak.

Njatalah bahwa rakjat, menurut kejakinan jang seperti itu, tidak lain daripada perkakas kaum intelek sadja. Rakjat hanja dipakai untuk membesarkan pengaruh dan kekuasaan mereka.

Djadinja, djikalau kaum intelek binjara tentang kebangsaan, mereka mengingat kebangsaan tjap mereka sendiri. Indonesia Merdeka dibawah kekuasaan kaum intelek, itulah idaman mereka! Hanja

kaum tjerdik-pandai sadja mendjadi ukuran bangsa. Kebangsaan jang seperti itu boleh djuga dinamai kebangsaan liberal.

Akan tetapi, bukan kebangsaan-ningrat dan bukan pula kebangsaan intelek jang dikehendaki oleh Pendidikan Nasional Indonesia, melainkan k e b a n g s a a n r a k j a t! “karena rakjat itu badan dan jiwa bangsa”. Dan rakjat itulah jang mendjadi ukuran tinggi rendah deradjat kita. Dengan rakjat kita akan naik dan dengan rakjat kita akan turun. Hidup atau matinja Indonesia Merdeka semuanya itu tergantung kepada semangat rakjat. Pengandjur-pengandjur dan golongan kaum terpeladjar baru da berarti, kalau disampingnja ada rakjat jang sadar dan insaf akan kedaulatan dirinja, dipangkuan rakjat jang banjak terdengar debar-debaran darah bangsa. Kewadajiban kaum intelek tidak lain, melainkan menduga kemauan rakjat itu dan menerangi djalan tempat kemauan itu madju kemuka. Kalau Indonesia sampai merdeka, mestilah ia mendjadi k e r a d j a a n – r a k j a t, bedasar kemauan rakjat.

Sebab itu menurut kejakinan Pendidikan Nasional Indonesia kebangsaan itu haruslah dihinggapi semngat rakjat, djandinja berdasar k e r a k j a t a n!

II. K E R A K J A T A N

Seperti dengan soal kebangsaan, pengertian tentang kerakjatan, kjabat, bermacam-macam pula, menurut sifat golongan yang mengandjurkannya. Dan kerakjatan yang dipahamkan oleh Pendidikan Nasional Indonesia sebagai asas yang kedua padanya berlainan daripada tjita-tjita kerakjatan yang biasa, tiruan dari Demokrasi Barat. Dalam fasal 2 daripada Peraturan Dasar tersebut:

“Asas kerakjatan mengandung arti, bahwa kedaulatan ada pada rakjat. Segala hukum (Recht, peraturan-peraturan negeri) haruslah bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakjat yang banjak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakjat kalau ia beralasan k e d a u l a t a n r a k j a t. Asas kedaulatan rakjat inilah yang mendjadi sendi pengakuan oleh segala djenis manusia yang beradab, bahwa tiap-tiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri”.

Inilah dasar kerakjatan Pendidikan Nasional Indonesia! Supaja terdjapai suatu masyarakat yang berdasar Keadilan dan Kebenaran, haruslah rakjat insaf akan haknya dan harga dirinya. Kemudian haruslah ia berhak menentukan nasibnya sendiri dan perihal bagaimana ia mesti hidup dan bergaul. Pendeknya, tjara mengatur pemerintahan negeri, tjara menjusun perekonomian negeri, semuanya harus diputuskan oleh rakjat dengan mupakat. Pendek kata, rakjat itu d a u l a t alias radja atas dirinya. Tidak lagi orang seorang atau sekumpul orang pandai atau satu golongan ketjil sadja yang memutuskan nasib rakjat dan bangsa, melainkan r a k j a t s e n d i r i. inilah arti kedaulatan rakjat! Inilah suatu dasar demokrasi atau kerakjatan yang seluas-luasnya. Tidak sadja salam hal politik, melainkan djuga dalam hal ekonomi dan sosial ada demokrasi; keputusan dengan mupakat rakjat yang banjak.

Dinpengertian yang luas inilah ternjata perbedaan asas kedaulatan rakjat yang mendjadi dasar Pendidikan Nasional Indonesia dengan demokrasi tjara Barat, yang berasas kepada tjita-tjita Volkssouvereiniteit.

Supaja terang perbedaan itu kita selidiki dahulu duduknya D e m o k r a s i B a r a t.

Demokrasi artinja pemerintahan rakjat, jaitu rakjat memerintah diri sendiri. Selain daripada demokrasi terdapat dalam sedjarah Dunia pemerintahan Negeri yang berdasar a u t o k r a s i, jaitu orang seorang berkuasa, dan o l i g a r c h i, jaitu kekuasaan hanja ditangan satu golongan ketjil.

Montesquieu, seorang ahli perantjis mengatakan, bahwa pemerintahan demokrasi tidak dapat berlaku tjepat seperti pemerintahan autokrasi dan oligarchi, karena senantiasa diadakan lebih dahulu mupakat antara orang banjak. Sungguhpun begitu demokrasi lebih baik daripada autokrasi atau oligarchi. Jang kemudian ini mudah menimbulkan kelaliman. Dan kelaliman mudah pula menimbulkan revolusi. Dalam demokrasi tidak ada revolusi, karena rakjat memerintah diri sendiri. Kepada diri sendiri, rakjat tidak dapat berontak.

Montesquieu membagi kekuasaan jang ada dalam negeri atas tiga djenis. Pertama kekuasaan jang memperbuat hukum Negeri; kedua, kekuasaan jang mendjalankan peraturan-peraturan jang diperbuat; ketiga, kekuasaan jang mendjaga, supaja hukum negeri itu tidak dilanggar orang. Kekuasaan jang pertama ada pada Dewan Rakjat; kekuasaan kedua pada Pemerintah; dan kekuasaan jang ketiga dilakukan oleh Hakim, jang lepas dari pengaruh Dewan Rakjat dan Pemerintah.

Adapun rupa demokrasi atau pemerintah rakjat itu tidak sama selama-lamanja. Demokrasi tua, seperti di Athene (Griek) dan di Rum, berbeda dengan demokrasi sekarang jang dilahirkan oleh Revolusi perantjis. perbedaan ini bersangkut dengan besarnja lingkungan negeri dizaman purbakala dan diwaktu sekarang. Dizaman sekarang terdapat Negara atau keradjaan jang besar-besar, jang menjatukan beberapa kota dan desa mendjadi satu Tanah Air. Dizaman tua tiap-tiap republik itu terdiri atas satu kota sadja. Misalnya polis (Stand-Staat) ditanah Griek dan Civitas (burgerschap; volksgemeenschap) di Rum.

Dalam polis dan civitas itu pemerintahan rakjat atau demokrasi dilakukan oleh orang banjak. Segala undang-undang negeri diputuskan oleh Rapat Negeri, jang dikundjungi oleh anak negeri jang balig semuanja. Demikian juga pengadilan dilakuikan oleh orang banjak. Disini terdapat keadaan jang kekuasaan membuat Hukum Negeri dan kekuasaan Kehakiman ada pada tangan orang banjak. Jang sedemikian dapat langsung, karena Negeri atau Polis alias Civitas diwaktu itu tidak begitu luas dan tidak begitu banjak penduduknja. Dalam persekutuan hidup jang sematjam itu demokrasi jang langsung dijalankan oleh orang banjak, dapat terdjadi.

Akan tetapi demokrasi rakjat itu mustahil dapat dilakukan oleh suatu keradjaan atau Negara dizaman sekarang, karena lingkungannja amat luas dan rakjatnja amat banjak. Ambillah misalnja negeri Belanda atau Perantjis! Mustahil orang banjak dalam negeri jang jumlahnja berdjuta-djuta dapat dikumpulkan kedalam suatu rapat pada satu tempat, misalnja di Den Haag atau di Paris. Sebab itu demokrasi sekarang mestilah lain rupanja dari Demokrasi Tua atau Demokrasi Rakjat umum.

Demokrasi atau Pemerintahan Rakjat sekarang dilakukan dengan djalan perwakilan. Rakjat jang banjak memilih wakil-wakilnja pada tiap-tiap waktu jang ditentukan untuk bersidang didalam Dewan

R a k j a t. djadinja pemerintahan rakjat sekarang dilakukan dengan perantaraan Dewan Rakjat atau Parlemen.

Parlemen membuat undang-undang dan hukum negeri atau mensahkan undang-undang jang dipertimbangkan oleh Pemerintah, Dewan Minister. Kewajiban Pemerintah mendjalankan peraturan-peraturan jang diputuskan dan disahkan oleh parlemen.

Menurut dasar demokrasi sekarang Pemerintah itu dapat berdiri kalau diakui atau disetujui oleh Parlemen. Suatu pemerintah jang tiada dipertjajai oleh Parlemen tentu tidak dapat hidup lama, karena Dewan Rakjat dapat menewaskan dia setiap waktu dengan menerima mosi tanda tidak pertjaja atau dengan menolak begroting jang dipertimbangkan oleh Pemerintah kepada di. Kalau Pemerintah jang dijatuhkan itu menjangka, bahwa gelagat Dewan Rakjat itu tidak lagi tjotjok dengan kemauan rakjat jang terbanjak, maka ia berhak membubarkan Dewan Rakjat dan mengadakan dengan segera pemilihan baru untuk menduga kemauan rakjat jang sebenarnya. Djika sekiranya rakjat jang memilih mengutus kembali wakil-wakil lama kedalam Dewan Rakjat jang baru itu, maka ini suatu tanda bagi pemerintah, bahwa ia mesti undur supaja digantikan oleh pemerintah baru.

Djadinja, dalam perdjungan anantara Parlemen dan Pemerintah, jang kemudian ini hanja boleh membubarkan Parlemen satu kali sadja untuk menduga kemauan rakjat. Ia mesti mundur, kalau sikap Dewan Rakjat disetujui oleh rakjat yang memilih. Keadaan ini penting artinja dalam sedjarah Parlementarisme di Eropah Barat. Lama berlaku perdjungan antara Dewan Rakjat dan Pemerintah untuk merebut kekuasaan jang paling tinggi. Achirnja Dewan Rakjat yang menang; ia lebih berkuasa daripada Pemerintah. Sebab itu, dalam susunan Parlementaire Democratie sekarang, pemerintah itu perlu mendapat kepertjajaan dari Dewan Rakjat. Barulah ia dapat bekerdja mendjalankan kewadjabannja. Kalau tidak, ia mesti undur, supaja digantikan oleh suatu pemerintah jang dipertjajai oleh Dewan Rakjat.

Oleh sebab menurut dasar demokrasi keputusan jang paling tinggi dalam hal urusan dan pemerintahan negeri ada pada rakjat dengan perantaraan Badan Perwakilannja, maka pemerintahan jang sematjam itu, boleh dinamai p e m e r i n t a h a n r a k j a t. demokrasi ialah pemerintahan rakjat!

Menurut dasar demokrasi itu, hak rakjat untuk menentukan nasibnja tidak sadja ada pada putjuk pemerintahan negeri, melainkan djuga pada tiap tempat, dikota, didesa dan didaerah. Tiap-tiap golongan persekutuan itu mempunjai Badan Perwakilan sendiri, seperti Gemeenteraad, Provinciale Raad dan lain-lainnja . dengan keadaan yang demikian, maka tiap-tiap bagian atau golongan rakjat mendapat a u t o n o m i (membuat dan mendjalankan peraturan-peraturan sendiri) dan z e l f b e s t u u r (mendjalankan

peraturan-peraturan yang dibuat oleh dewan yang lebih tinggi). Djadinja, bukan saja persekutuan yang besar, rakyat seumumnya, mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga tiap-tiap bagian dari negeri atau bagian dari rakyat yang banyak. Keadaan yang seperti itu penting sekali, karena keperluan tiap-tiap tempat dalam satu negeri tidak sama, melainkan berlain-lain.

Inilah isi atau pokok (kern) Demokrasi Barat, yang dinamai orang juga *Modern Democratie*. rakyat memerintah diri sendiri dengan perantaraan badan-badan Perwakilan, yang susunannya dipilih oleh rakyat sendiri. Akan tetapi melakukan asas-asas demokrasi itu berbeda-beda dalam praktik, menurut keperluan golongan masing-masing. Sebab itu ada *Conservative democratie*, ada *Liberal democratie*, ada *vrijzinnige democratie*. mana golongan yang kuat atau berpengaruh besar, itulah yang member rupa kepada demokrasi tadi.

Disini kita tidak akan membitjarakan bentuk dan susunan demokrasi itu masing-masing, karena soal ini terletak diluar garis karangan ini. Tjukuplah buat pengetahuan, bahwa diwaktu sekarang kaum kapitalis yang berkuasa di benua Barat. Oleh sebab itu demokrasi disana memakia rupa kapitalische Democratie atau juga dinamai orang *Burgerlijke Democratie*. Dan tjita-tjita *Moderne Democratie* yang begitu bagus pada dasar dan asannya tidak berlaku lagi. *Modern Democratie* berkehendak, supaya rakyat dapat menentukan nasibnya sendiri! tetapi yang sedemikian tidak terdapat didalam kapitalistische democratie, dimana kaum kapitalis yang tertjil golongannya menguasai penghidupan rakyat yang banyak. Djadinja, demokrasi yang ada di Barat sekarang tampak pintjang, menjimpang dari tjita-tjita demokrasi asli yang disandarkan kepada *Volkssouveriniteit*, Kedaulatan Rakyat. Apa sebabnya djadi pintjang?

Tentang soal ini perlu diselidiki asal-usulnya sedikit!

Tjita-tjita *Volkssouveriniteit* yang timbul pada bagia kedua daripada abad yang ke-XVIII adalah bekas atau anak daripada teori dan semangat *Individualisme*, yang dibangkitkan dengan giat oleh beberapa ahli ilmu sosial pada abad ke XVII dan ke XVIII. Yang ternama sekali diantara mereka ialah *J.J Rousseau*. sebagai dasar teori individualisme disebutnya bahwa “*manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka*”. ia boleh membuat apa saja menurut suka hatinya, asal saja djangan mengganggu keamanan orang lain.

Dalam dua matjam soal dasar individualisme itu memadjukan perlawanan!

Dalam soal *filosofi* ia timbul sebagai reaksi terhadap semangat Universalisme seperti yang kelihatan di zaman pertengahan menurut tjita-tjita Agama Katolik. Sepanjang tjita-tjita universalisme tiap-tiap orang harus merasa dirinya sebagai bagian daripada pergaulan umum. Apa yang

dikerdjakannja haruslah diatur, bukan untuk keperluan dirinja sendiri, melainkan untuk orang banjak. Tiap-tiap orang dipandang sebagai anggauta daripada badan jang satu. Kalau perbuatannja salah, maka badan tadi sakit dan anggauta-anggauta lain merasa sakit pula. Semangat ini mentjiptakan p e r s a t u a n m a n u s i a. akan tetapi sungguhpun dasarnja ada baik, dijalanja amat mengikat orang, karena jang dikatakan persekutuan umum itu sama sadja dengan O r g a n i s a s i G e r e d j a K a t o l i k. lahirnya tiap-tiap orang harus takluk kebawah perintah P a u s jang mendjadi kepala Geredja Katolik. Dan ia ini dipandang sebagai wakil Tuhan diatas dunia. Ikatannja ada begitu keras, sehingga orangpun tidak merdeka berfikir. Kalau bumi ini rata menurut faham Geredja tadi, maka tiap-tiap orang mesti menerima “kebenaran” itu. Seorang ahli ilmu alam bernama Coupernicus, hampir dibakar diatas pentjaka (timbunan kaju api) dimuka umum atas perintah kepala Geredja Katolik, karena ia berani menerangkan, bahwa bumi ini bulat dan tidak rata seperti jang diadjarkan oleh Geredja tadi. Takuk akan nanti dibakar ia mentjabut kembali keterangan-keterangannja, membatalkan keyakinannja sendiri.

Kalau orang sudah tidak merdeka berfikir dalam ilmu, apalagi dalam Agama.

Agama jang berlainan daripada Agama Katolik ditjegah dan dialangi timbulnja. Kekerasan kaum Katolik menindis kaum Protestan menimbulkan reaksi jang hebat. Sebab itu abad pertengahan di Eropah berlumur dengan darah jang mengalir dari medan peperangan Agama.

Dan jang diudjud oleh tjita-tjita Universalisme, seperti solidaritet, persatuan manusia, supaja tiap-tiap orang memandang dirinja sebagai anggauta daripada badan persekutuan jang satu, gagal karena kerasnja kongkongan Geredja Katolik. Sikap jang keras itu sesuai dengan masanja, sebab zaman pertengahan adalah zaman feodalisme.

Keadaan jang seperti itu tidak boleh tidak mesti membangkitkan perlawanan. Semangkin keras kongkongan roh manusia, semangkin keras aksi jang mau melepaskannja. Dan individualism timbul, menentang semangat Universalisme tadi. Selagi Universalisme mengadakan suatu masjarakat jang terikat, individualism memadjukan masjarakat jang merdeka. Sebab itu dasarnja manusia lahir merdeka dan hidup merdeka.

Dalam soal u r u s a n N e g e r i , semangat individualisme menantang pemerintah f e o d a l i s m e; kekuasaan kaum ningrat atas rakjat negeri.

Feodalisme djuga anak dari zaman pertengahan! Menurut kemauan Geredja Katolik segala kekuasaan ada padanja: kekuasaan dalam urusan Agama dan kekuasaan dalam urusan pemerintahan Negeri. Pendeknja, kekuasaan achirat dan kekuasaan dunia tidak boleh dibagi-bagi, melainkan s a t u ditangan paus.

Kalau diperhatikan pergaulan hidup juga primitive (sederhana), disana kepala Agama atau Pendeta mendjadi pemimpin segala rupa. Ia mendjadi dukun, ia mengobat roh orang sakit, ia kepala daripada kaumnja dan ia djuga mendjadi kepala perang. Akan tetapi lama-kelamaan, kalau kaum tadi sudah bertambah besar dan urusan keperluan urusan mereka bertambah banjak, maka urusan peperangan pindah ketangan satu kasta, kaum pahlawan (ridder). Dari kaum ini timbul kaum ningrat !

Kemudian dizaman pertengahan, kaum ningrat itu mendapat kekuasaan pemerintah. Sebagian daripada kekuasaan dunia diserahkan kepada mereka. Jang paling megah (djempol) diantara mereka mendjadi putjuk. Dengan itu datanglah masa jang negeri diperintah oleh r a d j a.

Mula-mula radja itu duduk dibawah paus, kepala Agama, akan tetapi, lama-kelamaan radja-radja itu meminta sama deratjatnja dengan Kepala Agama.

Mereka meminta, supaja segala kekuasaan dibagi dua. Paus memegang kekuasaan Agama sadja, urusan achirat; raja mengambil kekuasaan dunia, kekuasaan pemerintah sepenuh-penuhnja.

Kehendak ini ditolak oleh Paus. Oleh karena itu timbullah perdjjuangan jang hebat antara Kepala Agama dan Radja. Achirnja kaum radja beroleh kemenangan dan persamaan deradjat antara Kepala Agama dan Radja terdapat. Kekuasaan Geredja surut selangkah lagi, tinggal urusan achirat sadja. Urusan Negeri, urusan Pemerintahan terserah ketangan Radja. Semendjak itu Kepala Geredja dan Radja hidup dalam perdamaian serta bantu-membantu.

Pemerintahan radja jang berdasarkan autokrasi, ditundjang oleh kaum ningrat, itulah jang dinamai f e o d a l i s m e. kemudian pemerintahan feodalisme itu mendapat rupa S t a n d e n – s t a a t, tatkala kekuasaan kaum ningrat, atas daerah mereka masing-masing diakui oleg Radja dan mereka sendiri diberi bersuara dalam urusan Staat dengan perantaraan D e w a n P e r w a k i l a n N i n g r a t. disini autokrasi radja mulai dibatasi oleh kaum ningrat, jang menjadi “basero” dalam pemerintahan Negeri. Sebab itu Standen-Staat, jaitu keradjaan Kasta alias kaum diatas! Rakjat jang banjak tiada mempunjai suara sedikit djuga dalam urusan Negara. Ia tak lain daripada perkakas kaum ningrat, menghasilkan apa jang perlu bagi mereka. Nasibnja ditentukan untuk menerima perintah dari atas!

Pemerintahan negeri jang memperbudak orang banjak tentu tidak dapat kekal; lambat laun mesti datang perlawanan. Timbul s e m a n g a t i n d i v i d u a l i s m e, jang menjadarkan orang akan harga dirinja tiap-tiap orang lahir merdeka dan hidup merdeka. Sebab itu tidak pantas, kalau peri hal penghidupannja terikat dan tertindis. Diatas dasar individualism itulah Rousseau mengembangkan tjita-tjita Volkssouvereiniteit, kedaulatan rakjat. Dan tjita-tjita itulah jang mendjadi pedoman pergerakan besar di tahun 1789, jang meruntuhkan kekuasaan feodalisme. Dan diatas kuburan Standen-Staat itu

terdiri masyarakat baru, yang menudju “kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan”..... sekurang-kurangnya dalam teori. Sebab itu revolusi Perantjis did jundjung tinggi oleh orang Barat, sebagai sumber demokrasi sekarang.

Demokrasi barat ini memakai dasar sama rata, sama rasa! Hak si miskin disamakan dengan hak si kaya; hak si-buruh atau si-tani tidak berbeda lagi dengan hak orang bangsawan (ningrat). Tidal lagi kaum ningrat sadja yang boleh bersuara tentang pemerintahan negeri, melainkan djuga rakjat dengan perantaraan Dewan Rakjat. Dan mahkamah yang akan menimbang perkara kaum ningrat tidak berbeda pula daripada mahkamah untuk perkara orang biasa.

Njatalah sekarang! Semangat individualisme lahir untuk memetjah belenggu pergaulan hidup dan meruntuhkan keradjaan feodalisme serta member kemerdekaan kepada orang-orang untuk menentukan nasib sendiri. Diatas dasar individualism itulah terdiri demokrasi barat. Dan itulah pula yang mendjadi pangkal kepintjanganja. Demokrasi hanja terdapat dalam hal politik dan hak. Dalam hal perekonomian dan pergaulan sosial masih berlaku autokrasi. Rakjat yang banjak masih menderita kemegahan kaum kapitalis dan madjikan. Udjud Revolusi Perantjis yang utama, jaitu “kemerdekaan, persamaan da persaudaraan” tidak pernah terdjapai. Jang terdjapai hanja politieke democratie; economische democratie bertambah djauh. Oleh krena itu persamaan hak tidak membawa kemerdekaan kepada kaum yang lemah dan tidak pula mendatangkan persaudaraan, melainkan petjahan yang dibuktikan oleh perdjuanagn kelas dan kasta.

Selain dari melepaskan roh manusia daripada kongkong-kera kaum diatas, semangat individualise membawa kemerdekaan berpikir, sehingga tampak kemandjuan yang tjepat dalam ilmu, terutama ilmu teknik. Serentak dengan i n d i v i d u e e l e r e v o l u t i e (kemerdekaan orang seorang) di Perantjis , timbul I n d i v i d u e e l e r e v o l u t i e (lahirnja zaman mesin) di inggeris. Kedua-duanja mendjadi motor dan kodrat m o d e r n K a p i t a l i s m e.

Semangat individualism memadjukan politik liberalism dan liberalism memperkuat roh kapitalisme.

Dalam p o l i t i k orang berpedoman kepada tjita-tjita bahwa tiap-tiap manusia lahir merdeka dan hidup merdeka. Keluasan pengertian ini ternjata didalam konstitusi (undang-undang dasar) Perantjis yang pertama yang melarang orang berserikat. Menurut paham individualism tadi perserikatan itu mengikat atau membatasi kemerdekaan orang. Paham yang demikian mentjelaskan kaum buruh. Mereka tidak boleh berserikat, tidak boleh mengadakan perkumpulan sekerdja, sedangkan nasib mereka sebagai kaum lemah tergantung kepada perserikatan itu. Oleh karena itu melarat hidup mereka!

Dalam e k o n o m i semangat individualism memakai semboyan “laissez faire, laissez passer”, artnja merdeka berbuat dan merdeka berdjalan!

Selagi kaum buruh dilarang berserikat, m o d a l atau k a p I t a l dapat berkumpul-kumpul mendjadi besar dan kuat. Sebab perusahaan tangan ditukar dengan perusahaan mesin, orang seorang itu tidak tjukup lagi mempunyai modal untuk mendirikan pabrik sendiri. Dengan itu timbullah perusahaan jang besar-besar jang memakia rupa seperti Naamlooze Vennootschap dan lain-lainnja, jang dikemudian oleh capital bersama. Keluar kelihatan hanja modal jang berkumpul, akan tetapi pada batinnja k a u m k a p i t a l i s jang berserikat. Sebab kapitalisme itu mentjari untung besar dan merdeka bersaing, maka terdapat perubahan jang tjepat sekali dalam susunan badan-badannja. Disini terdapat perdjungan jang hebat, tindis-menindis dan bunuh-membunuh, berkedjar-kedjar menurunkan harga, supaja jang lemah tewas dan segala untung djatuh ketangan jang kuat. Disana tampak badan-badan kapitalisme itu memperkuat diri dengan djalan persatuan dan konsentrasi, supaja dapat menguasai harga pasar.

Tidak sadja perusahaan-perusahaan jang serupa atau sematjam, melainkan djuga jang berlainan tetapi bersangkut-paut, seperti tambang besi dan tambang batu bara sampai ke perusahaan transport, menggabungkan diri menjadi satu badan jang mahabesar, sebagai Kertel, Trust dan Konsern, jang satu-satunja mempunyai capital sampai berates miljun. Demikianlah terdjapai apa jang dinamakan orang h o r i z o n t a l e dan v e r t i c a l e c o n c e n t r a t i e. pun bank-bank menudju dan menempuh djalan konsentrasi djuga. Dengan djalan konsentrasi itu kaum kapitalis mengusai perekonomian dunia dan menanam a u t o k r a s i d a l a m e k o n o m i. dalam pada itu mereka tidak puas berichtiar memperbaiki perusahaan mereka, memperbaiki mesin-mesin jang ada dan mentjari teknik-teknik baru jang lebih baik dan lebih semputna daripada jang dahulu. Dynamik perdjungan mereka mentjari untung besar dan kemerdekaan bersaing mendorong mereka bekerja demikian. Dengan itu timbullah zaman R a s i o n a l i s a s i dalam ekonomi Barat. Rasionalisasi artinja: berusaha setjra demikian, supaja dengan tenaga jang paling sedikit terdapat hasil jang sebesar-besarnja.

Semangat rasionalisasi senantiasa menimbulkan perubhan didalam industri. Senantiasa mesin dimadjukan kemuka dengan tenaga jang lebih kukuh: senantiasa tenaga manusia diganti dengan tenaga buat dari wadja, sehingga berdjuta-djuta kaum buruh terlantar tidak dapat pekerdjaan. Demikianlah nasib orang banjak diputuskan oleh satu golongan ketjil sadja, golongan manusia jang dihinggapi oleh nafsu loba dan laba. Semangkin hari semangkin besar djumlah manusia jang penghidupanja dikuasai oleh kaum kapitalis.

Revolusi teknik menimbulkan suatu masalah, yang kaum madjikan tidak sedikit juga lagi mementingkan keselamatan orang dan dasar kemanusiaan, melainkan semata-mata bertuhan kepada Teknik! salah satu perbedaan besar anantara dahulu dan sekarang: dahulu manusia yang terbuka, bekerdja dibantu oleh mesin; sekarang mesin yang utama, manusia terpakai sebagai pembantu sadja. Manusia hampir tidak berharga lagi dimata kaum madjikan.

Peraturan kapitalisme, yang berdasar mentjari untung dan mereka berdjuaang, menimbulkan ombak dalam penghidupan orang banjak, membawa perekonomian turun naik. Peredaran ekonomi berganti-ganti membawa krisis dan malaise dan kemandjuaan ekonomi, membawa pasang turun dan pasang naik. Satu-satu peredaran yang dinamai orang „kondjungtur” lamanja tudjuh sampai sebelas tahun. Oleh karena itu ekonomi dunia tidak akan terlepas dai bahja krisis dan malaise yang berulang-ulang datangja, selama kapitalisme masih bermaharadjalela diata dunia ini, selama tangkai penghidupan orang banjak dan perusahaan yang mengenai keperluan rakjat masih ditangan satu golongan ketjil, kaum madjikan.

Inilah djadinja buah tjita-tjita induvidualisme abad ke-XVIII, yang tentu tidak diniatkan oleh para ahli dan pudjangga yang mengembangkannj. Nasib rakyat yang mereka bela ibarat orang yang terlepas dari ikatan yang satu, masuk kedalam djerat yang lain. Hilang konkongan Geredja dan feodalisme, timbul tindisan kapitalisme. Selagi kapitalisme menguasai penghidupan rakjat, pemerintahan rakjat yang sebenardja, jaitu rakjat menentukan nasibnja sendiri, tidak dapat dilakukan dan tinggal teori sadja. Demokrasi yang sebenarnja susah dapat berdjalan sedjalan dengan autokrasi ekonomi. Satu diantara yang dua harus lengjap.

Djadinja, demokrasi Barat, yang dilahirkan oleh Revolusi Perantjis tiada membawa kemerdekaan rakjat yang sebenanja, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu demokrasi politik sadja tidak tjukup untuk mentjapai demokrasi yang sebenarnja, jaitu Kedaulatan Rakjat. Harulah ada pula demokrasi ekonomi, yang memakai dasar, bahwa segala penghasilan yang mengenai penhidupan orang banjak harus berlaku dibawah tanggung an orang banjak juga.

Volkssouvereiniteit yang diandjurkanoleh Rousseau pintjang dan menjjimpang djalannja, tiada membawa kedaulatan kepada rakyat, oleh karena ia berdasar individualisme. Dan keterangan diatas tjukup memberi bukti, bahwa semangat individualism tidak dapat sesuai dengan tjita-tjita kedaulatan rakjat jaitu rakjat radja dalam menentukan nasibnja sendiri. Bagaimana pemerintah negeri harus

didjalankan dan bagaimana tjaranja rakjat mesti hidup, semuanja itu harus hasil keputusan rakjat atas mupakat.

Sebab itu, kedaulatan rakjat menurut edjaan Rousseau jang hanja mengemukakan demokrasi politik sadja tidak terpakai oleh Pendidikan Nasional Indonesia. Dalam “daulat rakjat” No. 1, pada kata pendahuluan tertulis:

“kita mengetahui bagaiman sifat perseorangan Barat itu (individualism) merusakkan pergaulan hidup, memutar satu asas jang baik seperti Kedaulatan Rakjat mendjadi perkakas pemakan rakjat.

Kita tidak akan membawa marabahaja Barat itu (kapitalisme) ketanah air kita. Sebab kedaulatan rakjat jang kita kemukakan harus berlainan dari pada keadaannya di Barat, harus bersendi kepada sifat kemasjarakatan (gemeenschap), jang mendjadi tiang persekutuan kita semendjak zaman purbakala”

Sekarang njatalah, bahwa perbedaan antara Volkssouvereiniteit kejakinan Rousseseau dengan kedaulatan Rakjat-paham-Pendidikan Nasinal Indonesia tersebut oleh perlainan asas. Jang pertama tersendi kepada semangat individualism; jang kedua berdasar kepada r a s a - b e r s a m a, kolektivitet. Bagi Pendidikan Nasional Indonesia, kerakjatan tidak sadja dalam pergaulan politik, melainkan djuga dalam urusan ekonomi dan sosial. Rakjat harus diberi hak untuk menentukan nasibnja dalam pengertian jang seluas-luasanja, jaitu berhak menjusun pemerintahan sendiridan mengatur ekonomi sendiri. Keadaan demokrasi Barat sekarang memeberi bukti, bahwa pemerintahan rakjat jang sebetulnja tidak akan tertjapai kalau rakjat tidak berhak untuk menentukan sendiri dengan mupakat, bagaimana ia mesti hidup, dan apa jang harus dihasilkan untuk memenuhi kebutuhannya serta menambah kemakmurannya. Maupun dalam p o l i t i k, maupun dalam e k o n o m i, nasib orang banjak harus ditentukan oleh orang banjka pula, tidak oleh satu golongan ketjil jang berbahagia.

Sungguhpun k e d a u l a t a n r a k j a t jang dimadjukan oleh Pendidikan Nasional Indonesia berupa baru, sebenarnya ia tidak asing bagi rakjat Indonesia, karena tjita-tjita ini tersusun diatas demokrasi tua jang ada di tanah air kita. Rupanja baru, karena ia disesuaikan dengan kehendak zaman untuk mentjapai suatu masjarakat jang berdasar K e a d I l a n dan K e b e n a r a n. rupa dunia sekarang djauh berbeda dengan djaman dahulu, sebab itu pasangan demokrasi lama tidak seukur dengan keperluan sekarang. Pergaulan hidup sekarang mempunjai sifat dan peraturan baru jang tidak ada terdapat dalam pergaulan hidup Indonesia jang asli. Dahulu rakjat kita hidup semata-mata dalam Naturalwirtschaft (ekonomi sendiri), berusaha dengan productie-technick jang paling primitive (kolot). Dimasa itu s o a l perekonomian demokrasi tidak ada. Sekarang perekonomian rakjat kita sudah bersangkutan-paut dengan perekonomian dunia. Soal demokrasi ekonomi mendjadi penting, sebab sudah

ada kapitalisme yang menanam kemegahan autokrasi dalam perekonomian. Dahulu tidak ada kaum kapitalis yang menindis, tidak ada pula kaum buruh yang tertindas. Siperdja mengerdjakan sawah dan ladang sendiri serta mempunyai perkakas sendiri. Hasil tenaga dan djerih-pajahnja kembali kepada dia sendiri! Sekarang pertentangan kelas dan keperluan, pertentangan antara kaum kapitalis dan kaum buruh sudah menjadi soal. Kaum buruh sekarang pada sebagian besar tiada lagi mempunyai milik, hidup sebagai Nur-Arbeiter – sipekerdja sadja – menjual tenaganja kepada kaum madjikan, yang mempunyai kapital dan perkakas penghasil tjukup, sehingga mereka dapat menguasai nasib dan penghidupan orang banyak. Dalam masjarakat yang seperti sikaja berpenghidupan kaja, semiskin bertambah miskin dan silemah makanan sikuat. Oleh karena itu timbul tjita-tjita kepada demokrasi ekonomi yang mentjegah “Texploitation de l’homme”, pemerasan manusia oleh manusia.

Oleh karena itu besar perbedaan masjarakat tua dengan masjarakat abru, maka demokrasi asli Indonesia, bagaiman djuga bagusnja dimana dahulu, tidak mentjukupi diwaktu sekarang.

Djikalau kita perhatikan pemerintahan demokrasi di Indonesia diwaktu dahulu, njatalah bahwa demokrasi itu hanya terdapat pada pemerintahan desa sadja. Yang ada jaitu Desa Demokrasi! disini segala hal mendjadi urusan rakjat bersama. Akan tetapi seperti djuga dengan demokrasi Griek lama tidak terpakai untuk masjarakat Barat sekarang, demikian djuga desa-demokrasi dahulu bagi Indonesia yang akan datang.

Djikalau kita perhatikan alam Indonesia seumumnja dimasa dahulu, maka kita tiada mendapat satu pemerintahan demokrasi, melainkan peraturan-peraturan autokrasi dan feodalisme, dilakukan oleh radja-radja. Keadaan feodalisme inilah yang mentjelakakan rakjat Indonesia sampai diperintah oleh bangsa asing. Demokrasi desa, yang mempunyai dasar yang baik, tidak dapat maju dan sampai pintjang, karena dipundaknja terdapat autokrasi semata-mata.

Djadinja, didalam pergaulan Indonesia yang asli, demokrasi hanya terdapat dibawah. Pemerintahan diata semata-mata berdasar autokrasi. Diatas kepala autonomi desa berdiri „Daulat Tuanku” yang melakukan sewenang-wenangnja, yang tiada dikontrol oleh rakjat. Sebab itu kalau Indonesia Mereka mau mendapat pemerintahan yang berdasar demokrasi, kita tdiak boleh menolehkebelakang. Kita harus melandjutkan demokrasi asli mendjadi kedaulatan rakjat, supaya terdapat [eraturan pemerintahan rakjat untuk Indonesia seumumnja. Daulat Tuanku (Radja)

mesti diganti dengan daulat R a k j a t ! tidak lagi seorang bengsawan bukan pula seorang tuanku, melainkan rakjat sendiri jang radja atas nasibnja.

Sekarang djelaskan apa jang disebut diatas, bahwa K e d a u l a t a n R a k j a t jang dimadjukan oleh Pndidikan Nasional Indonesia sungguhpun baru, sebenaranja tidak asing bagi rakjat Indonesia, karena tersusun diatas Demokrasi Tua jang ada di Tanah Air kita. Demokrasi asli itu kia hidupkan kembali; tetapi tidak pada tempat jang kuno, melainkan pada tingkat jang lebih tinggi, menurut kehendak pergaulan hidup sekarang. Sepadan betul dengan semangat demokrasi asli Indonesia, tjita-tjita Kedaulatan Rakjat-paham-Pendidikan Nasional Indonesia bedasar kepada rasa-bersama, k o l e k t i v i t e t !

Adapun demokrasi asli jang ada didesa-desa di Indonesia, mempunjai tiga sifat jang utama, jang harus dipakai sebagai sendi Perumahan Indonesia Mereka

P e r t a m a : tjita-tjita R a p a t jang hidup dalam sanubari rakjat Indonesia dizaman dahulu sampai sekarang dan tidak luput karena tindasan jang berbagai rupa. Rapat ialah tempat rakjat untuk utusan rakjat bermusjawarat dan mupakat tentang segala urusan jang bersangkutan dengan persekutuan hidup dan keperluan bersama. Disini tampaklah dasar demokrasi pemerintah rakjat.

Kedua: tjita-tjita m a s s a – p r o t e s t, jaitu hak rakjat untuk membantah dengan tjara umum segala peraturan negeri jang dipandang tidak adil. Hak ini besar artinja terhadap kepada pemerintahan despotism atau autokrasi jang tersusun diatas pundak desa-demokrasi. Dan demokrasi tidak dapat erlaku, kalau tidak ada hak rakjat untuk mengadakan protes bersama. Dalam hak ini tertjantum hak rakjat untuk merdeka bergerak dan merdeka berkumpul.

Ketiga: tjita-tjita t o l o n g – m e n o l o n g! sanubari rakjat Indonesia penuh dengan rasa-bersama, kolektivitet. Kalau seseorang didesa hendak membuat rumah atau mengerdjakan sawah ataupun ditimpa bala kematian, maka ia tak perlu membajar tukang atau menggadji orang kuli untuk menolong dia. Melainkan ia ditolong bersama-sama oleh orang-orang sedesa. Disini tersimpan dasar perekonomian ber-kooperasi. Inilah satu bukti, bahwa terhadap kepada perusahaan jang agak besar rakjat kita memakai sifat usaha bersama. Dan kalau kita diperhatikan lagi bahwa t a n a h jaitu mata penghasilan jang terutama didalam masjarakat kita, terhitung m i l i k – b e r s a m a – orang seorang hanja mempunjai hak memakai – maka djelaslah, bahwa persekutuan asli di Indonesia memakai asas c o l l e c t i v i s m e. bukan collectivisme jang berdasar sentralisasi (satu pimpinan dari atas), melainkan d e

sentralisasi, yaitu tiap-tiap bagian berhak menentukan nasibnya sendiri. Bukti ini ternyata pada sifat hak ulajat atas tanah. Bukan negeri seumumnya yang mempunyai hak ulajat atas tanah, melainkan desa.

Inilah sendi tiga daripada demokrasi asli di Indonesia! Djika lingkungan dasarnya diluaskan dan disesuaikan dengan kemajuan zaman, ia menjadi dasar kerakjatan yang seluas-luasnya, yaitu kedaulatan Rakjat seperti paham Pendidikan Nasional Indonesia.

Diatas sendi yang pertama dan yang kedua dapat didirikan tiang-tiang politik daripada demokrasi yang sebenarnya; satu pemerintahan negeri yang dilakukan oleh rakjat dengan perantaraan wakil-wakilnya atau badan-badan perwakilan, sedangkan yang mendjlanakan kekuasaan pemerintahan senantiasa takluk kepada kemauan rakjat. Untuk menjusun kemauan itu rakjat mempunyai hak yang tidak boleh dihilangkan atau dibatalkan; hak merdeka bersuara, berserikat dan berkumpul.

Diatas sendi yang ketiga dapat didirikan tonggak demokrasi ekonomi. Tidak lagi orang seorang atau golongan ketjil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakjat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan. Sebab itu segala tangkai penghasilan besar yang mengenai penghidupan rakjat harus berdasar kepada milik bersama dan terletak dibawah penjagaan rakjat dengan perantara badan-badan perwakilannya. Sebab itu pula tidak lagi nafsu kepada untung yang harus menjadi pedoman penghasilan, melainkan kemakmuran rakjat. Milik orang seorang hanya diakui terhadap barang pakaian dan rumah tangga sendiri dan perusahaan sendiri yang tidak memperalatkan orang lain.

Dan kedua-duanya, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menjadi syarat bagi suatu masyarakat yang berdasar keadilan dan kebenaran, yang menjempurnakan tjita-tjita, bahwa tiap-tiap rakjat berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Bukan saja rakjat dalam golongan besar sebagai bangsa, akan tetapi juga tiap-tiap golongan ketjil atau bagian daripada rakjat, yang mempunyai sifat sendiri, mempunyai hak itu. Sebab itu demokrasi yang sebenarnya memakai sifat desentralisasi; memberi autonomi kepada golongan-golongan di bawah, dalam politik dan ekonomi.

Bagaimanakah mestinya susunan pemerintahan Indonesia merdeka menurut tjita-tjita Kedaulatan Rakjat?

Setelah apa yang diterangkan di atas, pertanyaan ini tidak perlu lagi dijawab panjang lebar. Siapa yang memahamkan uraian itu, dapat menjawab sendiri. Hanya sebagai petunjuk keterangan, kita sebut pokoknya disini.

Indonesia merdeka haruslah suatu republik, yang bersendi kepada pemerintahan rakyat yang dilakukan dengan perantara wakil-wakil atau badan-badan perwakilan. Dari wakil-wakil atau dari dalam badan-badan perwakilan terpilih anggota-anggota pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara. Dan pemerintah ini senantiasa takluk kepada kemauan rakyat yang diinjatakan atau oleh badan perwakilan rakyat dengan referendum, keputusan rakyat dengan suara yang dikumpulkan.

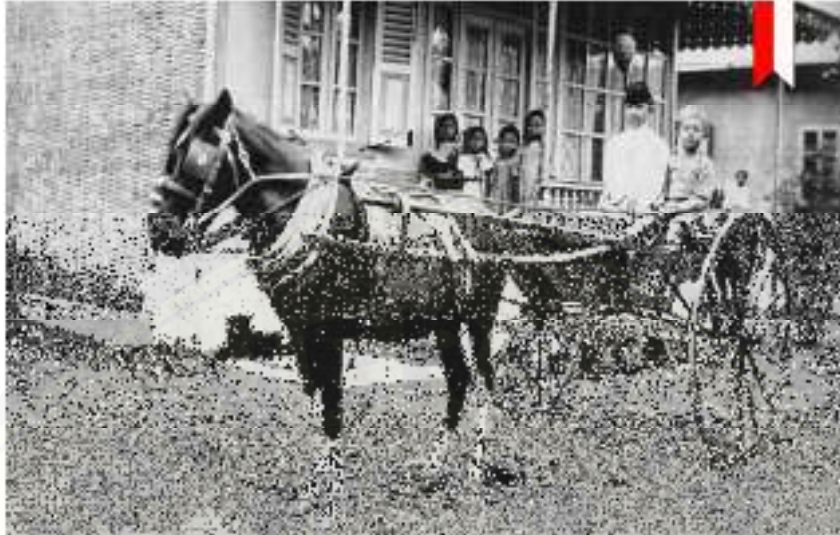
Oleh karena Indonesia terbagi atas beberapa pulau dan golongan bangsa, maka perlulah tiap-tiap golongan, kecil atau besar, mendapat autonomi, mendapat hak untuk menentukan nasib sendiri. satu-satunya dapat mengatur pemerintahan sendiri menurut keperluan dan keadilan sendiri, asal saja peraturan-peraturan masing-masing tidak berlawanan dengan dasar-dasar pemerintahan umum.

Djadinja, terhadap keluar Indonesia satu, dan kedalam terdiri atas beberapa badan yang mempunyai autonomi yang sempurna dan hidup.

Perekonomian Indonesia Merdeka diatur dengan usaha bersama. Dengan ini tidak dapat di maksud akan mematikan perusahaan yang kecil-kecil yang hanya dapat dikerjakan oleh orang seorang saja dan tiada menjinggung keperluan umum. Usaha bersama dilakukan terhadap kepada penghasilan yang besar-besar mengenai keperluan umum dan kemakmuran rakyat semuanya. Desentralisasi ekonomi dilakukan dengan memakai koperasi sebagai dasar perekonomian. Djadinja, Indonesia ibarat satu taman berisi pohon-pohon koperasi, yang buahnya dipungut oleh rakyat yang banyak. Djadinja, bukan koperasi yang bersaing satu sama lain mencari untung besar, melainkan yang bekerja bersama-sama untuk membela kebutuhan rakyat semuanya dan keperluan umum seperti pelajaran, seni, d.l.l.

Demikianlah rupa Indonesia serikat menurut dasar Kedaulatan Rakyat yang diandjurkan oleh Pendidikan Nasional Indonesia.

Lampiran E. Foto-Foto Hasil Dokumentasi Penulis



Gambar 1. Mohammad Hatta ketika berumur 8 tahun di depan rumah kelahirannya, Sumatera Barat.

Sumber: Hatta, M. 2011. *Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.



Gambar 2. Mohammad Hatta menjadi pengurus Perhimpunan Indonesia di Belanda tahun 1925.

Sumber: Hatta, M. 2011. *Berjuang dan Dibuang*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.



Gambar 3. Mohammad Hatta menjadi pengurus eksekutif dari organisasi liga menentang imperialisme, penindasan kolonial dan untuk kemerdekaan Nasional.

Sumber: Hatta, M. 2011. *Berjuang dan Dibuang*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.



Gambar 5. Mohammad Hatta berpidato sebagai wakil Presiden yang mengemparkan peserta sidang pleno KNIP di Malang pada 25 Februari 1947.

Sumber: Hatta, M. 2011. *Menuju Gerbang Kemerdekaan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.